

Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Nusa Tenggara Barat

Direktorat
Kerudayaan

5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983/1984

MILIK DEPARTEMEN P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN

SEJARAH PERLAWANAN

TERHADAP IMPRIALISME DAN KOLONIALISME DI NUSA TENGGARA BARAT

Susunan Tim/Penulis:

1. LALU WACANA, BA : Ketua
2. RIAMIN, BA. : Anggota
3. MUSTAKIM BIAWAN
4. A. WAHAB H. ISMAIL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983/1984

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1983
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah yang akan memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Agustus 1983
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL

Penyunting :

1. Drs. R.Z. Leirissa
2. Drs. Suwadji Syafei

Gambar kulit oleh :

M.S. Karta

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	v
DAFTAR PETA	vii
PRAKATA	ix
PENDAHULUAN	1
BAB I. PERLAWANAN DI P. LOMBOK	13
A. PERLAWANAN KERAJAAN MATARAM	13
1. Latar Belakang Perlawanan	13
2. Jalannya Perlawanan	24
3. Akibat Perang Mataram	37
B. PEMBERONTAKAN DESA SESELA	42
1. Latar Belakang Perlawanan	42
2. Jalannya Perlawanan	42
C. PEMBERONTAKAN MAMELAQ	43
1. Latar Belakang Perlawanan	43
2. Jalannya Perlawanan	43
D. PEMBERONTAKAN GANDOR	45
1. Latar Belakang Perlawanan	47
2. Jalannya Perlawanan	47
E. PERANG PRINGGABAYA	49
1. Latar Belakang Perlawanan	52
2. Jalannya Perlawanan	53
CATATAN	57
BAB II. PERLAWANAN DI P. SUMBAWA	59
PERANG SAPUGARA	59
PENDAHULUAN	59
1. Latar Belakang Perlawanan	61
2. Jalannya Perlawanan	64
3. Akibat Perlawanan	70

CATATAN	71
BAB III. PERLAWANAN DI BIMA	73
A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN	73
B. HUBUNGAN BIMA DENGAN MAKASAR	76
1. Masa Keemasan Sebelum Islam	76
2. Masa Islam	78
3. Masa sesudah Penyebaran Islam	82
4. Bima Di Masa Penjajahan Belanda	84
5. Bima Menjadi Jajahan Belanda	87
C. UJUD PERLAWANAN	90
1. Perang Ngali	93
2. Perang Dena	96
3. Perang Kala	99
4. Perang Soriotu	105
BAB IV. PERLAWANAN TERHADAP JEPANG	110
A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN	110
B. BENTUK PERLAWANAN	112
1. Perlawanan Bersenjata	113
a. Pertempuran Sesela	115
b. Pertempuran Brangpanas	117
c. Pertempuran Wanasaba	118
d. Pertempuran Labuhan Haji	119
e. Perlawanan Rakyat Bima	120
2. Perlawanan Secara Diam-diam dan Pemboikotan	123
PENUTUP	125
DAFTAR KEPUSTAKAAN	126
DAFTAR INFORMAN	127

DAFTAR PETA

1. Peta Pulau Lombok (1895)
2. Peta Kota Ampenan, Mataram dan Cakranegara (1895)
3. Peta Propinsi Nusa Tenggara Barat (1958)
4. Peta Perlawanan Terhadap Belanda (Awal abad ke-20)
5. Peta Pendaratan Jepang di Sunda Kecil
6. Peta Sunda Kecil Syu
7. Propinsi Sunda Kecil
8. Peta Perebutan Senjata Jepang

PRAKATA

Dalam melaksanakan tugas di Daerah Nusa Tenggara Barat Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) Departemen P dan K telah membentuk tim. Tugas tim ialah untuk mengadakan inventarisasi dan dokumentasi serta menyusun laporan mengenai sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Nusa Tenggara Barat. Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Nusa Tenggara Barat bertujuan:

1. Menginventarisasi dan mendokumentasikan kejadian bersejarah yang berhubungan dengan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Nusa Tenggara Barat
2. Hasil inventarisasi dan dokumentasi ini bermanfaat untuk dijadikan bahan sejarah nasional
3. Dapat meningkatkan kesadaran dan patriotisme dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan demi ketahanan nasional.

Dalam lintasan perkembangan Sejarah Nusantara di Nusa Tenggara Barat terdapat perlawanan yang belum sempat diteliti dan diungkapkan dalam sejarah nasional maupun sejarah lokal. Di antaranya ada yang memiliki nilai yang sangat berguna bagi pembentukan semangat kepahlawanan dan patriotisme. Kejadiannya belum lama berlangsung, tetapi kurangnya informan dan terbatasnya literatur terasa menghambat pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi.

Ruang lingkup inventarisasi dan dokumentasi meliputi seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari enam buah kabupaten dan sebuah kota administratif. Sasarannya mengenai perlawanan terhadap Belanda dan Jepang dari akhir abad ke-20. Bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat

Nusa Tenggara Barat terhadap kolonialisme dan imperialisme yaitu: perlawanan bersenjata dan perlawanan dengan pemboikotan mengingat terbatasnya wilayah dan kurun waktu yang menjadi sasaran serta sesuai dengan data dan informasi yang tersedia. Sebab masa penjajahan Belanda dan Jepang secara nyata di Nusa Tenggara Barat relatif sangat pendek; Belanda (1895–1942) dan Jepang dari 1942–1945. Dari hasil inventarisasi dan dokumentasi tersusun laporan yang sistimatikanya sebagai berikut:

Pendahuluan

- BAB I** Perlawanan terhadap Belanda
Menguraikan tentang beberapa perlawanan terhadap Pemerintah Belanda baik ketika hendak masuk maupun setelah berkuasa penuh.
- BAB II** Perlawanan Terhadap Jepang
Menguraikan serba singkat tentang perlawanan-perlawanan rakyat yang satu sama lain terpisah. Ada yang bermotif untuk mempertahankan kehormatan dirinya karena dicemari dan ada pula dalam usaha mencari senjata api untuk mempertahankan diri dari sebuhan tentara Nica.
- BAB III** Penutup
Memuat kesimpulan sebab-sebab dan bagaimana timbulnya perlawanan tersebut silih berganti tanpa mengenal gentar dan putus asa.

PENDAHULUAN

I. TIMBULNYA KERAJAAN-KERAJAAN DI LOMBOK

Sejak berabad-abad yang lampau Pulau Lombok yang kecil itu sudah dikenal karena suburnya dan hasil pertaniannya padi dan kapas.¹⁾ Selat Lombok merupakan jalur perjalanan candu.²⁾ Karena itu pula daerah Lombok sudah menjadi rebutan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia pada masa lalu seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Bali dan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan.

Menurut kenyataan sejarah, dahulu di Pulau Lombok terdapat Kerajaan-kerajaan Sasak, Selaparang kemudian Pejanggik dan kerajaan kecil lainnya seperti Langko, Bringa, Benoa, Bayan Parwa dan Sokong. Kerajaan Selaparang maupun Pejanggik masing-masing terletak di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Peninggalan sejarah kedua kerajaan itu masih dapat kita lihat berupa makam. Ketika masyarakat Indonesia memeluk Agama Islam, dan kerajaan-kerajaan di Lombok sudah masuk Islam pada abad ke-16, maka Kerajaan Gelgel di Pulau Bali yang tidak mau memeluk Agama Islam dan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan yang giat menyiarkan Agama Islam berlomba-lomba untuk menguasai Pulau Lombok. Karena letak Pulau Bali lebih dekat dengan Pulau Lombok maka pengaruh serta kekuatan Kerajaan Gelgel lebih besar dan nyata dari pengaruh Kerajaan Gowa. Di bawah ini kami uraikan perkembangan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Lombok.

KERAJAAN SELAPARANG

Selaparang sudah berdiri sejak abad ke-16. Pendiri Kerajaan Selaparang ialah Raja Kertajagat. Pada masa ini Raja Batu Renggong dari Gelgel menaklukkan Pulau Lombok. Pada ta-

hun 1824 Kerajaan Gowa yang selalu berusaha meluaskan kekuasaannya dan menyebarkan Agama Islam ke seluruh Indonesia bagian Timur mengadakan suatu traktat antara Raja Saganing dari Gelgel dengan Sultan Alaudin.³⁾ Gowa belum cukup kesempatan untuk menaklukkan Lombok, karena Gowa masih sibuk menghadapi monopoli VOC. Baru pada tahun 1640 Selaparang Lombok dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa (mungkin sebagian dari Kerajaan Selaparang). Tetapi kedudukan Gowa di Selaparang tidak selalu kuat dan bertahan lama, sebab dalam Babad Selaparang disebutkan cucu dari Kertajagat yaitu Raja Kertabumi dapat membangun Kerajaan Selaparang kembali. Kertabumi menyusun pemerintahan dengan teratur dan membangun masyarakatnya sehingga kehidupan rakyat menjadi makmur. Raja dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh penasihat yang terdiri dari ahli agama, adat dan yang ahli dalam bidang kemasyarakatan/pemerintahan. Pembantu raja dalam bidang pemerintahan ialah: Patih Tumenggung, Para Demung, Para Rangga dan Nyaka.⁴⁾

Penasehat raja dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan adalah Pemangku Adat Gama, Pemangku Luir Gama, Penghulu Kerajaan, Para Kiyai dan Toa' lokaq. Pada masa Raja Kertabumi ini patih yang mendampingi beliau bernama Arya Sudarsana atau Arya Banjar Getas yang berdiam di Perigi. Siapa Banjar Getas ini sebenarnya?

Mengenai asal-usul Banjar Getas ada beberapa pendapat. Pendapat pertama: Arya Banjar Getas asalnya dari Pejanggalik. Ketika lahir ia dibuang ke laut lalu terdampar di Banjarmasin; dari Banjarmasin terdampar di Pulau Jawa dan dari sini terus ke Bali serta kemudian terdampar di Bayan yang selanjutnya mengabdikan menjadi Patih Selaparang. Akhirnya mengabdikan sebagai patih di Pejanggalik di bawah Raja Meraja Kusuma. Banjar Getas bentrok pendapat karena masalah wanita; dan akhirnya Meraja Kusuma mengundang Raya Karang Asem un-

tuk membasmi Banjar Getas. Tetapi Banjar Getas mengetahui siasat Raja Meraja Kesuma. Ketika utusan Bali tiba di Lombok, Banjar Getas telah lebih dahulu menunggu di pantai. Rombongan Karang Asem dipimpin oleh I Gusti Ketut Karang Asem dan didampingi oleh Ida Ketut Subali dengan membawa tiga ribu prajurit. Banjar Getas dengan I Gusti Karang Asem sepakat bersama-sama menyerang Raja Pejanggalik.

Pendapat kedua: Arya Banjar Getas asalnya dari Kerajaan Gelgel Kelungkung dan mempunyai kakak bernama Arya Gajah Para. Gajah Para dan Banjar Getas berkuasa di Gianyar Kelungkung berbatasan dengan Karang Asem. Gianyar merupakan vazal Kelungkung. Banjar Getas dengan seratus orang pengikut diutus ke Lombok oleh Kelungkung untuk menguasai daerah Lombok. Mula-mula rombongan Banjar Getas mendarat di Bayan kemudian langsung pergi ke Selaparang. Karena kecakapannya dan keberaniannya, Banjar Getas diangkat menjadi patih di Selaparang. Banjar Getas sendiri berdiam di Desa Perigi. Dalam kedudukannya sebagai patih, Banjar Getas kawin dengan putri Desa Selamadeg. Setelah lama mengabdikan di Selaparang dia jatuh cinta pula pada isteri Datu Selaparang sehingga mengakibatkan perselisihan yang kemudian berlanjut menjadi peperangan. Karena Banjar Getas mempunyai pengikut banyak, dalam perang ini Datu Selaparang menderita kekalahan. Pemimpin Perang Datu Selaparang, Patih Singayuda dan Bandayuda bertekuk lutut dalam menghadapi pasukan Banjar Getas, bahkan kedua patih tersebut tewas.

Dalam Babad Selaparang disebutkan patih dari Selaparang bernama Waringin dan Patih Mumbul.⁵) Karena prajurit Selaparang dalam perang melawan Patih Banjar Getas selalu menderita kekalahan, maka menurut hasil musyawarah antara raja dengan para pemimpin bawahannya diputuskan untuk meminta bantuan ke Banjarmasin. Setelah tiga bulan berlayar sampailah utusan dari Selaparang di Banjarmasin. Utusan tersebut diterima dengan baik oleh Raja Banjarmasin dan Raja Banjar-

masin mengutus Patih Pilo dan Patih Laga ke Selaparang.⁶⁾

Sedang menurut versi lain,⁷⁾ patih yang dikirim Raja Banjarmasin ialah Patih Pilo dan patih Sudarbaya. Setelah pasukan bantuan dari Banjarmasin ini tiba maka barulah pasukan Arya Banjar Getas dikalahkan. Patih Banjar Getas sendiri melarikan diri ke Berenga, kemudian ke Pejanggik. Maka putuslah hubungan antara Pejanggik dan Selaparang. Di Kerajaan Pejanggik Arya Banjar Getas dengan cepat diangkat menjadi patih oleh Raja Pejanggik. Hal ini terjadi karena Arya Banjar Getas memang terkenal cakap dan berani.

KERAJAAN PEJANGGIK

Di Pejanggik, suatu tempat di Lombok Tengah, pernah berdiri kerajaan sekitar permulaan abad ke-17. Pejanggik masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kerajaan Selaparang. Kehidupan masyarakat Pejanggik ialah bertani. Pemerintahan diatur secara desentralisasi.

Di pemerintahan pusat raja dibantu oleh patih, para demung, para ranga dan nyaka. Dalam melaksanakan bentuk pemerintah daerah raja dibantu oleh perangkat daerah sebagai berikut:

1. Para Jaksa (bidang Administrasi)
2. Para Pemangku (bidang Adat dan Agama)
3. Lang-lang (bidang Kamtibmas)
4. Para Juru Arah (bidang Komunikasi)
5. Keliang
6. Para Luput

Pemerintahan dalam zaman Pejanggik sudah sangat teratur. Setelah Patih Banjar Getas kalah perang dari Selaparang beliau melarikan diri ke Pejanggik, Raja Pejanggik Meraja Kesuma sebelumnya sudah diperingati oleh Raja Kertabumi dari Selaparang, bahwa penerimaan Arya Banjar Getas akan menyebabkan retaknya hubungan baik dua pihak kerajaan. Di samping itu oleh Selaparang diperingatkan juga kelak Pejanggik akan

mendapat kesukaran dari Arya Banjar Getas. Arya Banjar Getas memang orang cerdas dan lihai. Setelah diangkat menjadi patih di Pejanggalik, beliau kawin dengan Dewi Junti seorang puteri dari Ranggalapong. Tindakan berikut yang dilakukan oleh Arya Banjar Getas ialah menjalankan politik penaklukan raja-raja kecil di Lombok (dikenal dengan Politik Rerepe).⁷⁾

Politik Rerepe ini pelaksanaannya sebagai berikut. Raja melaksanakan pesta. Dalam pesta tersebut dibuatkan suatu masakan khusus yang dicicipi sedikit oleh raja. Sisa makanan yang telah dicicipi raja itu lalu dibagikan ke dalam "ancak" dan makanan itu dikirim pada raja-raja kecil yang akan ditaklukkan. Apabila makanan itu diterima oleh raja yang bersangkutan berarti raja tersebut mengakui kedaulatan Raja Pejanggalik. Kedudukannya pun merosot menjadi demung. Hampir semua kerajaan kecil menerima karena takut pada Pejanggalik dan patihnya Arya Banjar Getas. Raja yang sudah takluk diturunkan pangkatnya menjadi demung. Politik Rerepe ini menimbulkan rasa tidak puas terhadap Raja Pejanggalik.

Pada suatu ketika Arya Banjar Getas kembali ke Bali untuk melaporkan bahwa beliau telah kawin dan diangkat menjadi patih di Pejanggalik. Ada pula mendapat bahwa Arya Banjar Getas pulang untuk urusan kenegaraan ke Kelungkung dan Karang Asem. Ketika Arya Banjar Getas berada di Bali, Raja Meraja Kusuma menaruh hati pada Dewi Junti isteri Arya Banjar Getas. Sekembalinya Banjar Getas, istrinya melaporkan kejadian ini sehingga menimbulkan rasa benci dan marah pada raja. Kemarahan Arya Banjar Getas dilanjutkan dengan menyerang Pejanggalik. Dalam pemberontakan ini Arya Banjar Getas kalah. Untuk membalas kekalahan ini Arya Banjar Getas mengundang Raja Karang Asem supaya membantu memerangi Pejanggalik. Kejadian ini berlangsung tahun 1692.⁸⁾

II. KEKUASAAN BALI DI PULAU LOMBOK

Kekuasaan Kerajaan Gelgel

Dalam perjalanan sejarahnya Pulau Lombok dikuasai silih berganti oleh kerajaan yang berasal dari Lombok maupun dari luar Pulau Lombok. Penduduk/suku bangsa Sasak sangat mungkin nama Sasak diberikan karena keadaannya yang selalu jadi daerah rebutan.

Pulau Lombok merupakan penisah antara kekuatan-kekuatan Timur (Gowa) dengan kekuatan Barat (Bali). Sasak dalam kamus Bahasa Jawa Kuno karangan Prof. Dr. Soewojo Wojowasito (muka 300) diartikan sejenis dinding, atau bahasa lainnya seperti dinding pemisah. (Menurut R. Goris kata Sasak berasal dari Bahasa Sanskerta. Asal katanya Sah Saka. Sah artinya pergi meninggalkan. Saka artinya leluhur. Sahsaka artinya pergi meninggalkan leluhur mereka (Jawa) kemudian mengumpul di Lombok)⁹)

Dalam ekspedisi Gajah Mada ke Bali terjadilah kekacauan Pulau Bali dan tak ada pemimpinnya. Untuk mengatasi keadaan ini maka Majapahit mengangkat seorang bangsawan Majapahit menjadi Gubernur Bali yaitu Arya Kapakisan. Keraton Kapakisan ini semula bertempat di Samprangan. Raja Kapakisan kemudian diganti oleh putranya I Dewa Samprangan yang tidak disenangi oleh para penggawa. Para penggawa di bawah pimpinan Kubo Klapa meminta I Dewa Ketut, adik dari I Dewa Samprangan, menjadi raja. Raja I Dewa Ketut tidak memerangi kakaknya, tetapi membangun kota (keraton) baru yang bernama Gelgel.

Salah seorang Raja Gelgel yang terkenal dan termashur ialah Raja Batu Renggong. Di bawah Batu Renggong Gelgel lepas dari kekuasaan kerajaan di Jawa. Yang sangat penting pada masa Batu Renggong ialah kekuasaannya tidak terbatas di Bali saja, tetapi meliputi Blambangan, Lombok dan Sumbawa.

Batu Renggong diganti oleh Bekung; terjadi kekacauan di bawah pemerintahan Raja Bekung. Bekung diganti oleh Saganing dan keamanan dalam negeri dipulihkan kembali. Tahun 1624 Raja Saganing dari Gelgel mengadakan traktat dengan Sultan Alaudin dari Gowa.¹⁰) Rupa-rupanya Saganing terpaksa mengadakan traktat ini karena sedang melakukan pemulihan keamanan di dalam negerinya dan karena sedang menghadapi ancaman dari Kerajaan Mataram.

Saganing diganti oleh Di Made yang merupakan Raja Gelgel terakhir dan meninggal tahun 1650. Setelah Di Made meninggal terjadi keributan besar di Bali karena para vazal saling bermusuhan. Akhirnya kekacauan ini dapat diatasi tahun 1686 oleh Gusti Sidemen. Gusti Sidemen ini kemudian memindahkan Pusat Pemerintahan dari Gelgel ke Klungkung. Pada saat inilah Raja Klungkung mengirim Banjar Getas ke Lombok.

Kekuasaan Karang Asem di Lombok

Di daerah Karang Asem berkuasa seorang pemimpin yang bernama I Gusti Anglurah Ketut Karang Asem. Beliau diundang ke Lombok oleh Arya Banjar Getas untuk memerangi Raja Meraja Kusuma dari Pejanggik. Yang diutus ke Karang Asem membawa surat undangan bantuan adalah Arya Banjar Getas sendiri. Permohonan Banjar Getas untuk memerangi Pejanggik dikabulkan oleh I Gusti Ketut Karang Asem. Tahun 1692 I Gusti Anglurah Ketut Karang Asem didampingi oleh Ide Ketut Subali dengan tiga ratus orang prajurit mendarat di Padang Reya (di sebelah selatan Ampenan). Pasukan ini dikenal dengan nama Pasukan Biji Jarak karena mereka memakai ikat kepala putih dan pakaian hitam. Dari Padang Reya I Gusti Ketut Karang Asem beserta pasukannya yang diikuti oleh Arya Banjar Getas menuju Gunung Pangsung (atau Gunung Pengsong) untuk memohon berkah kepada Tuhan agar memperoleh kemenangan dalam peperangan. Hal ini dilakukan karena sebelum I Gusti Ketut Karang Asem ke Lombok, beliau telah me-

lakukan tapa di Bukit Karang Asem. Di situlah I Gusti Ketut Karang Asem mendapat petunjuk bahwa setelah sampai di Lombok beliau harus pergi ke Gunung Pengsong lebih dahulu dan akhirnya dalam petunjuk tersebut beliau akan menang perang serta akan memerintah di Lombok selama tujuh keturunan.¹¹⁾

Setelah melakukan semadi di Gunung Pengsong maka pasukan I Gusti Ketut Karang Asem beserta Arya Banjar Getas menuju ke timur laut tapi rupanya tersesar karena arahnya berbelok ke Lingsar, Punikan, dan baru kemudian membelok ke tenggara dan sampailah di Sedau. Di Sedau pasukan ini berhenti dan I Gusti Anglurah Ketut Karang Asem dengan Arya Banjar Getas memutuskan untuk membagi Pulau Lombok menjadi dua bagian. Lombok bagian Barat menjadi milik I Gusti Anglurah Karang Asem, sedangkan Lombok bagian Timur dikuasai oleh Arya Banjar Getas. Batas kekuasaan antara Arya Banjar Getas dengan I Gusti Anglurah Ketut Karang Asem ialah Sweta, Penentang Aliq, Pelambik, Ranggegata dan Belongas.¹²⁾

Setelah mengadakan perundingan maka gabungan pasukan meneruskan perjalanan menuju Pejanggik. Mula-mula gerakan pasukan gabungan tidak mengalami perlawanan berarti di tempat-tempat yang dilaluinya. Tetapi setelah sampai di dekat perbatasan dengan ibukota Pejanggik pasukan ini menghadapi perlawanan yang sengit dan hebat. Pejanggik mempertahankan kekuasaannya dengan gagah berani tetapi akhirnya dapat dikalahkan. Rajanya ditawan kemudian dikirim ke Bali dan akhirnya dibunuh di Ujung Karang Asem, Bali.¹³⁾

Setelah Kerajaan Pejanggik takluk, gabungan tentara Arya Banjar Getas dan tentara Karang Asem menyerang dan menaklukkan raja-raja kecil lainnya di bekas wilayah Kerajaan Pejanggik. Gabungan tentara Karang Asem dan tentara Banjar Getas melanjutkan serangannya ke Kerajaan Selaparang di Lombok Timur. Kerajaan Selaparang juga dapat ditaklukkan

oleh gabungan tentara Banjar Getas dan tentara Karang Asem. Setelah Selaparang takluk tentara gabungan kemudian menaklukkan Kerajaan Parwa di Sakra. Perang ini tidak berlangsung lama. Parwa dapat dikalahkan dengan cepat sedang rajanya Pembani Haji menghilang tak tentu rimbanya.

Akhirnya kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Lombok menyerah tanpa perlawanan pada gabungan tentara Arya Banjar Getas dan tentara Karang Asem. Dengan selesainya menaklukkan kerajaan-kerajaan Lombok, maka Arya Banjar Getas dan I Gusti Anglurah Karang Asem melaksanakan isi perjanjian tersebut di atas. Arya Banjar Getas selanjutnya membangun kerajaan baru di Lombok Tengah dengan pusat pemerintahannya di Memelak. Pemerintahan diatur dengan baik. Masyarakat melakukan tugas pokok yaitu bertani; prasarana agama seperti mesjid, langgar juga dibangun. Pasar dibangun tempat masyarakat menjual hasil pertanian dan peternakannya. Dalam membina kerajaannya Banjar Getas tak luput pula dari gangguan, baik dari Lombok sendiri maupun dari luar Pulau Lombok.

Selanjutnya I Gusti Anglurah Ketut Karang Asem menduduki wilayah Lombok Barat. Tetapi beliau belum merasa puas. Setelah merasa kuat, raja dari Karang Asem ini terus menerus berusaha untuk menguasai seluruh Pulau Lombok. Usaha menaklukkan seluruh Lombok di bawah hegemoni Karang Asem baru berhasil pada tahun 1740. Sejak tahun ini secara nyata Lombok dikuasai seluruhnya oleh Karang Asem.¹⁵) Rupanya para bangsawan yang ikut bergabung dalam penaklukan di Lombok ini menuntut upah atas jasa-jasanya. Maka berdirilah kerajaan-kerajaan kecil di Lombok Barat. Kerajaan tersebut ialah: (1) Kerajaan Singosari atau Karang Asem; (2) Kerajaan Mataram; (3) Kerajaan Pagesangan; (4) Kerajaan Pagutan; (5) Kerajaan Kediri; dan (6) Kerajaan Sengkongo.

Orang-orang Bali yang menetap di Lombok Barat berusaha memelihara kebudayaan daerahnya. Kehidupan sosial masyarakat diatur seperti keadaannya di Bali. Organisasi sosial ma-

syarakat Bali sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan aktivitas keagamaan. Dalam kehidupan kelompok sosial ini, individu-individu selalu lebih erat menjalin hubungan dan kerjasama untuk menanggulangi kepentingan bersama serta untuk dapat menyelesaikan tugas sosialnya maupun pekerjaan setiap anggota kelompok. Bentuk-bentuk organisasi sosial yang dimaksud ialah: desa, banjar, sekeha, dan subak.

Desa merupakan suatu pengelompokan sosial berdasarkan kesatuan wilayah yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya dan bukan saja terdapat di Bali tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Sistem desa di Bali dipergunakan orang Bali di Lombok.

Banjar merupakan organisasi adat dan dibagi atas tempakan-tempakan apabila anggotanya banyak. Tujuan pembagian ini untuk memperlancar tugas banjar. Banjar dipimpin oleh klian-banjar.

Sekeha atau perkumpulan adalah organisasi adat yang lebih kecil dari banjar, dan merupakan pelaksana dari tugas-tugas banjar, khususnya menyediakan keperluan-keperluan banjar. Kelompok sosial ini sifatnya sementara tetapi kadang-kadang dapat bertahan lama, bahkan sampai turun-temurun. Pembentukan sekeha didasarkan atas adanya tujuan tertentu misalnya sekeha gong bergerak di bidang tabuh, sekeha kidung bergerak di bidang kidung dan lain-lain.

Subak adalah organisasi pengairan yang anggotanya para petani, dan tujuannya untuk mengurus kepentingan mereka bersama dalam bidang pengairan. Subak dipimpin oleh seorang pekasih yang harus membagi air seadil-adilnya, memelihara saluran air/parit dan memberantas hama. Pekasih berhak menjatuhkan hukuman terhadap anggotanya yang melanggar peraturan.

III. PEPERANGAN ANTARA KERAJAAN SINGOSARI DAN KERAJAAN MATARAM.

Pada mulanya keenam Kerajaan Bali di Lombok bergabung menurut sistem kekeluargaan. Masalah-masalah politik maupun sosial-ekonomi selalu dimusyawarahkan dan dipecah-

kan secara kekeluargaan. Tetapi lama kelamaan rasa persatuan dan kekeluargaan ini makin lemah, karena masing-masing penguasa ingin merebut hegemoni. Hal ini menimbulkan perselisihan besar dan akibatnya timbul permusuhan yang tak ada hentinya. Dalam perebutan hegemoni berturut-turut Kerajaan Singosari berhasil menaklukkan lawannya. Mula-mula ditaklukkannya Kerajaan Sengkongo (1803), lalu Kerajaan Kediri (1804), Kerajaan Pagesangan (1830) dan terakhir akan menghancurkan Mataram.¹⁶⁾

Tetapi Singosari menemui kegagalan. Untuk menghadapi Singosari Kerajaan Mataram bersekutu dengan raja-raja kecil lainnya. Suasana yang panas dan tegang antara Kerajaan Singosari dan Kerajaan Mataram akhirnya meletus menjadi perang besar di Pulau Lombok. Perang ini berlangsung dari bulan Januari 1838 sampai dengan tahun 1839. Dalam situasi ini orang-orang Barat ikut campur: George Peacock King pedagang Inggris dan Anachoda Ismail seorang nakhoda dan pedagang Bugis memberikan bantuan aktif dan efektif pada Kerajaan Mataram. Sebaliknya pedagang Denmark bernama John Byrd dan Mds J. Lange yang berkedudukan di Tanjung Karang sebagai Subandar oleh Raja Mataram membantu Singosari Karang Asem. Juga seorang ajudan J. Lange bersama Mobron, seorang Indo Belanda yang kemudian dipakai sebagai Komandan Beterg Altelier di pihak Singosari Karang Asem.¹⁷⁾

Dalam peperangan ini Raja Mataram I Gusti Ketut Karang Asem gugur sehingga pimpinan beralih ke tangan putranya A.A. Ketut Karang Asem dan A.A. Gde Ngurah Karang Asem yang didampingi oleh Sri Bagus Karang Asem. Dalam pimpinan beliau tersebut prajurit Mataram berhasil merebut kembali benteng-bentengnya yang telah takluk pada Singosari (Karang Asem). dan selanjutnya satu persatu benteng pertahanan Singosari jatuh ke tangan Mataram seperti di desa: Omba, Babakan, Bengkel dan Kediri. Kemudian menyusul benteng-benteng pertahanan yang mengelilingi Puri Singosari seperti: Sweta, Dasan Jangkrik dan Panaraga.

Puri Singosari terkepung dari segala penjuru. Akhirnya Kerajaan Singosari (Karang Asem) dihancurkan pada tahun 1839 dan Raja Singosari tewas dalam pertempuran tersebut. Puri Pagutan yang sejak semula membantu Mataram juga dihancurkan oleh Mataram. Setelah menaklukkan semua Kerajaan Bali di Lombok seperti Singosari atau Karang Asem, Pagutan, Pagesangan, Kediri dan Sengkongo, Kerajaan Mataram meluaskan kekuasaannya dengan menaklukkan Praya, Kuriplan dan lain-lain. Semenjak itu Kerajaan Mataram menjadi penguasa tunggal di Pulau Lombok. Kerajaan Mataram kini diperintah oleh dua bersaudara yaitu: A.A. Ketut Karang Asem dan A.A. Gde Ngurah Karang Asem. A.A. Gde Ngurah Karang Asem membangun Taman Narmada dan Istana (Puri) Tanakbeaq dengan tujuan untuk mendirikan kerajaan baru. Seperti kebiasaan, mendirikan suatu bangunan harus diadakan upacara peresmian. Tetapi sebelum diadakan peresmian, puri ini disambar petir. A.A. Ketut Karang Asem yang mengetahui rencana adiknya dan mengetahui isyarat bahwa puri yang baru dibangun adiknya disambar petir menyarankan kepada adiknya agar tidak membangun puri di Tanakbeaq tetapi di bekas Kerajaan Singosari.

Untuk menghindari perselisihan dengan adiknya A.A. Ketut Karang Asem menyerahkan kekuasaannya pada adiknya A.A. Gde Ngurah Karang Asem. A.A. Gde Ngurah Karang Asem kemudian membangun istana di atas bekas ibukota Singosari. Istana Baru ini diberi nama Cakranegara. Semenjak itu Cakranegara menjadi pusat pemerintahan di Pulau Lombok.

BAB I PERLAWANAN DI PULAU LOMBOK

A. PERLAWANAN KERAJAAN MATARAM

1. Latar Belakang Perlawanan.

Pada tahun 1674 untuk pertama kali bangsa Belanda masuk Lombok dengan mengutus duta besarnya bernama Franses Holstyn. Duta Holstyn bertugas melahirkan hubungan baik antara VOC dengan raja di Lombok.¹⁷⁾ Duta Holstyn harus membuat kontrak perdagangan dengan penguasa Lombok yang akan memberikan VOC monopoli perdagangan kayu sapan. Tetapi misi Holstyn ini tidak berhasil. Dalam karangan W.G.C. Byvack dikatakan bahwa VOC kembali mengirim dutanya bernama Vaandrig Alexander Lecerff ke Lombok. Ia dikirim dua kali ke Lombok dengan tugas membuat kontrak dagang dengan penguasa Lombok, I Gusti Wayan Taga¹⁸⁾ yang berasal dari Karang Asem Bali. Tetapi dua kali misi Lecerff ini pun gagal karena I Gusti Wayan Taga telah mengadakan hubungan dagang dengan Inggris yang berpangkalan di Bengkulu.¹⁸⁾

Pada abad ke-19 Lombok dan Sumbawa sudah ramai didatangi para pedagang dari Barat yang mencari hasil pertanian dan peternakan sebagai hasil ekspor yang utama. Pada tahun 1835 salah seorang agen perusahaan dagang Inggris di Singapura membuka cabang perusahaannya di Ampanan. Sudah tentu perusahaan ini menempatkan seorang agennya di Pulau Lombok untuk mengurus langsung perdagangan antara Pulau Lombok dengan Singapura. Bukan saja perusahaan dagang Inggris yang berpusat di luar Indonesia seperti di Singapura yang membuka perwakilan di Lombok, tetapi juga perusahaan-perusahaan dagang asing lainnya yang berpusat di Pulau Jawa seperti Douglas Mac Kinzie & Co,

Paine Sticker & Co dan perusahaan dagang King & Co. Di antara perusahaan dagang King & Co yang berpusat di Surabaya, menempatkan seorang agennya di Pulau Bali dan Lombok, yaitu George Peacock King yang cerdas dan sangat berani. George Peacock King membentuk dua pusat perusahaan dagang di Bali dan Lombok. Di Pulau Lombok berpusat di Ampenan dan Tanjung Karang dan dua buah di Bali berpusat di Kuta.¹⁹⁾

Kemudian George Peacock King mendirikan sebuah bengkel kapal di Labuan Treng (Lembar sekarang). Bengkel kapal ini membawa pengaruh yang sangat besar. Sebagian besar dari kapal-kapal asing yang bukan Belanda, yang sebelumnya singgah di Betawi, Semarang, atau Surabaya, tidak lagi singgah di tempat-tempat tersebut tetapi selanjutnya singgah di Selat Lombok yaitu di Ampenan dan Labuan Treng. Dengan demikian Selat Lombok menjadi jalan lalu-lintas pelayaran dan perdagangan ramai dengan candu sebagai bahan perdagangan pokok.²⁰⁾

Menurut laporan Pa Jembrong, antara 20 Mei dan 27 Desember 1835 Asisten Residen Besuki Couquerque telah mengirim seorang mata-mata ke Bali dan Lombok untuk melihat keadaan di dua pulau tersebut berhubung adanya berita tentang aktivitas pedagang-pedagang asing bukan Belanda. Pada saat itu di Pelabuhan Ampenan serentak berlabuh 18 buah kapal Eropa yakni tiga kapal Perancis dan 15 buah kapal Inggris. Di antara kapal-kapal Inggris itu ada yang memasang bendera Belanda.²¹⁾

Keadaan tersebut di atas sangat mengkhawatirkan Gubernur Jenderal Belanda yang berkedudukan di Batavia. Untuk mengatasi kekhawatiran Pemerintah Belanda di Batavia maka tahun 1843 gubernur jenderal mengirim dutanya ke Pulau Lombok untuk membuat perjanjian dengan raja-raja Lombok. Duta yang diutus gubernur jenderal ke Raja Lombok ialah Komisaris H.J. Huskus Koopman, seorang yang cakap dan dianggap telah mengetahui cara-cara bergaul dengan golongan bangsa-

wan di Indonesia. Dengan segala keuletan dan ketekunannya Komisaris H.J. Huskus Koopman berhasil membuat perjanjian dengan Raja Lombok. Perjanjian itu diadakan di Mataram pada tanggal 7 Juni 1843 antara I Gusti Anglurah Ketut Karang Asem selaku penguasa tunggal di Pulau Lombok dengan H.J. Huskus Koopman sebagai wakil gubernur jenderal. Isi perjanjian itu adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Saya I Gusti Ketut Karang Asem, Raja Mataram kini penguasa tunggal di Pulau Lombok (Selaparang) dan jajahannya yang bertindak di atas nama saya sendiri dan pengganti-pengganti saya dengan ini menyatakan bahwa pulau ini adalah milik Hindia Belanda.

Pasal 2

Dengan demikian saya, raja berjanji bahwa pulau tersebut di atas atau sebahagian dari pulau ini sama sekali tidak akan mengizinkan suatu bangsa kulit putih pun mengadakan suatu ikatan apa pun.

Pasal 3

Tiap setahun sekali Raja Selaparang dan pengganti-pengganti saya mengirim suatu keputusan ke Batavia untuk menyatakan hormat kepada P.Y.M. Gubernur Jenderal sebagai wakil dari baginda raja. Keputusan demikian untuk pertama kalinya akan dikirimkan pada tahun 1843. Keputusan-keputusan ini selama di Batavia selalu dibiayai oleh pemerintah dan menikmati juga suatu perlindungan istimewa dari padanya.

Pasal 4

Bilamana pemerintah sewaktu-waktu berpendapat patut juga mengirim seorang pejabat ke Selaparang (Lombok). Karena suatu kepentingan maka pejabat itu di sana patut juga menghormati hak yang istimewa yang sama seperti tersebut

pada pasal terdahulu yang menyangkut perutusan-perutusan Selaparang di Batavia.

Pasal 5

Komisaris Jenderal H.J. Huskus Koopman dan Raja I Gusti Ketut Karang Asem dengan menimbang bahwa perlu sekali menyudahi perbuatan yang tidak berperikemanusiaan di Selaparang (Lombok), yaitu Tawan Karang, yang menyebabkan perahu-prerahu dan kapal-kapal layar yang kandas di pantai pulau tersebut dengan muatan-muatannya yang semestinya masih merupakan milik dari pelayaran-pelayaran tersebut, masih saja tidak luput dari penganiayaan-penganiayaan yang hebat, dengan ini menyetujui untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Raja I Gusti Ketut Karang Asem harus melepaskan untuk selama-lamanya dan tanpa ditunda-tunda lagi hak beliau atas tawanan karang seperti tersebut di atas ini menurut keinginan dari pemerintah.
- b) Sebagai akibat dari pelepasan hak tawan karang ini, raja berjanji bahwa beliau mulai sekarang dan seterusnya akan memberikan segala macam bantuan dan pertolongan kepada semua penumpang perahu dan kapal layar yang karena sial benar kandas di pantai daerah yang menjadi kekuasaan, seperti halnya terjadi di semua daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda.
- c) Untuk usaha menolong barang-barang tersebut akan diberikan upah sedikit-dikitnya 15% dan sebanyak-banyaknya 50% dari harga barang-barang itu. Batas sedikit-dikitnya 15% itu hanya dapat diberikan bagi barang-barang yang tidak begitu sulit dan yang tidak berbahaya bila disimpan. Di samping itu dapat diberikan upah 50% bilamana upah barang-barang yang tenggelam diangkat kembali.

Pasal 6

Lebih lanjut raja berjanji bahwa kepada pedagang pada umumnya akan diberikan perlindungan yang amat cermat.

Pasal 7

Pemerintah Hindia Belanda dengan ini menyatakan bahwa selama raja di Selaparang (Lombok) mentaati apa yang tersebut di atas ini dengan setia, ia sama sekali tidak akan berusaha menduduki Pulau Lombok, dan juga tidak akan mencampuri pemerintahan dalam negeri, pemerintah mana sebaliknya seluruhnya diserahkan kepada raja negeri itu (Raja Lombok). Demikianlah dibuat surat perjanjian di Istana Mataram di Pulau Selaparang (Lombok) pada hari tanggal 7 Juni 1843.²²)

– Pihak Belanda:

H.J. Huskus Koopamn.

W.H. Brouwer

G.P. King

– Pihak Selaparang (Lombok) :

Raja yang sedang memerintah : Gusti Ngurah Ketut Karang Asem..

Adiknya (Putera Mahkota) : Gusti Gde Karang Asem

Para Pembesar : Gusti Gde Wanasari
Dewa Anom
Gusti Gde Rai
Gusti Nengah Paguyangan
Gusti Nyoman Tangkuban

2. Perlawanan Suku Sasak dan Raja Cakranegara²³)

Seperti dijelaskan di atas sejak tahun 1692 memerintah keluarga bangsawan dari Puri Kangingan Karang Asem Bali dengan pusat pemerintahannya Cakranegara. Di dalam wilayah kerajaan terdapat dua kelas masyarakat yaitu para penguasa yang berasal dari Pulau Bali dan mereka yang diperintah yaitu

suku bangsa Sasak. Perbedaan yang jelas antara dua lapisan masyarakat ialah dalam hal agama. Suku bangsa Bali memeluk Agama Hindu, sedangkan Suku bangsa Sasak beragama Islam. Juga perbedaan sosial-ekonomi rakyat sebagai kaula sangat melarat dan bodoh dan harus membayar pajak yang cukup tinggi. Para pemimpin masyarakat Sasak yang tidak puas menggunakan perbedaan-perbedaan tersebut untuk menentang kekuasaan raja yang berkuasa sehingga akhirnya terjadi perlawanan hebat yang dimulai 8 Agustus 1891. Sebab utama meletusnya perang ialah pada tahun 1891 Kerajaan Kelungkung berperang melawan Karang Asem.

Karang Asem pada waktu itu merupakan vazal dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram bertanggung jawab atas kalah atau menangnya Karang Asem terhadap Kelungkung. Sebab itu raja mengadakan mobilisasi umum di Pulau Lombok untuk membantu Karang Asem. Rakyat banyak atas bimbingan para pemimpin masyarakat menolak mobilisasi umum yang dikeluarkan raja. Mereka menolak karena berpendapat kedudukan dianggap budak dan harus membayar pajak tinggi. Lebih-lebih ada berita bahwa selesai perang di Bali akan diadakan pembersihan secara massal para pemimpin masyarakat dan pemuka agama dan para haji akan dibunuh. Berita itu dibawa oleh seorang punggawa bernama Ida Bagus Gama Oka di rumah Haji Abdurahman. Itulah sebab utama perlawanan tanggal 8 Agustus 1891 yang dipimpin oleh Guru Bangkol.²⁴)

Pada mulanya perlawanan ini terjadi di Praya saja yang kemudian mendapat dukungan dari desa sekitarnya. Kemudian menyebar ke seluruh Lombok. Pasukan Guru Bangkol yang memimpin perlawanan maju sampai Sukarara. Raja mendengar berita itu lalu mengirim pasukan yang dikirim dibagi dua; yang satu dikirim ke Pringgarata yang satu ke selatan untuk mempertahankan Kediri. Pasukan Guru Bangkol bertemu dan mendesak pasukan raja sampai Pakukling. Banyak sekali korban di kedua belah pihak. Setelah pasukan bantuan datang

dari Cakranegara, pasukan Guru Bangkol dapat didesak sampai Puyung. Kemudian Puyung dipergunakan oleh pasukan raja menjadi benteng pertahanan. Pemimpin perang dari pihak raja ialah A.A. Made Karang Asem, A.A. Ketut Karang Asem, I Gusti Ketut Gose, I Gusti Komang Pansong, Ida Nyoman Gelgel dan Ida Ketut Gelgel.²⁵)

Praya sebagai benteng perlawanan dapat dijangkau dengan mudah oleh tentara kerajaan yang berkedudukan di Puyung. Karena Praya diserang tiap hari maka para pemimpin menyarankan rakyat untuk mengungsi. Tetapi bagi orang yang mau mati syahid dalam perang diperbolehkan ikut perang dalam menghadapi tentara kerajaan. Para pemimpin perang di Praya mendapat siasat untuk menahan arus penyerangan musuh. Caranya sebagai berikut. "Di sekeliling masjid Praya ditanami beberapa ratus bambu pendek yang telah diberikan lubang dan ditancapi tombak yang sudah diikat satu sama lainnya. Apabila talinya ditarik maka tombak tersebut bergerak seperti digerakkan oleh orang banyak yang siap berperang".²⁶) Taktik ini mengelabui tentara kerajaan dan akibatnya tentara kerajaan tidak berani menyerang. Siasat ini membangkitkan semangat prajurit rakyat Praya dan menyebabkan timbulnya persatuan dan kesatuan sehingga menyulitkan tentara kerajaan. Karena rakyat Lombok sekarang telah bersatu melawan tentara kerajaan, maka perkampungan-perkampungan keluarga Bali di Lombok Tengah dan Lombok Timur diserang dan dihancurkan. Semula pusat pertahanan kerajaan berada di Pringgarata, Kediri dan Puyung. Untuk menghadapi ini rakyat Lombok membagi tombak penyerangan yaitu untuk Batu Kliang, Koping, Rarang dan Masbagik ditugaskan menyerang pertahanan Pringgarata. Untuk menyerang Benteng Puyung dan Kediri ditugaskan Praya dan Sakra.

Melihat keadaan ini A.A. Made Karang Asem selaku pemimpin perang menambah pusat pertahanannya lagi atas front timur yang bermarkas di Kotajaraja dan front selatan

yang dipusatkan di Mujur. Para pemimpin perlawanan mengim-
bangi pula sistem ini. Untuk menghadapi markas Kotaraja
rakyat membuat pertahanan di Masbagik dan untuk meng-
hadapi markas Mujur Rakyat membuat pertahanan di Seng-
kerang.²⁷⁾ Keadaan perang di Pulau Lombok ini dipakai oleh
Belanda untuk memajukan kepentingan kolonialismenya di
Pulau Lombok. Dan untuk memudahkan pengawasannya serta
untuk dapat mengamati kejadian-kejadian di Pulau Lombok,
maka Gubernur Jenderal mengirim kapal perang "Jawa" ke
Selat Lombok karena Raja Mataram dalam menumpas perla-
wanan rakyat Selaparang meminta bantuan dari Karang Asem
Bali dan membeli senjata dari Singapura. Pada bulan Nopem-
ber 1891 kapal Mac Alister yang memuat senapan Tromlaad,
10 senapan repeter dan 1000 patron untuk Lombok telah
dibuntuti dan dijaga sewaktu membongkar muatannya di Am-
penan. Peti-peti serta bal-bal barang yang dicurigai dibuka
sekali pun diprotes oleh pihak raja.²⁸⁾ Campur tangan Belanda
selanjutnya di Lombok ialah dengan mengirim utusan ke Lom-
bok bernama Liefrinck untuk meminta penjelasan tentang tim-
bulnya pemberontakan rakyat Lombok yang tidak diberitahu-
kan kepada gubernur jenderal dan menuntut penjelasan ten-
tang tawanan perang orang-orang Sasak yang dibuang ke
Pulau Trawangan sebanyak 400 orang.²⁹⁾

Dengan penjelasan di atas jelas nampak bahwa Pemerintah
Kolonial Belanda turut campur pada pemberontakan orang
Sasak. Padahal menurut isi perjanjian antara Gubernur Belanda
dengan Raja Mataram tanggal 7 Juni 1843 persoalan suku bang-
sa Sasak dengan raja termasuk *domestik affairs* kerajaan. Gu-
bernemen lebih jauh lagi ikut campur dalam persoalan dan
pemberontakan orang Sasak terhadap raja dengan menghalangi
usaha Raja Mataram mencarter sebuah kapal api yang berlayar
dengan bendera Inggris untuk mengangkut tentara bantuan
dari Karang Asem ke Lombok dan menahan alat-alat perang
yang dipesan kerajaan dari Singapura. Rupa-rupanya Gubernur
Jenderal mengambil langkah ini karena adanya peraturan In-

dische Stbl. No. 302 tahun 1876 yang menetapkan bahwa Raja Lombok sebagai vazal harus taat kepada Pemerintah Hindia Belanda dan dilarang mengimpor alat-alat perlengkapan perang tanpa seizin Pemerintah Hindia Belanda. Sebenarnya pihak Belanda mempunyai perhitungan politik sebagai berikut. Menghalangi Raja Mataram menumpas pemberontakan orang Sasak, sehingga dengan demikian kedudukan raja makin lemah dan selanjutnya melalui suatu intervensi, gubernemen mendapat kesempatan untuk memperkuat akar kolonialnya di Lombok. Intervensi itu berupa: Gubernemen bertindak sebagai pendamai dalam perselisihan antara raja dengan orang Sasak sesudah kedua belah pihak yang berselisih itu berjanji memberikan keuntungan politik pada gubernemen.³⁰⁾

Raja Lombok telah melihat perhitungan politik semacam itu. Tetapi raja tidak mau tahu segala larangan gubernemen, bahkan raja semakin berani dan membeli senjata dan alat-alat perang dari luar negeri (luar Indonesia). Untuk mengangkut alat perlengkapan perang tersebut raja-raja berturut-turut membeli 2 buah kapal di Singapura pada tahun 1892. Kedua buah kapal tersebut diberi nama Sri Mataram dan Sri Cakra dengan memakai bendera Kerajaan Lombok, sedangkan anak buahnya sebagian besar terdiri dari orang-orang Eropa.³¹⁾ Keberanian raja dapat pula dilihat dari tindakan meminta bantuan Inggris di Singapura untuk menghadapi gubernemen. Sudah tentu tindakan ini bertentangan dengan pasal-pasal perjanjian tanggal 7 Juni 1843. Pemerintah Belanda melihat bahwa cara satu-satunya untuk menaklukkan Raja Lombok yang sudah nekad ini ialah dengan jalan perang kolonial. Tetapi perang kolonial belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda karena menurut pendapat Kielstra terdapat empat alasan yaitu:

1. Gubernemen belum mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk meletuskan perang kolonial di Pulau Lombok karena pada saat itu perlawanan rakyat Aceh terha-

dap Belanda yang telah dimulai sejak tahun 1873. Perang ini banyak memakan energi orang Belanda sehingga apabila ada perang kolonial di bagian lain Nusantara ini berarti akan meruntuhkan sisa kekuatan orang Belanda.

2. Belanda berpegang teguh pada isi kontrak tanggal 7 Juni 1843. Tetapi alasan ini dibuat-buat sebab gubernemen telah lama melanggar isi perjanjian tersebut.
3. Alasan ketiga, Belanda banyak menghadapi perang kolonial seperti Perang Paderi (1821–1836), Perang Jawa (1825–1830), Perang Banjarmasin (1859–1863) dan Perang Aceh (1873–1904) yang telah memperlihatkan bahwa Agama Islam dengan lembaga jihad dapat dijadikan satu sumber kekuatan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Jadi jelaslah gubernemen curiga terhadap tiap gerakan masa di Pulau Lombok yang memakai Agama Islam sebagai alat untuk mempersatukan atau ikatan batin. Oleh sebab itu gubernemen cenderung mempertahankan kedudukan raja dan para bangsawan yang beragama Hindu, sebagai alat perseimbangan.
4. Gubernemen mempunyai rasa segan dan sayang terhadap Raja Lombok yang sudah tua yang menjadi bola permainan beberapa oknum yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab, terutama putera sulung raja bernama A.A. Made.³²⁾ Alasan-alasan Belanda No. 2 dan No. 4 adalah alasan yang tak masuk akal dan dicari-cari.

Karena Belanda belum mampu melaksanakan perang kolonial dengan alasan seperti di atas, maka Pemerintah Kolonial Belanda memakai jalan perundingan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk itu pada tanggal 29 Mei 1892 diadakan perundingan antara Residen Bali dan Lombok dengan raja di Lombok. Perundingan ini tidak membawa hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena Raja Lombok tetap pada pendiriannya, bahwa gubernemen tidak berhak ikut campur tangan dalam penyelesaian perlawanan orang

Sasak sesuai dengan bunyi pasal 7 perjanjian tanggal 7 Juni 1843. Pihak gubernemen dalam perundingan itu tetap menuntut keinginannya semua yaitu supaya Pemerintah Lombok menghentikan hubungan langsung dengan orang-orang Eropa lainnya di Singapura, menghentikan pencarteran atau pembelian kapal-kapal modern yang dengan sendirinya hanya dapat diperoleh dari orang-orang asing dan menghentikan pengangkutan tentara Bali dari Karang Asem ke Lombok. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda melakukan intimidasi dengan cara merampas kedua kapal milik raja yaitu Sri Mataram dan Sri Cakra.^{3 3})

Tetapi tindakan-tindakan yang terakhir dari Pemerintah Hindia Belanda ini tidak mengurangi sedikit pun keberanian dan kenekatan Raja Lombok yang tetap meneruskan usaha menumpas pemberontakan orang Sasak. Karena itu raja terus mengusahakan membeli alat-alat perang di luar negeri. Tindakan raja ini menyebabkan timbulnya pertikaian berapi dengan kesatuan angkatan laut Belanda yang bertugas menjadi perairan Selat Lombok. Pada tahun 1893 Angkatan Laut Belanda (Marinir) telah dua kali berhasil mencegah pemasukan patron tajam senapan dalam jumlah sangat besar yang telah dibeli oleh Raja Mataram.^{3 4})

Mulai bagian kedua tahun 1893, keadaan politik berubah dan makin lama makin menguntungkan gubernemen. Raja Lombok tidak dapat menumpas perlawanan orang Sasak dalam waktu singkat. Bahkan perlawanan orang Sasak itu memakan banyak waktu dan kelihatan belum adanya suatu penyelesaian. Dengan tidak dapatnya raja menyelesaikan perlawanan orang Sasak ini dengan singkat hal ini sangat memperlemah kedudukan politik Raja Lombok. Sebaliknya keadaan ini memberikan cukup waktu bagi gubernemen untuk menyusun kekuatan militer yang dapat dijadikan alat intervensi.

Dengan alasan adanya permintaan bantuan secara tertulis pemuka Sasak tanggal 20 Pebruari 1894,^{3 5}) maka gubernemen

mempergunakan persoalan orang Sasak untuk melakukan intervensi. Kebetulan pada saat itu salah seorang pemimpin Perang Aceh yaitu Tengku Umar menyerah kepada Belanda sehingga gubernemen dapat mengalihkan kemampuan tempurnya untuk sementara waktu ke Pulau Lombok. Gubernur Jenderal Van Der Wijck mengirim Residen Bali dan Lombok kepada Raja Lombok tanggal 27 Mei 1894 dengan beberapa tuntutan yaitu:

1. Suatu ucapan permintaan maaf atas sikap tidak pantas terhadap gubernemen serta petugas-petugasnya
2. Pernyataan bahwa pemerintahan raja selanjutnya dengan tepat akan menuruti perintah gubernur jenderal
3. Penyerahan dengan segera Anak Agung Made sebagai penyebab keadaan di Lombok dewasa ini
4. Penerimaan campur tangan residen dengan penyelesaian yang ruwet di Pulau Lombok ³⁶⁾

Sudah tentu tuntutan gubernemen ini tidak dapat diterima oleh pihak raja sebab memenuhi tuntutan tersebut berarti kerajaan kehilangan integritas.

2. Jalannya perlawanan

Ultimatum gubernur jenderal dijawab tertulis oleh pihak raja tanggal 11 Juni 1894 untuk menunda waktu dengan tak terbatas. Residen yang menerima jawaban dari raja menolak permintaan penundaan waktu tak terbatas itu. Maka gubernur jenderal memerintahkan ekspedisi tentara kolonial ke Lombok yang berangkat dari Surabaya tanggal 3 Juli 1894. Kekuatan ekspedisi ini terdiri dari:

1. Tiga buah kapal perang yaitu Prinsi Hendrik, Koningin Emma dan From berikut dua buah kapal lainnya yaitu Sumatera dan Bomed
2. Perwira : 107 orang
3. Prajurit : Eropah — 1320 orang

Indonesia	—	948 orang
Pembantu	—	216 orang
Mandor	—	64 orang
Pegawai sipil dan Napi	—	1718 orang
K u d a	—	386 ekor
B a g a l	—	37 ekor

4. Panglima : Mayor Jenderal J.A. Vetter
5. Wakil Panglima : Mayor Jenderal P.P.H. Van Ham

Tentara kolonial ini sampai tanggal 5 Juli 1894 pagi tiba di Pelabuhan Ampenan. Setelah berlabuh di Ampenan gubernemen melalui residen kembali menyampaikan agar ultimatum harus diterima. Pagi buta pukul 04.00 tanggal 6 Juli 1894 datang ke atas kapal tiga orang pemimpin Bali sebagai utusan raja untuk minta supaya ultimatum diperpanjang tiga hari lebih lama karena waktu 24 jam yang diberikan terlalu singkat dan raja ingin berbicara dengan residen. Permintaan ini ditolak oleh residen sebab keputusan sebenarnya gubernemen sudah siap untuk menaklukkan Kerajaan Mataram. Pada hari itu juga tentara kolonial mulai melakukan pendaratan. Jarak 400 meter dari tepi pantai pendaratan sudah mulai diatur dan baru selesai setelah pukul 15.00. Selesai pendaratan datang pula seorang utusan dari raja dengan berita bahwa pendaratan tersebut telah menimbulkan kepanikan di antara penduduk dan raja minta supaya tentara naik lagi ke kapal dan di atas kapal dapat dilanjutkan perundingan. Dijawab perundingan telah berlalu.

Ketika tanggal 8 Juli 1894 tentara kolonial di bawah pimpinan Overste Bijlevelt mengadakan penyelidikan medan bersama Wakil Panglima Mayor Jenderal Van Ham, secara tiba-tiba rombongan ini bertemu dengan Gusti Gde Jelantik di Sekarbela. Gusti Jelantik dengan 1.200 orang prajurit datang dari Puri Kangingan Karang Asem membantu Raja Cakranegara untuk menumpas pemberontakan orang Sasak. Dalam pertemuan itu Gusti Gde Jelantik meminta maaf kepada residen

atas kelalaian pemimpin-pemimpin Karang Asem menjawab pengumuman Belanda tentang ekspedisi yang diadakan dan menyanggupi menjadi perantara dalam perundingan raja dengan gubernemen.

Dengan perantaraan Gusti Gde Jelantik raja dapat menyetujui semua isi ultimatum gubernemen. Hanya permintaan gubernemen untuk menyerahkan A.A. Made tidak dikabulkan karena A.A. Made telah dibunuh. A.A. Made dibunuh dengan keris atas permintaan raja tua karena dituduh berzina dengan anak saudaranya sendiri. Perbuatan tersebut disebut "gamia". Menurut hukum adat pada zaman itu kedua pelaku harus dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut.

Untuk membuktikan bahwa A.A. Made telah dibunuh maka Mayor Jenderal Vetter mengirim Controleur Liefrinck dan dua orang punggawa dari Buleleng yang telah mengenal A.A. Made masuk ke dalam Puri. Walaupun syarat telah dipenuhi tetapi pendaratan militer tetap terlaksana terus, namun bukan sebagai pasukan penyerbu melainkan sebagai pasukan pendamai. Dan untuk mengawasi gerak kedua belah pihak yang bertentangan di Pulau Lombok, Mayor Jenderal Vetter meenempatkan sebagian pasukannya di Mataram, Karang Jangkong, di halaman luar puri Cakranegara, dan sebahagian lagi ditugaskan mengadakan perondaan di pedalaman Batu Kliang, Puya, Sakra, Kotaraja sambil memberi nasihat kepada orang-orang Sasak supaya mereka meletakkan senjata karena persoalan orang Sasak dengan pihak kerajaan akan diselesaikan oleh gubernemen dengan pejabat-pejabat kerajaan. Perundingan antara pihak raja dengan Residen Bali dan Lombok untuk menyelesaikan masalah pemberontakan rakyat Sasak tanggal 9 Agustus 1894 menghasilkan butir-butir sebagai berikut.

1. Rakyat Sasak akan membentuk pemerintahan sendiri yang otonom dan sederajat dengan Kerajaan Mataram dan keduanya di bawah pemerintahan Belanda.

2. Raja diwajibkan membayar kerugian perang sebesar f 1.000.000,— (satu juta gulden) yang harus dibayar sebelum ekspedisi meninggalkan Lombok.
3. Setiap tahun raja diwajibkan menyumbang f 250.000,— untuk biaya Pemerintah Hindia Belanda.

Perundingan ini dilakukan oleh putera mahkota yang dijuru-bicarai oleh Gusti Gde Jelantik. Perundingan ini untuk sementara memang terpaksa diterima raja karena isi perjanjian tersebut memang belum dimengerti oleh putera mahkota yang tidak bisa berbahasa Melayu. Tetapi setelah Kontrolir Ide-frinck menyalin isi perjanjian itu ke dalam Bahasa Bali barulah para pejabat kerajaan mengerti bahwa mereka telah menerima perjanjian yang tidak masuk akal sama sekali. Raja A.A. Gde Ngurah Karang Asem beserta pejabat kerajaan sudah membulatkan tekad untuk menentang gubernemen sebab beliau melihat Belanda mendarat di Lombok bukan sebagai pendamai tetapi dengan niat untuk menancapkan kuku penjajahan dan hal ini dibuktikan dengan ultimatum yang menyodorkan kontrak yang bersifat membunuh. Dan raja beserta pembesar lainnya sudah siap menghantam penjajah Belanda; hanya tinggal menunggu waktu yang baik serta menguntungkan.

Seperti dijelaskan di atas setelah tentara Belanda mendarat, pasukan dibagi dua bagian. Yang sebagian ditempatkan di Ampenan, Mataram, Karang Jangkong dan di Miru Cakranegara, sebagian lagi disuruh patroli ke Lombok Tengah dan Lombok Timur sehingga tentara kolonial ini terbagi-bagi kekuatan tempurnya. Dalam keadaan yang demikian ini A.A. Gde Ngurah Karang Asem berjuang mengusir tentara kolonial Belanda dari Pulau Lombok. Pada malam Minggu jam 23.15 tanggal 25 Agustus 1984 terdengar letusan awal yang datang-nya dari barat laut yang disusul dengan letusan lainnya yang datang dari barat daya. Selanjutnya terjadi tembakan beruntun dari segala arah bivak Belanda di dalam Pura Cakranegara.

Mereka yang sudah dikepung mendapat serangan mendadak dari tentara kerajaan dan kaula Bali dengan bersenjata keris, tombak, pedang, dan senjata revolfer buatan Inggris sehingga keesokan harinya pada tanggal 26 Agustus 1894 jumlah korban dari pihak Belanda dalam pertempuran Cakranegara meninggal 14 orang dan luka-luka 85 orang. Sisanya lari cerai-berai ke arah barat menuju pasukan induknya di Ampenan. Akan tetapi sepanjang jalan mereka yang melarikan diri ini dihujani peluru sehingga sisa tentara Belanda yang lari ini menderita kerugian sangat besar dalam perjalanannya. Turut pula dalam pasukan itu Wakil Panglima Mayor Jenderal P.P.H. Van Ham. Beliau menemui nasib naas. Sesampainya di Banjarpanda beliau ditombak oleh seorang tentara kerajaan yang bernama Jista Bidara sehingga jatuh dari kudanya dan saat itu beliau menemui ajalnya. Van Ham dikuburkan di sebelah barat Pura Karang Jangkong. Bivak Karang Jangkong juga mereka tinggalkan setelah pertarungan senjata yang dahsyat semalam suntuk. Uang sebesar dua ratus lima puluh ribu gulden cicilan pengganti biaya ekspedisi yang baru diterima tanggal 25 Agustus 1894 banyak yang tercecer. Kerugian Belanda dalam pertempuran di bivak Karang Jangkong tercatat tewas 16 orang dan luka-luka 100 orang.

Kemudian tentara patroli Belanda yang berada di Lombok Tengah segera ditarik kembali untuk membantu pertempuran di Cakranegara, Sepanjang jalan yang mereka lalui yaitu Praya, Puyung, Kediri dan Bengkel tentara ini tidak mendapat perlawanan sampai pos penjagaan di Panaraga. Tetapi sesampai tentara ini di Wanasara, Banjar Mantri, Banjar Pande dan Karang Jesi mereka mendapat serangan hebat dari pasukan raja. Pertempuran ini berlangsung satu hari penuh dan kedua belah pihak banyak yang gugur, terutama di pihak tentara Belanda.

Sekarang tentara Belanda yang berada di pedalaman Batu Kliang yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Lavick Van Pabst segera pula kembali ke Cakranegara, melalui daerah Narmada.

Pasukan inipun dibiarkan lewat oleh tentara kerajaan tetapi sesampainya di Purwa Kerta (Sweta sekarang), pasukan Belanda ini dikurung rapat oleh tentara kerajaan dan ditembaki dengan gencar melalui celah-celah tembok yang telah dilobangi dan dari atas pohon-pohon. Tentara kerajaan dipimpin oleh A.A. Bagus Karta. Dalam pertempuran ini banyak perwira Belanda yang tewas dan luka-luka bahkan ada yang hilang.

Yang meninggal	:	* Letnan Kolonel Lavick Van Pabst
		* Letnan Zeni Van Der Hag
		* Letnan Infantri Kalf
Luka ringan	:	* Letnan de Jong
		* M u s c h
		* T e m m i n g
		* 18 bawahan
Yang hilang	:	* Kapten Lidgreen
		* Perwira Kesehatan Uljaki
		* Letnan alteleri
		* Van de Dlink
		* Letnan de Graff, dan 95 bawahan.

Sisanya yang mencari pasukan induknya di Ampenan menyerahkan diri pada Raja Mataram. Tawanan ini ditempatkan di Yase Kambang (Cakra barat) dan diperlakukan dengan baik oleh pihak raja, tetapi akhirnya tawanan perang ini dibebaskan kembali. Raja menghendaki setelah pembebasan ini perang akan berakhir. Peristiwa tewasnya Jenderal Van Ham dalam perang kolonialnya di Lombok tersiar di kota-kota besar di Hindia Belanda, bahkan kejadian ini sangat menggemparkan masyarakat Belanda. Sebelumnya gubernur jenderal menganggap Kerajaan Mataram enteng dan mengira Kerajaan Mataram tidak mengerti taktik dan strategi perang modern. Lebih-lebih pada saat itu sebagian besar rakyat Lombok yang dikuasai Kerajaan Mataram sedang berontak. Belanda mengira bahwa rakyat Lombok akan membantu Belanda dalam perangnya melawan raja Mataram. Ternyata perkiraan Belanda ini

meleset semuanya. Rakyat Sasak tidak pernah membantu Belanda. Peperangan Lombok ini sungguh hebat dan di luar dugaan Belanda akibat dari perkiraan yang keliru ini pada awalnya. Belanda menderita kerugian yang sangat besar. Siapa yang memulai serangan pada malam naas itu dan siapa pemimpin tentara kerajaan yang menyerang Belanda pada malam itu tidak ada yang mengetahuinya sampai perang Lombok selesai. Walaupun kemudian ada isu bahwa yang menyerang tentara Belanda pada malam tanggal 25 Agustus 1894 itu adalah I Gusti Ktut Gosa dan Gusti Nyoman Kaer tetapi kebenarannya samar-samar. Raja Mataram sendiri tetap membungkam sampai meninggal pada tahun 1895 di Tanah Abang, Batavia. Apakah karena inisiatifnya itu I Gusti Ketut Gosaa dipersalahkan Raja Mataram lalu meninggalkan Mataram kemudian berlindung di Praya dan masuk Islam itu pun kurang jelas.

Setelah Belanda mengalami malapetaka tanggal 25 Agustus 1894, maka pada tanggal 27 Agustus 1894 Panglima Jenderal Veteer mengirim laporan serta meminta bantuan dan penyempurnaan militer kepada gubernur jenderal di Batavia. Pemerintah tersebut disetujui oleh gubernur jenderal. Karena Jenderal Vetter telah mendapat jawaban tentang akan diberikan bantuan untuk meningkatkan perang kolonialnya maka Jenderal Vetter pun meningkatkan tekanan militernya terus-menerus. Setiap hari Puri Mataram dihujani dengan meriam pantai. Pada tanggal 3 September 1894 sampailah bantuan militer kolonial Belanda di Lombok di bawah pimpinan Jenderal M. Sagov dan Kol. J.J.K. de Moulin serta diperkuat oleh tentara dari Bangkalan, Madura di bawah pimpinan Letnan Kolonel Mayang Koro.

Ekspedisi kedua ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan ekspedisi pertama. Ketika tentara kolonial ini sedang sibuk mengatur siasat penaklukannya pada tanggal 7 September 1894 tentara I Gusti Gde Jelantik yang ikut melakukan kekacauan di Lombok melalui Teluk Kombal di Pemenang

menyeberang ke Karang Asem karena tak mempertanggungjawabkan tindakannya baik kepada Raja Mataram maupun kepada Gubernemen Belanda.

Tindakan permulaan yang diambil tentara Kolonial Belanda di Lombok setelah ekspedisi kedua ini tiba ialah politik *divide et impera* yang dipraktekkan sebagai berikut. Pertama-tama dengan meminta orang Sasak untuk membantu Belanda. Beberapa pemimpin suku Sasak memang ada yang membantu Belanda, bahkan dipersenjatai dengan senapan tetapi sebagian besar penduduk tak mau membantu Belanda. Seorang pemimpin suku Sasak yang terkenal sangat besar pengaruhnya dan beliau terkenal sebagai pemimpin perang melawan Raja Mataram yaitu Guru Bangkol dari Praya, terang-terangan menolak permintaan Belanda.

Tindakan Belanda dengan mengirim korps tentara dari Bangkalan ke bagian daerah Lombok diharapkan untuk mendapat simpati suku Sasak, karena Belanda beranggapan orang Madura sama dengan orang Sasak, karena sama-sama pribumi (menurut istilah Belanda) dan sama-sama memeluk Agama Islam. Cara-cara tersebut di atas tidak banyak memberikan pengaruh dan hasil sebagaimana diharapkan oleh Belanda. Pada tanggal 6 September 1894 satu batalyon pasukan kolonial Belanda mulai menyerang daerah pertahanan Mataram di Arong-Arong, Dasan Agung dengan didahului tembakan gencar meriam dari Kapitan, Ampenan. Serangan ini dipimpin oleh Kolonel Swart.

Setelah Arong-Arong diduduki Belanda, pasukannya dibagi dua; yang satu tetap ditempatkan di Arong-Arong, yang satu bagian lagi ditempatkan di Kekalik. Maksudnya yang dari Arong-Arong untuk menghujani Puri Mataram dan yang di Kekalik untuk menembaki Pagesangan, Pagutan dan Pasinggahan dengan meriam. Tujuannya agar pasukan raja dari daerah ini tidak dapat membantu Mataram. Sasaran pertama perang ini ialah untuk menghancurkan Puri Mataram lebih dahu-

lu. Pada tanggal 13 September 1894 serangan mulai ditujukan ke Pagesangan dan Pasinggahan. Pertahanan kedua daerah ini diserahkan kepada Anak Agung Gde Putu (Cucu dari Raya Mataram). Beliau bertahan serta berperang dengan gagah berani. Dalam peperangan ini banyak tentara kerajaan yang gugur. A.A. Gde Putu juga gugur dalam perang ini. Akhirnya Pagesangan dan Pasinggahan serta Pagutan jatuh ke tangan Belanda tanggal 17 September 1894.

Setelah benteng-benteng kerajaan tersebut di atas jatuh maka Belanda mengalihkan serangannya ke kota Mataram. Untuk menyerang Puri Mataram, Belanda mempergunakan tiga setengah batalion di bawah pimpinan Jenderal Sagov sedangkan untuk serangan umum di bawah pimpinan Jenderal Vetter. Pada tanggal 29 September 1894 tentara Belanda menyerang kota Mataram. Puri Mataram dipertahankan oleh Putera Mahkota A.A. Ketut Karang Asem dengan dibantu Panglima Perang I, Gusti Ketut Gose. Setiap jengkal puri dipertahankan dengan gigih. Tetapi karena kekalahan taktik, dan walaupun tentara Mataram bertempur dengan gagah berani, akhirnya Puri Mataram jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 29 September 1894. Dalam perang ini Putera Mahkota A.A. Ketut Karang Asem gugur sebagai kusuma bangsa.

Dengan jatuhnya benteng pertahanan raja seperti Pagesangan, Pasinggahan, Pagutan, Arong-Arong dan Mataram maka tidak ada benteng pertahanan lagi yang dapat menghadapi serangan Belanda selanjutnya. Pada tanggal 18 Oktober 1894 Belanda mulai menyerang Puri Cakranegara. Cakranegara merupakan pusat pertahanan yang tangguh dan kuat. Setiap hari Cakranegara ditembaki dengan meriam sebelum dilakukan penyerangan langsung dengan pasukan. Untuk menaklukkan Cakranegara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertahanan raja, Belanda mempergunakan:

1. 6 Batalion pasukan.
2. 60 Devisi pendaratan

3. 1 Detasemen Kavaleri
4. 2 Seksi Alteleri lapangan
5. 2 Seksi Alteleri Gunung
6. 2 Seksi Mortir
7. 3 Seksi Pasukan Zeni.

Pasukan ini terbagi menjadi empat bagian.

1. Barisan pertama dipimpin oleh Mayor Jenderal Sagov yang ditugaskan menyerang mulai Taman Raja (Majeluk) yang disebut sayap kiri. Dari Taman Raja terus maju ke Rigrigan dan kemudian langsung ke Cakranegara.
2. Barisan kedua di bawah pimpinan Kolonel Swart yang ditugaskan dari Pajang terus ke Banjar Pande dan langsung ke Puri Cakranegara. Barisan ini disebut barisan tengah.
3. Barisan ketiga di bawah pimpinan Letnan Kolonel Scener ditugaskan menyerang dari Kekalik menuju Pagesangan Timur terus ke Gebang dan dari sana menuju ke Cakranegara. Barisan ini disebut barisan kanan.
4. Barisan keempat di bawah pemimpin Mayor Willems, ditugaskan sebagai pasukan cadangan.

Pasukan kolonial Belanda yang dijelaskan di atas telah diterangkan jumlahnya, peralatan perang serta disiplin dan semangatnya sejak tentara bantuan di bawah Jenderal Sagov datang tanggal 3 September 1894 sebelum mulai serangan umum. Hal ini dilakukan Jenderal Vetter supaya jangan terulang lagi malapetaka seperti tanggal 25 Agustus 1894.

Kemudian setelah semua persiapan itu dikerjakan dengan cermat, serta situasi dianggap matang, maka pada tanggal 18 Nopember 1894 mulai dilakukan penyerangan Puri Cakranegara. Pertempuran berlangsung luar biasa hebatnya. Sejak jam 5.30 pagi pertempuran berlangsung sampai sore hari. Cakranegara bertahan dengan gagah berani. Tentara kolonial Belanda dengan perlengkapan perang modern dan jumlah tentara yang banyak, yang menyerang Cakranegara terus-

menerus dengan meriam sejak 18 Nopember 1894 belum dapat menaklukkan Puri Cakranegara bahkan dipukul mundur. Padahal tentara kerajaan bersenjata sederhana seperti keris, pedang, tombak, dan reperter. Raja A.A. Gde Ngurah Karang Asem yang sudah sangat lanjut usianya memimpin langsung pertempuran melawan tentara kolonial Belanda. Dunia membuktikan betapa hebatnya A.A. Gde Ngurah Karang Asem mempertahankan bumi pertiwi hanya dengan senjata sederhana. Dengan membangkitkan semangat kepahlawanan rakyatnya, raja berusaha menghadapi serangan Belanda. Padahal penyerangan tanggal 18 Nopember 1894 dilakukan dengan segala daya dan upaya, dengan menembakkan tidak kurang dari 1.100 peluru meriam, tetapi Belanda juga mampu menaklukkan Puri Cakranegara. Kembali tanggal 19 Nopember 1894 Belanda melakukan serangan hebat ke Cakranegara. Oleh karena musuh terlalu kuat, maka pada hari itu kota Cakranegara pun jatuh. Raja beserta keluarganya serta para pejabat kerajaan memindahkan pusat pertahanannya ke Saksari. Tanggal 20 Nopember 1894 Puri Saksari dikepung dan diserang pula dari segala penjuru oleh tentara kolonial Belanda di bawah pimpinan Jenderal Sagov. Akhirnya raja beserta beberapa keluarganya menyerah pada Jenderal Sagov pada tanggal 20 Nopember 1894 di Saksari. Kemudian raja serta beberapa keluarganya dibawa ke Ampenan ditentukan nasibnya oleh pihak penjajah.

Beberapa keluarga raja yang menentukan masih bertahan di Saksari dan tetap siap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Karena Belanda masih melihat bahaya dan secara keseluruhan masih belum menaklukkan kerajaan secara tuntas, maka Jenderal Vetter selaku pemimpin perang tanggal 21 Nopember 1894 memaksakan pada Raja A.A. Gde Ngurah menulis surat kepada keluarganya yang masih melawan di Saksari supaya menyerah kepada Belanda di Ampenan. Surat tersebut tak diindahkan oleh A.A. Nengah Karang (putra dari kakak raja tua) selaku pemimpin perang melawan Belanda.

Puri A.A. Nengah Karang Asem berada di Tohpati. Oleh karena itu tanggal 22 Nopember 1984 kembali tentara Belanda di bawah pimpinan Kolonel Swart menyerang dengan tembakan bertubi-tubi. Puri tempat tinggal keluarga raja terbakar. Dengan tidak terduga oleh Belanda semua keluarga yang heroik ini dengan pakaian kebesaran kerajaan yang berwarna putih dengan hiasan keemasan dan dengan bersenjatakan keris, langsung bertempur dengan tentara Belanda yang bersenjatakan modern. Perang habis-habisan tanpa ada sisa yang hidup yang demikian disebut perang puputan. Semboyan dari para pahlawan puputan ini lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidup di bawah kaki penjajah Belanda. Adapun keluarga raja yang melakukan puputan di Gerobogan Saksari ini adalah:

1. A.A. KETUT JELANTIK (Putera dari A.A. Made)
2. A.A. AYU MADE (Puteri dari A.A. Made)
3. A.A. GDE JELANTIK (Putera dari A.A. Gde Putu yang tewas di Pagesangan, umurnya 5 tahun)
4. Semua puteri dari raja:
 - a. A.A. AYU MADE
 - b. A.A. AYU NENGAH
 - c. A.A. AYU KARANG
 - d. A.A. AYU PRABA
5. Cucu dari raja:
 - a. A.A. AYU PUTU
 - b. A.A. AYU MAS
6. 12 orang laki-laki dan 50 perempuan dari bangsawan golongan tinggi.

Setelah puputan ini perlawanan masih dilanjutkan tanggal 25 Nopember 1894. Putera raja berumur 8 tahun bernama A.A. Ktut Oka dan Ibunya bernama Dende Patimah diserahkan sebagai tawanan oleh orang Sukaraja. Pada tanggal 26 Nopember 1894, Jenderal Sagov dengan anak buahnya menyerang A.A. Nengah Karang di Tohpati. A.A. Nengah Karang beserta

keluarganya serta pengikutnya yang setia brtempur sampai titik darah yang penghabisan. Semuanya gugur sebagai kusuma bangsa.

Raja A.A. Gde Ngurah Karang Asem beserta seluruh keluarganya serta pengikutnya yang setia tanggal 23 Nopember 1894 diangkut oleh pemerintah kolonial Belanda ke Batavia sebagai tawanan perang dan ditempatkan di Tanah Abang.

Perlawanan terakhir perang Lombok pada tanggal 29 Nopember 1894 dengan ditangkapnya A.A. Gde Rai (putera dari A.A. Ketut yang meninggal dalam perang di Puri Mataram) dengan isterinya Ni Dami dan ibunya bernama Joro Mimbar beserta dua orang punggawa. Selanjutnya A.A. Gde Rai, Ni Dami, Joro Mimbar, dua punggawa, Ketut Oka dan Denda Fatimah diangkut pula ke Batavia sebagai tawanan perang untuk bergabung dengan raja tua yang telah berada lebih dahulu di Batavia. Sebagai ilustrasi betapa besar kerugian Belanda dalam perang kolonialnya di Cakranegara dapat dilihat sebagai berikut:

Tewas :	Tentara Eropah	:	96 orang
	Perwira	:	15 orang
	Tentara Pribumi	:	30 orang
	Tentara Ambon	:	34 orang
			175 orang
Luka :	Perwira	:	30 orang
	Tentara Eropa	:	238 orang
	Tentara Pribumi	:	235 orang

Selanjutnya yang meninggal dari yang luka ialah: 5 perwira, 20 Eropah dan 19 pribumi; jumlahnya; 44 orang. Yang meninggal kemudian karena sakit: 175 orang Eropah, 33 Ambon dan 38 pribumi, jumlahnya: 246 orang. Sehingga jumlah yang meninggal $175 + 44 + 246$ orang = 465 orang. Akhirnya raja tua yang dibuang ke Batavia meninggal tanggal 20 Mei 1895. Beliau dimakamkan di Pemakaman Karet Batavia pada tanggal 21 Mei 1895.

Demikianlah Raja Lombok bertempur dengan gagah berani melawan Belanda, tetapi karena kalah persenjataan beliau dapat dikalahkan. Terakhir perlawanan dari keluarga kerajaan berlangsung tanggal 29 Nopember 1894 sehingga sejak tanggal tersebut pulau Lombok mulai dijajah secara langsung oleh pemerintah kolonial Belanda.

3. Akibat Perang Mataram

Akibat perang dengan Belanda, Kerajaan Mataram dihancurkan. Raja Mataram bersama beberapa anggota keluarganya dan pengikutnya yang setia ditangkap dan dibuang ke Tanah Abang, Batavia. Beberapa di antaranya gugur di dalam pu-putan. Kedua pusat kerajaan, Mataram dan Cakranegara, diratakan dengan tanah. Seluruh kekayaan kerajaan dirampas. Sebagian diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda dan sisanya dibagi-bagi kepada para prajurit yang memenangkan perang. Tanah kerajaan disita, dibagi dan dijual kepada warga masyarakat yang memerlukannya. Pemerintahan baru segera dibentuk. Untuk menyusun pemerintahan yang baru, Panglima Vetter dibantu oleh G.A. Scheren, Direktur Urusan Dalam Negeri, menyelenggarakan rapat di Mataram yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin suku bangsa Sasak. Segala saran dan usul dari mereka dipadu dengan rencana Vetter kemudian diusulkan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang baru di Lombok kepada Gubernur Jenderal di Batavia.

Bentuk pemerintahan yang baru diusulkan itu merupakan penyempurnaan bentuk pemerintahan yang ada sebelumnya. Sejak Kerajaan Mataram masih ada pada tahun 1882 secara yuridis formal Belanda telah membentuk Keresidenan Bali dan Lombok. Pembentukannya didasarkan kepada *Indische Staatsblaad* Nomor 23 tahun 1882. Bentuk pemerintahan yang baru diusulkan oleh Vetter tersebut diterima oleh Gubernur Jenderal dengan beberapa perubahan yang kurang berarti. Persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu dituangkan dalam suatu keputusan Stb. No. 181/1895 tanggal 31 Agustus

1895. Sejak itu Pulau Lombok ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda (*onder rechtsreeks bestuur*).

Kemudian berdasarkan Stb. No. 183/1895 tanggal 31 Agustus 1895 Lombok dijadikan suatu afdeling dari Keresidenan Bali dan Lombok dengan ibukota Ampenan. Afdeling Lombok dibagi menjadi dua onder afdeling. Onder afdeling Lombok Timur dengan ibukota Sisik dan onder afdeling Lombok Barat dengan ibukota Mataram. Pimpinan pemerintahan afdeling dipegang oleh seorang Assisten Residen yang dijabat oleh orang Belanda. Demikian pula pimpinan pemerintahan pada setiap onder afdeling dijabat oleh seorang kontroleur Belanda. Tiap-tiap onder afdeling dibagi atas beberapa kedis-trikan, masing-masing diperintah oleh seorang kepala distrik yang dijabat oleh orang bumiputera. Kepala distrik dipilih oleh Belanda dari seorang bangsawan terkemuka dalam kedis-trikan yang bersangkutan. Di samping kepala distrik sebagai kepala adat pemerintahan juga sebagai kepala adat di wilayahnya. Hal yang demikian sesuai dengan status sosialnya di dalam masyarakat.

Sesuai dengan politik *de vide et impera* dalam susunan pemerintahan, di Lombok terdapat tiga variasi yang berlaku di kalangan suku bangsa Sasak yang berlaku di kalangan suku bangsa Bali dan yang berlaku di kalangan suku bangsa selain suku bangsa Sasak dan suku bangsa Bali. Pembagian kekuasaan tidak didasarkan pada geografi, tetapi pada geneologi (kelompok keturunan). Suku bangsa Bali diperintah oleh seorang patih dari seorang suku bangsa Bali yang didatangkan dari Buleleng bernama I Gusti Putu Gria. Di bawah kekuasaannya terdapat 12 kedis-trikan kecil-kecil. Di antaranya Kedis-trikan Cakranegara Utara, Kedis-trikan Cakranegara Timur Laut, Kedis-trikan Cakranegara Timur, Kedis-trikan Cakranegara Tenggara, Kedis-trikan Cakranegara Selatan, Kedis-trikan Cakranegara Barat Daya, Kedis-trikan Cakranegara Barat, Kedis-trikan

Cakranegara Barat Laut, Kedistrikan Pagutan, Kedistrikan PAGESANGAN, Kedistrikan Mataram, Kedistrikan Pemenang. Tiap-tiap kedistrikan dibagi atas beberapa keperbekelan atau desa.

Secara geografis wilayah Bali adalah suatu wilayah yang batas-batasnya di sebelah utara adalah Kali Meninting, di sebelah selatan adalah Kali Babak, di sebelah barat adalah Kedistrikan Ampenan dan Selat Lombok, di sebelah timur adalah Kedistrikan Narmada. Wilayah suku bangsa Sasak meliputi onder afdeling Lombok Timur yang terbagi atas Kedistrikan Pringgabaya, Kedistrikan Masbagik, Kedistrikan Rarang, Kedistrikan Kopang, Kedistrikan Sakra, Kedistrikan Praya dan Kedistrikan Batukeliang dan sebagian onder afdeling Lombok Barat yang terdiri dari Kedistrikan Ampenan, Kedistrikan Gerung, Kedistrikan Tanjung dan Kedistrikan Bayan. Tiap-tiap kedistrikan dibagi pula atas beberapa desa yang dipimpin oleh Kepala Distrik dan ditetapkan oleh *Kontrolleur*. Kepala Desa pada umumnya dipilih berdasarkan keturunan.

Suku bangsa lain membentuk pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala setingkat dengan kepala desa. Tetapi kepala-kepala suku bangsa minoritas tersebut tidak tunduk kepada kepala distrik di wilayah tempat mereka tinggal tetapi langsung kepada *kontrolleur*. Azasnya adalah kepala berdasarkan geneologi sehingga di mana saja seorang suku bangsa Jawa berada di Lombok Barat ia adalah kaula dari kepala suku bangsa Jawa yang ada di Mataram. Demikian pula seorang suku bangsa Sasak yang tinggal di wilayah Kedistrikan Bali tetap kaula dari kepala distrik kedistrikan asalnya atau Kedistrikan Sasak yang terdekat. Bangsa asing juga mempunyai kepala tersendiri pula.

Mengenai hak dan kewajiban dari tiap-tiap suku bangsa itu dibeda-bedakan pula. Sehingga tampak perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Ada yang dikenakan kewajiban kerja rodi, ada pula yang tidak. Di kalangan suku bangsa Sasak, semua golongan kaula (orang kebanyakan) yang tidak memegang

jabatan perabot desa (kepala desa, jaksa, keliang, juru arah, langlang, kiyai, penghulu, khatib dan modin, merebot dan bilal) dikenakan kerja rodi. Di kalangan suku bangsa Sasak terdapat stratifikasi sosial menak dan kaula. Orang-orang menak bebas dari kewajiban kerja rodi tetapi wajib membayar pajak penghasilan dan pajak jalan. Orang-orang menak mempunyai hak prioritas bagi jabatan-jabatan desa. Perbedaan-perbedaan yang demikian memang sengaja diadakan dengan maksud untuk selalu mempertajam sentimen antar golongan.

Hal-hal yang positif yang bermanfaat langsung bagi rakyat juga banyak berubah. Belanda segera membangun jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan desa terutama sekali yang menghubungkan pelabuhan dengan pusat pemerintahan. Pertanian yang terbengkelai selama perang diaktifkan kembali dengan membangun jaringan irigasi yang baru. Di bidang kesehatan segera diadakan poliklinik di beberapa ibukota kewedistrian dan klinik di Mataram dan Sisik. Demikian juga di bidang keamanan diadakan wajib lapor bagi seseorang yang memasuki desa lain. Gedung-gedung pemerintahan juga segera diadakan untuk memudahkan pelayanan secara cepat dan tepat. Namun sistem birokrasi sangat keras. Pada azasnya sedapat mungkin setiap masalah diselesaikan di tingkat desa atau tingkat kewedistrian. Dalam hal ini kepala desa dan kepala distrik sangat besar peranannya. Dalam pandangan masyarakat awam kedua tokoh di atas dianggap sebagai raja. Karena pada umumnya mereka adalah orang-orang yang sangat patuh dan taat kepada Pemerintah Belanda maka kedudukan Pemerintah Belanda menjadi sangat mantap.

Di bidang agraria selain memperkuat pola kebijaksanaan yang lama juga mengadakan beberapa perubahan yang prinsip. Antara Lombok Timur dan Lombok Tengah dibuatkan garis pemisah yang tegas dengan Lombok Barat. Garis itu adalah Sungai Pandan sebagai batas alam. Secara genealogi wilayah di sebelah timur Sungai Pandan adalah wilayah Sasak dan yang

di sebelah barat Sungai Pandan adalah wilayah Bali. Selanjutnya ditetapkannya pula bahwa di wilayah sebelah barat Sungai Pandan sawah yang pada zaman Kerajaan Mataram adalah milik raja dibagi-bagikan kepada rakyat dengan status tetap sebagai milik negara (Pemerintah Belanda). Tanah yang demikian tidak boleh dijual, digadai atau dibagi oleh pemegang. Yang boleh dijual, digadai dan dibagi oleh pemiliknya hanyalah tanah asalnya dahulu padazaman kerajaan memang hasil cetakannya sendiri yang telah diberikan kepadanya atau pada ahli warisnya sebagai miliknya.

Sawah-sawah kerajaan yang berasal dari tanah rampasan karena pemiliknya tidak punya keturunan laki-laki (bahasa Sasak: putung) yang disebut tanah pengancil oleh Pemerintah Belanda dijadikannya sebagai tanah pecatu (Bahasa Jawa: tanah bengkok) bagi kepala desa, keliang (kepala kampung) dan pekasih (pejabat desa yang mengurus pengairan). Tanah-tanah yang pada zaman kerajaan berstatus tanah wakaf bagi pemeliharaan mesjid atau pura tetap menjadi tanah wakaf. Kedua jenis tanah pecatu dan tanah wakaf bebas dari *landrente* (pajak hasil bumi). Di samping itu ada pula tanah-tanah milik yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga menjadi semak-semak kembali. Tanah yang demikian oleh Pemerintah Belanda dibagi-bagikan kepada rakyat seperti di Jenggala, Peninjauan, Padamara, Murbaya, Kembang Kerang dan Pancer tetapi statusnya adalah sebagai tanah pemerintah.

Agar antara suku bangsa Sasak dengan suku bangsa Bali tidak desak mendesak diadakan juga peraturan yang menetapkan:

1. Di sebelah barat Sungai Pandan orang Bali dilarang menjual, menggadaikan atau memberikan tanahnya kepada orang Sasak, tetapi orang Sasak boleh menjual tanahnya kepada orang Bali.
2. Di sebelah timur Sungai Pandan dan di sebelah selatan Sungai Pandan (Lombok Tengah) orang Sasak tidak boleh

menjual, menggadaikan atau memberi tanah kepada orang Bali, tetapi orang Bali boleh menjual, menggadaikan atau memberikan tanahnya kepada orang Sasak.

Peraturan ini berlaku sampai tahun 1935.

B. PEMBERONTAKAN DESA SESELA

1. Latar belakang perlawanan

Pulau Lombok yang telah rusak akibat perang yang melandanya selama tiga tahun memerlukan biaya yang banyak untuk membangun prasarana pengairan dan perhubungan. Belum lagi untuk menanggulangi keperluan makanan yang pada tahun 1895 bagi Belanda saja diperlukan biaya sebesar f 100.000,—. Akibatnya mulai tahun 1896 pemungutan pajak diintensifikan. Rakyat Sesela, suatu kelompok masyarakat kecil yang tinggal di Kampung Sesela, Kedistrikan Ampenan, Afdeling Lombok Barat menganggap ketentuan pajak baru tersebut kurang adil dan kurang bijaksana. Dari kota Ampenan Kampung Sesela terletak kurang lebih 4 Km di sebelah timur laut. Kalau dari Mataram letaknya kurang lebih 2 km di sebelah utara.

Penduduk Kampung Sesela ketika itu tidak lebih dari seratus orang. Mereka termasuk rakyat yang taat beragama Islam dan senang kepada ilmu kejayaan dan ilmu silat. Di bawah pimpinan Amaq Nurisah dengan terang-terangan rakyat Sesela menyatakan penolakan atas kebijaksanaan pajak yang baru. Masalah pemilikan yang masih belum teratur juga merupakan awal kekecewaan rakyat kepada Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda sendiri yang telah memahami latar belakang keresahan rakyat mencoba mendekati rakyat dengan dialog langsung. Kedua orang kontrolir masing-masing kontrolir agraria dan kontrolir BB (van der Hout) datang ke Desa Sesela didampingi oleh beberapa orang pejabat.

2. Jalannya Perlawanan

Kedatangan kedua pejabat tersebut diterima oleh rakyat

sebagai musuh. Mereka diserbu dan Kontrolir van der Hout dibunuh. Assisten residen yang menerima laporan ini segera memberitahukan dan memerintahkan komandan militer di Ampenan supaya menumpas Pemberontakan Sesela. Karena jarak antara Ampenan dan Sesela yang tidak lebih dari 4 km maka dalam beberapa jam saja Desa Sesela telah dikepung prajurit Belanda. Dalam pertempuran yang berlangsung hanya beberapa jam itu perlawanan rakyat dapat dilumpuhkan Amaq Nurisah sendiri beserta beberapa orang pengikutnya tewas dalam pertempuran. Selebihnya ditangkap dan ditawan.

Walaupun pemberontakan itu telah dapat dipadamkan dalam waktu yang singkat tetapi telah memberi petunjuk kepada Belanda bahwa orang-orang Sasak yang beragama Islam terlalu mudah dihasut dengan mempergunakan agama sebagai dasar motivasi perjuangan. Karena itu Pemerintah Belanda semakin berhati-hati dan waspada terhadap bahaya Agama Islam itu sendiri. Sedangkan tindakannya yang tegas dan cepat dalam penumpasan diharapkan akan dapat membuat jera atau sekurang-kurangnya akan selalu diingat oleh seluruh rakyat sebagai suatu pelajaran yang pahit yang perlu dihindari. Bagi Belanda sendiri sejak itu penyelesaian suatu masalah selalu menggunakan pemuka suku sebagai alat. Sistem birokrasi ditingkatkan dan ditekankan agar semua masalah dapat diselesaikan sampai di tingkat kedistrikian.

C. PEMBERONTAKAN MAMELAQ

1. Latar Belakang Pemberontakan

Memelaq adalah nama suatu tempat yang terletak di sebelah utara kota Praya, ibu kota Kabupaten Lombok Tengah. Tempat itu pernah dijadikan pusat pertahanan perlawanan Banjar Getas sewaktu memberontak terhadap Kerajaan Pejangik pada tahun 1691. Kemudian tempat itu pula yang dijadikan pusat perlawanan oleh Lalu Talip sewaktu berontak terhadap Belanda pada tahun 1898. Pemerintah Belanda telah menguasai langsung Pulau Lombok pada tahun 1895.

Pada akhirnya kekuasaan Mataram urusan pemerintahan dipegang oleh putera Anak Agung Ketut Karang Asem yang dibantu oleh kakaknya, Anak Agung Made Karang Asem. Dalam praktek kekuasaan sepenuhnya ditangan A.A. Made Karang Asem. Beliau memerintah rakyat Sasak yang beragama Islam dengan kejam dan sangat tamak. Pajak dinaikkan semena-mena sehingga melunturkan simpati rakyat kepadanya. Keluar beliau sangat bermusuhan dengan Belanda sehingga Belanda selalu berdaya upaya untuk menyingkirkan anak raja yang tidak disukainya ini. Kebetulan juga rakyat Sasak sangat membenci anak raja ini sehingga menimbulkan Pemberontakan Praya pada tahun 1891.

Pemberontakan Praya dipimpin oleh Lalu Ismail alias Guru Bangkol. Pada pertempuran hari pertama pasukan Praya dapat dihancurkan oleh pasukan Kerajaan Mataram. Namun Lalu Ismail dapat selamat dan bertahan di dalam Mesjid Praya. Beliau bertahan bersama enam orang pembantunya antara lain Mamiq Sopian, Lalu Talip, Haji Dollah dan Haji Ali. Walaupun tentara Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh A.A. Made dan A.A. Ketut Karang Asem mengepung dan menyerang mereka setiap hari tetapi karena ketangguhannya dapat bertahan selama tiga tahun sampai akhirnya hampir seluruh rakyat Sasak di Lombok Tengah dan Lombok Timur berbalik melawan Mataram.

Seperti dibentangkan dalam Bab I, Belanda mencampuri Perang Sasak ini pada bulan Juni 1894. Karena merasa diri ikut berjasa dalam usaha menghancurkan Kerajaan Mataram maka Lalu Tarip, Haji Ali dan Haji Dollah sangat kecewa ketika nasibnya kurang diperhatikan oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda juga menyadarinya tetapi untuk memuaskan semua pihak juga sulit sekali karena formasi kepala distrik hanya seorang. Seperti diutarakan dalam Bab I, sejak kehancuran Kerajaan Mataram pada tahun 1895. Belanda menempatkan Pulau Lombok di bawah langsung dari kekuasaan Belanda (*onder rechtstreeks beestuur*) berdasarkan *Staat Blaad*

no. 181/1895 tanggal 31 Agustus 1895. Kemudian berdasarkan Stb. No. 183/1895 tanggal 31 Agustus 1895 Pulau Lombok ditetapkan sebagai suatu afdeling dengan ibukota Ampenan. Afdeling Lombok dibagi atas dua *onder afdeling*. *Oost Lombok* dengan ibukota Sisik yang membawahi Kedistrikan Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra Praya dan Batu Kliang. *Onder afdeling west Lombok* dengan ibukota Mataram yang dibagi atas wilayah Bali dan wilayah Sasak. Jabatan-jabatan pemerintahan terbatas sehingga banyak pemuka suku bangsa Sasak yang tidak mendapat tempat sesuai dengan jasa dan martabatnya.

Lalu Talip seorang pahlawan Sasak yang ikut serta menghancurkan Kerajaan Mataram sakit hati karena merasa diremehkan. Kekecewaannya itu meledak dalam kemarahan yang tiada terbendung lagi ketika pada sidang para kepala distrik ia tidak diizinkan oleh kontrolir duduk di kursi. Beliau disuruh duduk di bawah. Tindakan kontrolir yang demikian itu dianggapnya suatu penghinaan yang tiada tara atas dirinya.

2. Jalannya Perlawanan

Menerima perlakuan yang sangat buruk demikian itu darahnya mendidih dan memandang Pemerintah Belanda tidak beradab dan langsung meninggalkan ruang sidang sambil menepuk pantatnya. Dalam hatinya tak sedikit pun ia merasa hormat kepada kontrolir yang dinilainya sebagai manusia yang tidak berbudi. Beliau sudah bertekad hendak mengangkat senjata walau apapun yang terjadi. Kontrolir pun sangat terkejut melihat sikap Lalu Talip yang demikian. Merasa martabat dirinya dijatuhkan di depan kepala distrik dia pun segera memerintahkan prajurit berkuda menangkapnya. Tetapi karena tangkasnya Lalu Talip tidak terkejar dan para prajurit kehilangan jejak di antara hutan dan semak-semak yang rimbun.

Sesampai di hutan Mamelaq, Lalu Talip segera mengumpulkan teman-teman seperjuangannya dan pengikut-pengikut-

nya yang setia. Kepada mereka diuraikan sedetil-detilnya mengenai peristiwa penghinaan yang dialaminya, dan karenanya telah bertekad untuk melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Kedua temannya Haji Ali dan Haji Dollah membenarkan pendiriannya dan menyatakan kesetiakawanan yang didasarkan kepada ridhlo Allah untuk menjalankan perang fisabilillah. Pengikutnya yang hanya semula hanya beberapa orang saja semakin hari semakin bertambah dari desa-desa sekelilingnya. Rakyat Sasak di Lombok Tengah mudah sekali terpengaruh dan ikut memberontak. Perang bagi mereka adalah kegemaran. Hal yang demikian menyulitkan penumpasan. Apalagi sebagian dari pemimpin pemberontakan mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemuka masyarakat.

Satu peleton tentara Belanda datang menyerang Mmelaq suatu kampung yang diperkuat dengan rumpun bambu yang tumbuh padat sekelilingnya dengan mudah dapat dihalau kembali. Meskipun mereka yang bertahan hanya menggunakan persenjataan yang serba tradisional seperti pedang, keris dan tombak, tetapi setiap kali tentara Belanda datang selalu dapat dihalau kembali dengan menimbulkan korban prajurit yang tewas dan luka-luka. Di antara yang tewas adalah Letnan Nunnink. Beberapa bulan sebelum Pemberontakan Gandor meletus serangan terhadap Mamelaq dihentikan. Penghentian itu bukan karena Belanda lemah, tetapi kontrolir berpendapat bahwa untuk menundukkan Lalu Talip sebaiknya diusahakan jalan damai. Tetapi sebelum usaha damai dijalankan timbul Pemberontakan Gandor yang tidak disangka-sangka sejak semula. Dan meskipun pada waktu Pemberontakan Gandor Lalu Talip mengirimkan bantuan pasukan sejumlah sepuluh orang dan kemudian melindungi Namiq Mustiasih, pemimpin Pemberontakan Gandor namun keinginan Belanda untuk berdamai dengan Lalu Talip tetap terpelihara.

Sementara itu Mamelaq kekurangan makanan. Maka untuk mencukupi kebutuhannya, mereka merampok desa tetangga antara lain Desa Bujak dan Desa Mantang. Meskipun

hal itu dilakukan karena terpaksa tetapi menyebabkan Mamelaq semakin terencil. Keadaan yang demikian itu memberi pengaruh buruk terhadap beberapa pengikut dan pendukung Lalu Talip. Ada yang putus asa dan ada pula yang ingin menghabiskan hidupnya di dalam pertempuran. Seorang-orang pemimpin pasukan Lalu Talip yang berpengaruh, berkebangsaan Arab tanpa sebab yang nyata membunuh dirinya dengan senapan. Demikian juga Mamiq Badil bersama lima belas orang anak buahnya. Sewaktu datang serangan Belanda beliau hadapi dengan gagah berani hingga gugur di medan pertempuran yang terbuka. Suatu perlawanan yang nekad yang sebelumnya taktik yang demikian selalu dihindari. Karena memang kekuatan persenjataan antara kedua yang bertarung tidak seimbang.

Sejak gugurnya Mamiq Badil di medan pertempuran Lendang Marang serangan Belanda dihentikan sama sekali karena Kontrolir England Berg bermaksud hendak melaksanakan misi perdamaannya. Tanpa senjata dan tanpa dikawal prajurit kontrolir memasuki Desa Mamelaq dan meminta berdialog langsung dengan Lalu Talip, Haji Dollah dan Haji Ali. Kedatangan kontrolir di Mamelaq disambut baik oleh Lalu Talip dan beliau menerima undangan kontrolir datang ke kota Praya pada keesokan harinya. Perundingan di Praya menghasilkan perdamaian yang isinya:

- a. Asalkan Lalu Talip meletakkan senjata beliau akan dibebaskan dari segala tuntutan
- b. Lalu Talip, Haji Ali dan Haji Dollah harus pulang ke rumah di kota Praya

Tetapi sebelum Lalu Talip dapat melaksanakan isi perjanjian di atas beliau meninggal karena racun. Diduga beliau diracun oleh kaki tangan Belanda.

D. PEMBERONTAKAN GANDOR

1. Latar Belakang Pemberontakan

Sejak Pemerintah Belanda menguasai Lombok secara lang-

sung usahanya yang pertama-tama ialah mengatur pemerintahan dan mengembangkan ekonomi rakyat yang mampu memenuhi tujuan pemerintah untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya melalui pajak bumi, impor dan ekspor. Maka untuk mencapai maksudnya itu Belanda membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran transportasi dan komunikasi antara desa dan antar kedistrikan. Disiplin dan keamanan ditegakkannya melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh asisten residen.

Penerapan peraturan yang baru ini tidak selancar yang diharapkan. Maka bagi mereka yang tidak disiplin dan suka membangkang dibangun penjara sebagai tempat tinggalnya. Sesuai dengan prinsip *de vide et impera* yang diterapkannya maka sistem feodal pun ditegakannya pula dan ditunjang oleh sistem pemerintahan yang birokratis. Pejabat pamong desa dan kepala distrik ditetapkan berdasarkan keturunan. Golongan bangsawan beserta keluarga pamong mendapat hak prioritas untuk menduduki jabatan pamong desa dan bebas dari rodi. Sehingga jurang pemisah antara kelas sangat dalam dan lebar yang sangat sulit dipertautkan. Situasi masyarakat yang demikian oleh Pemerintah Belanda dipelihara dan dibina sebaik-baiknya. Tetapi sebenarnya Pemerintah Belanda bukanlah penciptanya. Masyarakat yang demikian itu sudah ada sejak lama sebelum Belanda menguasai Lombok.

Salah satu akibat dari susunan masyarakat yang demikian pada umumnya golongan atas sangat maju. Pada pikirnya seolah-olah mereka dapat berbuat sesuka hati, kebal dari hukum yang berlaku. Suatu kebiasaan bagi golongan pemimpin desa yang berkembang sebelum Belanda berkuasa ialah adu ayam. Perbuatan itu dipandang oleh Belanda sangat menghambat pembangunan, karena mempunyai dampak yang dapat menjelmakan kemalasan dan kejahatan-kejahatan lain seperti penipuan, pencurian dan sebagainya. Maka itu judi adu ayam tanpa izin pemerintah dilarang. Oleh beberapa orang pemimpin

desa atau keluarganya larangan yang demikian sering dilanggar, dan Pemerintah Belanda menindaknya tanpa pandang bulu.

Demikianlah yang terjadi, seorang adik Jero Rawit pemimpin Desa Apitaiq ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara dua bulan karena berjudi adu ayam tanpa izin. Ia dipenjarakan di Penjara Sisik. Peristiwa ini sangat menyinggung perasaan Jero Rawit yang di desanya sangat terkenal orang yang disegani dan dihormati. Dia sangat prihatin karena merasa martabatnya tercemar. Setelah berbagai usahanya untuk membebaskan adiknya tidak berhasil maka ia memutuskan untuk berontak mengikuti jejak Lalu Talip yang sudah lebih dahulu berontak kepada Belanda.

2. Jalannya perlawanan

Ketika hatinya telah tetap untuk menyerang Belanda, maka pada tahun 1908 Jero Rawit pun mulai mempersiapkan perlawanan. Mula-mula dia menghasut rakyat Apiatiq yang setia kepadanya dengan mengobarkan semangat patriotisme dan harga diri sebagai suatu golongan yang tidak ingin diperlakukan semena-mena oleh Pemerintah Belanda yang kafir. Mereka diperintahkan agar mempersiapkan diri lahir dan batin karena musuh yang akan dihadapinya berkekuatan besar dan tangguh. Bantuan dimintanya pula kepada Mamiq Mustiasih pemimpin Desa Gandor, Lombok Timur; Jero Nursayang dari desa Tanjung Teros, Lombok Timur; dan Lalu Talip dari hutan; Mamelaq, Lombok Tengah. Karena kelihatannya ketiga desa itu menyanggupi bantuan yang diminta. Mereka sepakat hendak menyerang tangsi militer dan kantor pemerintah di Sisik pada malam Selasa 5 Muharram 1316 H (1898 M).

Pada hari H pasukan penyerbu bergerak serentak dan berkumpul di Loang Tuna. Jumlah mereka hanya beberapa puluh orang saja. Bantuan dari hutan Mamelaq terdiri dari sepuluh orang di bawah pimpinan Mamiq Badil. Mereka dipecah menjadi dua bagian; lima orang memperkuat barisan Jero Nursa-

yang dan yang lima orang lagi bergabung dengan pasukan Gandor yang dipimpin oleh Mamiq Mustiasih. Dari Loang Tuna mereka memecah diri lagi ke dalam tiga pasukan. Kota Sisik mereka serang dari tiga jurusan serangan dari timur dipimpin oleh Jero Rawit. Serangan dari barat dipimpin oleh Mamiq Mustiasih dan pasukan yang menyerang dari utara dipimpin oleh Jero Nursayang.

Sesuai dengan siasat yang telah disepakati bersama mereka maju serentak. Mereka sepakat akan mulai menyerbu setelah tengah malam. Dengan berlingung kegelapan malam para penyerbu dapat bergerak dengan leluasa menuju posisi masing-masing. Menjelang tengah malam tiap-tiap pasukan mulai bergerak menuju sasaran. Persiapan penyerbuan tangsi pada malam itu diatur sangat rapi sehingga baik pimpinan pemerintahan maupun militer tidak pernah menyangka bahwa ketiga desa Apitaiq, Gandor dan Teros akan berontak.

Pasukan Gandor maju dengan teraturnya. Setelah pasukan ini sampai pada sebuah rumah seorang agen kapal, tak ayal lagi rumah tersebut mereka bakar dan pemiliknya dibunuh. Melihat kobaran api yang menjulang ke atas kedua pasukan yang lain berlari menyerbu sasaran diiringi tempik sorak yang memecah kesunyian malam. Para prajurit Belanda yang terkejut mendengar kegaduhan dan menyaksikan kobaran api di rumah warga negara Belanda segera berbaris bersiap dan memuntahkan peluru ke arah suara suara sorak-sorai yang belum dikenal indentitasnya dan motivasinya. Gerak maju para penyerbu yang hanya bersenjatakan keris, pedang dan tombak tertahan seketika. Para penyerbu bertiarap di parit-parit dan di balik pohon. Sambil mengendap-endap mereka mundur dan melarikan diri karena takut kesiangan.

Pasukan Gandor berperang terus dan segera memperkuat pertahanan. Sementara itu Pemerintah Belanda pun telah mengetahui dengan jelas indentitas para penyerbu. Hal itu diperjelas pula oleh surat dari Mamiq Anggrat, Kepala Desa Tanjung

dan Raden Gde Nuraksa, Kepala Distrik Rarang, bahwa kedua beliau itu tidak terlibat di dalam rencana dan pelaksanaan penyerangan Tangsi Militer Belanda di Sisik. Dari isi surat itu juga diketahui pula pemimpin pemberontak. Maka dengan bantuan kedua tokoh tersebut Desa Teros dan Desa Apitaiq diserbu tentara Belanda. Jero Nursayang beserta semua pengikutnya ditangkap. Harta benda mereka dirampas. Kebun dan sawah mereka dirampas pula dijadikan milik negara dan dimanfaatkan sebagai tanah pecatu (bahasa Jawa: tanah bengkok). Setelah diinterogasi yang terlibat langsung dalam penyerangan itu ditahan, selebihnya dibebaskan. Yang bersalah diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Di antaranya ada yang dibuang ke Pulau Jawa, seperti Jero Nursayang dibuang ke Banyuwangi dan meninggal di situ.

Desa Gandor yang terus bertahan dan memaklumkan perang terhadap Pemerintah Belanda diserbu pasukan Belanda yang dibantu oleh nelayan Bugis dan Mandar. Sementara rakyat Gandor sedang berperang menghadapi musuh, dari belakang orang Bugis dan Mandar membakar rumah penduduk yang dalam sekejap Desa Gandor yang terdiri dari rumah beratap alang-alang berubah menjadi lautan api. Anak-anak dan wanita lari terbirit-birit kepanikan. Melihat kampung mereka yang sudah menjadi lautan api ditambah oleh jerit-tangis anak-anak dan wanita moral rakyat menjadi pudar dan mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Mamiq Mustiasih sendiri bersama anak dan istrinya mengungsi ke hutan Mamelaq. Di situ beliau bergabung dengan Lalu Talip. Mereka yang menyerah setelah diadili secara marathon dijatuhi hukuman penjara. Sisanya diharuskan pindah ke hutan Selong.

Demikian pula Kantor Kantrolis Lombok Timur dan Lombok Tengah yang tadinya satu kemudian dipecah masing-masing menjadi *onder afdeeling Oost Lombok* dengan ibu kota Selong dan *onder afdeeling Midden Lombok* dengan ibu kota Praya.

E. PERANG PRINGGABAYA

1. Latar Belakang Perlawanan.

Lima tahun setelah Perang Gandor timbul lagi Perang Pringgabaya yang dipimpin oleh Guru Keping pada tahun 1913. Pemberontakan ini berasal dari perlakuan Pemerintah Belanda bersama pelaksana-pelaksananya yang sering berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat setempat. Melalui Kepala Distrik Pringgabaya Belanda meminta agar rakyat mengumpulkan kayu manis yang akan dibayar dengan harga mahal. Tetapi meskipun kayu manis sudah lama terkumpul dan sudah banyak yang terbawa, harga yang dijanjikan tidak kunjung tiba.

Belum lagi keresahan yang demikian itu terhapus disusul pula dengan tagihan pajak yang menurut penilaian jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Terakhir salah seorang cucu Guru Keping hampir dinodai oleh Kepala Distrik Pringgabaya. Semuanya itu menimbulkan amarah yang terpendam pada hampir setiap hati rakyat. Terutama peristiwa terakhir itu sangat menyinggung kehormatan seorang guru (kyai) seperti Guru Keping. Maka dengan suka rela dan ikhlas beliau maju ke hadapan kepala distrik meminta penjelasan tentang beberapa hal antara lain harga kayu manis yang belum dibayar.

Rakyat yang telah bersusah-payah mengumpulkannya meminta pembayaran yang telah dijanjikan. Mereka tidak ingin hanya mendengar janji-janji saja. Mengenai pajak hasil bumi rakyat pun berkeberatan. Besarnya pajak yang dipungut pemerintah tidak sesuai dengan hasil ladang yang mereka peroleh; apalagi harga padi sangat rendah sehingga praktis hampir semua hasil yang mereka peroleh akan terjual habis untuk membayar pajak. Suatu hal yang tidak mungkin. Mereka rata-rata memiliki tanggungan keluarga yang besar. Di samping itu untuk bibit juga harus disediakan. Tetapi sifat terus terang rakyat melalui Guru Keping dinilai oleh kepala distrik kurang hormat.

Sistem pemerintahan yang feodal tidak menyukai cara yang demikian. Rakyat tidak diberi kesempatan menyatakan aspirasi mereka secara terus terang. Rakyat pada waktu itu diperlakukan tidak lebih dari pada kuda beban. Mereka harus memikul berbagai tugas dan kewajiban dengan hanya hak yang terbatas. Guru Kepaq yang berani menyampaikan kehendak rakyat ditangkap dan ditahan selama dua hari di rumah kepala distrik. Penahanannya sangat menyinggung perasaan kerabat dan sahabatnya. Sebagian besar dari mereka menganjurkan kekerasan dengan menyerang kepala distrik.

2. Jalannya Perlawanan

Semenjak disepakati jalan kekerasan maka undangan pun segera dijalankan ke beberapa desa di seluruh Pulau Lombok. Yang ditugaskan berkeliling mencari bantuan ialah Anting. Perlawanan dipelopori oleh Amaq Ratnayu, saudara Guru Kepaq. Undangan mendapat sambutan hampir di seluruh Pulau Lombok. Sifatnya perorangan, terdiri dari tokoh-tokoh desa. Beliau-beliau itu antara lain: Mamik Purwata dari Tuban, Lombok Tengah, Benganten Medaq dari Suradadi, Penganten Ali dari Batu Mara, Lalu Pama dan Mamiq Ulan dari Batujai, Lombok Tengah, Mamiq Ocet Satradji, Penganten Muria dan hampir seluruh rakyat di Bukit dan Limbungan. Ada pula yang berasal dari Pohgading dan Apitaiq. Mereka berkumpul di Jejangka dan menyerang Kepala Distrik Pringgabaya. Pada pertempuran hari pertama jatuh beberapa orang korban termasuk kepala distrik luka pada pahanya. Sementara itu kepala distrik meminta bantuan kepada kontrolir di Selong.

Dua hari kemudian pasukan Belanda datang dan kini sifat perlawanan rakyat berubah dari kepala distrik kepada Pemerintah Belanda. Tempat kediaman Guru Kepaq di Jejangka dikepung secara ketat oleh pasukan Belanda. Satu-persatu pengikut Guru Kepaq tewas. Sampai akhirnya para pemberontak merasa terjepit dan mundur ke Bukit Durian. Di situ mereka membuat markas pertahanan yang kuat dan melancar-

kan perlawanan yang gigih. Namun karena persenjataan yang serba tradisional dalam beberapa hari pertahanan mereka dibumihanguskan.

Dari Bukit Durian mereka pindah ke Limbungan, pasukan Belanda terus mengejar dan dalam suatu pertempuran yang sengit dari kedua belah pihak beberapa orang tewas. Pasukan Belanda terus mendesak dan menyerang sampai akhirnya Limbungan jatuh juga. Pemimpin-pemimpin rakyat ditangkap dan diadili di Selong. Mereka dianggap sebagai penjahat yang dengan berencana menimbulkan keonaran dengan maksud hendak merongrong wibawa pemerintah. Setelah diadili di antaranya dijatuhi hukuman penjara dari lima sampai dua puluh tahun. Bagi mereka yang dianggap pelopornya, Guru Kepad, Ratnasih dan Amaq Ratnayu masing-masing dihukum lima belas tahun dan dua puluh tahun penjara di luar daerah. Guru Kepad dan Ratnasih dibuang ke Sawahlunto. Guru Kepad meninggal di sana sedangkan Ratnasih sempat pulang menjenguk keluarga dan tidak kembali lagi ke Sawahlunto. Amaq Ratnayu dibuang ke Buleleng dan meninggal di sana. Yang lain-lain seperti Amaw Riawan, Anting dan Mustiasih dipenjarakan di Mataram.

Pemimpin-pemimpin perlawanan yang berasal dari luar Desa Pringgabaya kebanyakan sempat meloloskan diri dan terus dikejar oleh pasukan Belanda. Mereka berpencar di desa masing-masing sambil mencari pengikut baru sehingga yang terlibat bertambah yang menyibukkan pasukan Belanda. Di antaranya ada juga yang mengadakan perlawanan secara sporadis. Dengan bantuan kepala distrik dan kepala desa setempat mereka terus diburu dan dikucilkan. Pada pertempuran di Bagekpolaq Lalu Badeng dapat ditangkap. Mamiq Migarsih ditewaskan pada pertempuran di Penarukan. Mamiq Purwata sendiri masih sempat mengumpulkan pengikut-pengikut yang setia kepadanya tetapi sebelum sempat memberi perlawanan beliau diserang oleh Belanda. Beberapa orang temannya tertangkap termasuk anak istri dan saudara-saudaranya. Mereka

ditawan di Praya. Yang terlibat langsung dalam perlawanan dipenjarakan sementara menunggu diadili.

Salah seorang di antaranya bernama Lalu Pujut sementara belum diadili sempat meloloskan diri dengan jalan memanjat tembok penjara. Dengan kaki yang pincang karena keseleo sewaktu terjun dari tembok penjara beliau meneruskan perjalanan ke Rebange. Di situ beliau tersusul oleh tentara Belanda dan sempat bentrokan senjata sebelum meloloskan diri. Dari Rebange beliau berusaha mencapai rumah di Nonoh Desa Pujut untuk sekedar menjenguk ayahnya yang sedang sakit keras. Karena takut akan tersusul tentara Belanda di rumah ayahnya sebentar saja selanjutnya meneruskan perjalanan untuk menggabungkan diri dengan Mamiq Purwata dalam persembunyian. Tetapi malang baginya akibat jalannya yang pincang beliau tersusul dan tertangkap di Bangketparak, Desa Pujut. Setelah diadili bersama-sama teman seperjuangannya beliau dibuang ke luar daerah Lombok. Beliau sendiri bersama Lalu Pama alias Mamiq Padma, Mamiq Ulan, Papuq Ayu, Sirawi dan Syukur dibuang ke Pulau Timor. Sebagian dibuang ke Deli (Sumatra) dan seorang lagi bernama Guru Shaleh dibuang ke Jambi. Yang dibuang ke Pulau Timor dimanfaatkan oleh Belanda untuk memimpin penduduk Kerajaan Nikiniki bersawah sehingga pada suatu malam mereka diserbu dan dibunuh rakyat Nikiniki yang tersinggung karena anak raja mereka dihina oleh Belanda. Akibat penyerbuan itu beberapa orang narapidana tewas, salah seorang di antaranya yaitu Lalu Pujut sendiri.

Empat tahun kemudian, sejak meletusnya pemberontakan Pringgabaya, setelah semua teman-teman seperjuangannya dibuang ke luar daerah dan anak isteri dan saudara-saudaranya tertawan, Mamiq Purwata mulai memutuskan untuk mati syahid demi kehormatan keluarga dan dirinya. Beliau pantang menyerah kepada Pemerintah Belanda yang dianggapnya lalim. Setelah hatinya tetap, pada suatu pagi Jum'at dengan pakaian serba putih dengan keris terhunus ditangan kanannya

beliau menampakkan diri di Desa Talatalat, Desa Pujut. Beliau duduk di atas sebuah batu besar menghadap kiblat. Melihat sikapnya yang demikian itu para prajurit pun ragu hendak menangkapnya. Maka dari jarak beberapa puluh meter beliau di-salvo hingga jatuh terkulai. Jenazahnya dibawa ke Praya dan setelah divisum dikembalikan kepada keluarganya. Beliau di-makamkan di kompleks makam keluarganya di Sanggeng dengan upacara yang sederhana.

C A T A T A N :

- 1) "Babad Lombok".
- 2) Dr. E. Utrecht, S.H., *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, Sumur Bandung, Bandung, 1962, hal. 164.
- 3) Ibid hal. 92.
- 4) *Babad Selaparang*, Proyek Pengembangan Permuseuman Nusa Tenggara Barat, 1979 hal. 34.
- 5) Ibid, hal. 33.
- 6) Ibid, hal. 38.
- 7) Lalu Wacana, dkk, *Sejarah Nusa Tenggara Barat*, Proyek IDKD NTB, 1978 hal. 40.
- 8) Dr. E. Utrecht, S.H., op cit, hal. 99.
- 9) Lalu Wacana, dkk, op cit, hal. 5.
- 10) H. Abdullah Tajib, B.A., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Bima* (manuskrip).
- 11) Wawancara dengan I.G.B. Mandia, 5 Agustus 1982.
- 12) Lalu Wacana, dkk, op cit, hal. 41.
- 13) Wawancara dengan Lalu Jaya, tanggal 15 September 1982.
- 14) Lalu Wacana, dkk, op cit, hal. 42.
- 15) Dr. E. Utrecht, S.H., loc cit, hal. 99.
- 16) Lalu Wacana, dkk, op cit, hal. 74.
- 17) Dr. E. Utrecht, S.H., op cit, hal. 145.
- 18) Dr. E. Utrecht, S.H., op cit, hal. 147.
- 19) Ibid, hal. 163.
- 20) Lekkerkerker, *Voorspel*, hal. 288, Dr. E. Utrecht, S.H., hal. 164.
- 21) Ibid, hal. 164.
- 22) Naskah Perjanjian antara Kerajaan Mataram dengan Gubernemen pada tanggal 7 Juni 1843.
- 23) Wawancara dengan H. Moh. Sedek, tanggal 2 Oktober 1982.
- 24) Wawancara dengan H. Moh. Sedek, tanggal 2 Oktober 1982.
- 25) Wawancara dengan H. Moh. Sedek, tanggal 2 Oktober 1982.

- 26) Babad Praya.
- 27) Wawancara dengan Bapak Rahil, tanggal 3 Nopember 1982
- 28) W. Cool, Lombok Expeditie, G. Kolff & Co, Batavia, 1896, hal. 245.
- 29) W. Cool, ibid, hal. 243.
- 30) Wawancara dengan Lalu Jaya, tanggal 15 September 1982.
- 31) Wawancara dengan Lalu Jaya, tanggal 15 September 1982.
- 32) Wawancara dengan Lalu Jaya, tanggal 15 September 1982.
- 33) Wawancara dengan Lalu Jaya, tanggal 15 September 1982.
- 34) Wawancara dengan Lalu Jaya, tanggal 15 September 1982.
- 35) W. Cool, op cit, hal. 245.
- 36) Ibid, hal. 245.
- 37) Th. J.A. Hilgers, *Onze Helden van Lombok*, cetakan kedua, G.C.T. van Dorp & Co, Semarang, 1897, hal. 108.

BAB II PERLAWANAN DI PULAU SUMBAWA

PERANG SAPUGARA

Pendahuluan

Sumbawa mempunyai tiga negara vazal (*Vazalstaten*) yaitu Taliwang, Seran (Seteluk) dan Jereweh. Ketiganya disebut *Telu Kamutar* (Kamutar Telu = Tiga Kamutar = Tiga Daerah Kekuasaan). Sultan yang berada di pusat pemerintahan dengan ibu kota Sumbawa membagi-bagikan kepada saudara-saudaranya dan keluarganya yang terdekat, tiga daerah kekuasaan (tiga kamutar) yang letaknya jauh dari ibukota. Sultan disebut Datu Mutar. Tiga kamutar tersebut masing-masing: Taliwang yang dikuasai oleh Lalu Paconga bergelar Datu Taliwang. Seran yang dikuasai oleh Lalu Patorang bergelar Datu Seran. Jereweh yang dikuasai oleh Lalu Acam bergelar Datu Jereweh. Datu Taliwang adalah saudara kandung Sultan Moh. Jalaludin III. Dia tidak secara langsung memerintah Taliwang. Dia selalu berada di Sumbawa.²⁾

Yang melakukan pemerintahan sehari-hari ialah seorang mangkubumi yang merupakan wakil mahkota yang disebut enti desa. Dialah yang lebih tahu dan mengenal masyarakat setempat dibandingkan dengan datu yang ditunjuk oleh sultan. Dalam pelaksanaan pemerintahan sultan dibantu oleh kelompok-kelompok elite yang tergabung dalam apa yang disebut Menteri Telu (tiga menteri) yang terdiri dari: Datu Ranga sebagai Perdana Menteri atau Mangkubumi, Dea Kalibelah sebagai pejabat urusan pengadilan, dan Dea Dipati sebagai pejabat urusan pertahanan. (Datu dan dea adalah gelar kebangsawanan di Sumbawa). Keputusan adat tertinggi adalah hasil musyawarah ketiga menteri dibantu oleh mamanca lima dan lelurah pitu.

Keputusan yang agak ringan dapat diselesaikan oleh hanya ketiga ketua yaitu ketua menteri telu (Datu Ranga) ketua mamanca lima (Dea Longan Samapuin) ketua leluhur pitu (Dea Ngeru). Enti desa, danria, sangaria, karoya, ngampo adalah wakil-wakil mahkota yang ditempatkan dalam beberapa wilayah kekuasaan pemerintahan yang dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari membawahi para nyaka. Sedangkan hal-hal yang ada hubungannya dengan keagamaan diserahkan kepada lembaga hukum syara yang diketuai oleh dea qadi dengan para anggota dea imam, dea panghulu, dea lebeh dalam, dea kabir, dan dea rura.³⁾

Sistem penggajian seperti sekarang belum dikenal. Pejabat-pejabat kerajaan dibayar oleh rakyat lewat suatu sistem pemungutan pajak dengan kenaikan bunga secara khusus yang biasa disebut bunga antin.⁴⁾ Hasil pemungutan ini diperuntukkan khusus bagi sultan, sedang bagi pejabat-pejabat lainnya dikenal dengan istilah bekal beraya.⁵⁾ Pada saat itu dikenal tiga pelapisan dalam masyarakat Sumbawa yaitu:

1. Golongan bangsawan yang disebut dea datu
2. Golongan merdeka (de vrijen) yang disebut sanak
3. Golongan yang tidak merdeka (de invrijen) yang disebut ulin⁶⁾

Sultan menduduki posisi tertinggi sebab dia sekaligus pemimpin pemerintahan adat dan agama tetapi tidak absolut sebab keputusan penting selalu dirundingkan dengan menteri telu, mamanca lima atau dewa adat lainnya. Secara umum masyarakat Sumbawa pada saat itu termasuk dalam kelompok agraris religius. Mereka sangat terikat dengan sawahnya demikian juga para bangsawan walaupun mereka sebenarnya mempunyai kelas yang lebih tinggi tetapi mereka juga petani yang terikat dengan sawahnya.

Agama Islam dianut oleh sebagian besar masyarakat. Pendidikan yang belum maju menyebabkan kehidupan mereka betul bergantung dari hasil sawah. Dari tahun ke tahun jarang

dan kejantanan dalam mempertahankan setiap jengkal tanah Taliwang terhadap keserakahan Belanda.¹⁹⁾ terjadi kenaikan atau peningkatan produksi. Setiap campuran pihak lain terutama bangsa asing selalu disebutkan dengan kepentingan agama. Setiap bangsa asing dicap orang kafir (tau kafir). Di samping menanam padi di sawah penduduk Sumbawa pada waktu itu juga berternak kuda, kerbau, kambing, dan domba. Sistem peternakan masih tradisional, kerbau/kuda dibiarkan saja bebas tanpa kandang khusus walaupun jumlah kerbau tiap orang kadang-kadang mencapai ratusan ekor. Sistem kandang alamiah, yang disebut lar yaitu bahagian wilayah peternakan yang biasa dijadikan tempat istirahat hewan tersebut masih dikenal hingga sekarang walaupun sudah berkurang. Mereka adalah petani tradisional yang taat beribadah. Agama mayoritas adalah Agama Islam.

Latar Belakang Perlawanan

Secara resmi kekuasaan Belanda atas tana samawa (Kerajaan Sumbawa) barulah diakui pada tanggal 27 Februari 1875 yaitu ketika Sultan Muhammad Amrullah (Sultan XIV yang memerintah tahun 1843–1883) menandatangani suatu kontrak politik dengan pihak Belanda. Setelah Sultan Amrullah wafat pada 20 Agustus 1883 dan diganti oleh cucunya Muhammad Jalaluddin III, maka sultan ini pun menyatakan kedaulatan Belanda atas Sumbawa dalam suatu *verklaring* yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1885 pada saat pelantikannya secara resmi sebagai Sultan Sumbawa. *Verklaring* tersebut kemudian diubah dengan kontrak politik pada tanggal 14 Mei 1905 yang isinya menetapkan hal-hal yang harus dan tidak boleh dikerjakan oleh *zelfbestuur*.⁷⁾

Seperti sudah disebut pada pendahuluan, kamutar telu tidak jarang menimbulkan ketegangan-ketegangan. Sumbawa-Taliwang memerlukan waktu tiga hari tiga malam perjalanan dengan jalan kaki. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III (1883–1931) di negara vazal Taliwang bertindak sebagai entitas desa ialah seorang yang berperawakan sedang, tetapi dengan keberanian luar biasa yang biasa dipanggil dengan

julukan Dea Mas Manurung walaupun nama sebenarnya Unru atau lengkapnya Launru Sinrang. Dalam usia yang relatif muda (28 tahun), sebenarnya Unru belum cukup matang untuk menjadi pimpinan. Tetapi alam yang keras membentuk watak keras rata-rata rakyat Taliwang pada waktu itu ditambah kelebihan-kelebihan khusus yang dimiliki Unru, antara lain rampokan dan lain-lain. Rakyat secara ikhlas memilih dia menjadi pemimpin karena karisma yang tinggi yang menyebabkan tindakannya menentang registrasi yang dilakukan Belanda terhadap rakyatnya didukung oleh mereka sepenuhnya. Rakyat memang tidak setuju sistem perpajakan yang dipaksakan Belanda saat itu.⁸⁾ Pembayaran yang semula hanya dikenakan pada setiap kepala keluarga kemudian diubah menjadi tiap jiwa sudah tentu mengusik rasa keadilan mereka.⁹⁾ Dengan tegas mereka menolak.

La Unru Sinrang muncul sebagai pemimpin yang disegani semua pihak. Sikap Unru yang menentang tersebut dilaporkan oleh Rustam,¹⁰⁾ seorang Menteri Candu pada Juni 1907 kepada Muller, seorang *civil gezaghebber* saat itu.¹¹⁾ Muller membicarakan hal ini dengan Sultan Jalaluddin dan Lalu Pacanga, Datu Taliwang. Walaupun kedua pemimpin ini sudah didesak oleh Muller untuk mempergunakan kekuasaan/kewibawaannya dalam menjinakkan Unru tetapi tidak berhasil. Rakyat berada dipihak Unru. Unru membangkang dan setiap campur tangan Datu Taliwang ditolak. Demikian pula yang dialami oleh Banse pengganti Muller Datu Taliwang yang diperintahkan oleh Sultan Sumbawa untuk secara langsung mengadakan registrasi di Taliwang pada bulan Nopember 1907 tidak berhasil mengemban tugas dan perintah sultan. Rakyat menolak. Ia terpaksa kembali ke Sumbawa dengan tangan hampa. Kegagalan ini menyebabkan Banse memutuskan untuk terjun sendiri ke lapangan. Dia bermaksud untuk menemui langsung La Unru Sinrang di Sapugara tempat kediamannya, sebelah timur laut Taliwang yang berjarak kira-kira 3½ jam perjalanan.¹²⁾

Dengan satu detasemen marinir yang diangkut kapal Siboga, Banse mendarat di Taliwang dan menuju ke Sapugara. Di sepanjang perjalanan ia menyaksikan kelompok orang-orang yang bersenjata.¹³⁾ Rombongan Banse berhenti di Kampung Bre di sebelah barat Sapugara (\pm 1 km dari Sapugara). Bre Banse mengirim utusan ke Sapugara dan mengundang Enti Desa Unru untuk datang menemuinya. La Unru yang dikenal berwatak keras menolak undangan itu. Melalui utusan tersebut Unru memberitahukan kepada Banse bahwa ia sakit. Banse memutuskan untuk datang sendiri menemui Unru akan tetapi dilarang oleh para pengawal Unru. Kemudian tanpa putus asa utusan dikirim kembali dengan maksud yang sama tetapi ditolak dengan alasan yang sama pula. Banse kembali ke Taliwang dengan rasa kecewa. Setelah itu sultan mengutus Datu Ranga untuk menemui sekaligus menekan Unru agar merubah sikapnya. Sikap Unru yang membangkang terhadap Belanda harus dicegah. Tugas berat ini dibebankan di atas pundak Datu Ranga Muhammad Yakub. Datu Ranga pada watu itu berangkat ke Anorawi (Sumbawa bagian barat) beserta rombongannya. Dia disambut Unru di perbatasan Taliwang dan Seteluk. Bersama Unru Datu Ranga dan rombongan memasuki Taliwang.¹⁴⁾ Datu Ranga menyampaikan maksud kedatangannya bahwa dia diperintahkan oleh sultan untuk mengingatkan La Unru bahwa melawan Belanda adalah pekerjaan sia-sia. Tetapi La Unru tetap menolak. Menolak registrasi dan menolak Belanda menginjakkan kakinya di tanah Taliwang. Datu Ranga marah. Ia tidak ingin kewibawaannya dicampakkan begitu saja oleh seorang enti desa. Tetapi watak Unru yang memang keras merupakan penghalang bagi Datu Ranga. Dia segera memerintahkan pasukan yang dibawanya dari Sumbawa untuk menangkap Unru dan menduduki tempat-tempat penting di Taliwang. Pasukan ini diperkuat oleh pasukan bantuan dari Sangaria Utan, Demung, Mapin dan Alas tetapi semuanya gagal. Laskar Unru lebih sigap. Dalam waktu yang pendek mereka telah terkepung dan dilucuti senjatanya oleh anak buah Unru.¹⁵⁾

Sejak saat itu semakin mantaplah sebutan Unru sebagai pembangkang besar dari Ano Rawi. Dia membangkang bukan saja terhadap Belanda tetapi lebih-lebih lagi terhadap sultan. Hal ini disebabkan pula oleh ingkarnya beberapa pejabat teras kerajaan terhadap janji atau ikrar yang mereka buat bersama, bahwa jika Belanda datang tidak boleh dibiarkan menjajah tanah Sumbawa. Unru dan Dea Longan Payang termasuk kelompok yang merasa terpukul oleh ulah beberapa penguasa yang ingkar janji.¹⁶⁾ Akhirnya cara yang paling tepat untuk membungkamkan mulut La Unru Sinrang si pembangkang dari Sapugara tersebut telah dipilih oleh sultan dan Belanda. Pilihan lain tidak ada. Unru harus ditundukkan dengan kekuatan senjata. Perang pun pecah.

Jalannya Perlawanan

La Unru Sinrang alias Dea Mas Manurung dengan perawakan yang kecil tetapi memiliki kharisma yang sangat besar mulai membenahi dan mempersiapkan laskarnya. Senjata yang sederhana yang terdiri dari keris, tear (senjata tombak), berang (sejenis pedang atau kelewang), poke (tear yang berujung bengkok), dompas (sejenis tear tetapi besi yang dijadikan bahan baku dari kualitas rendah) dipergunakan semaksimal mungkin untuk persiapan perang.¹⁷⁾ Pandai-pandai besi yang ada di dalam wilayah Taliwang diperintahkan untuk meningkatkan produksi senjata. Perempuan-perempuan yang tidak ikut berperang diberi tugas mempersiapkan bekal bagi para pejuang. Kesibukan-kesibukan terlihat di sepanjang Brang Poto dan di tepi Sungai Taliwang. Paruak Brang Poto dijadikan benteng utama laskar Unru.¹⁸⁾ Pohon-pohon ditebang menutupi jalan sebagai penghalang terhadap kemungkinan menyusupnya tentara Belanda lewat Paruak Brang Poto. Pertahanannya membentang menurut garis tepi Sungai Taliwang, Brang Poto ke Sapugara dijaga ketat oleh anak buah Unru. Chattab, Lasap, Mansur, Bebango, (Banggo), Baso Busing, Sangaria Uba, Belo Amin, Ne Mursali adalah nama-nama yang turut mengukir sejarah Perang Sapugara. Mereka adalah lambang kesetiaan

Mereka adalah panglima-panglima tangguh yang mengimbangi kekurangan senjata dengan semangat yang tinggi. Memang ada juga sejenis senapan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Senjata tersebut dipesan dari Lombok. Tetapi senapan itu termasuk jenis senapan locok yang mesiuinya harus ditumbuk dahulu sebelum mengisi mimis untuk ditembakkan. Selain memang memakan waktu juga jumlahnya sangat terbatas. Ada lagi jenis senjata rahasia yang proses pembuatannya banyak dipengaruhi oleh kekuatan sihir atau magis lainnya. Senjata tersebut seolah-olah "peluru kendali" ukuran kecil (sebesar kelereng) yang dikendalikan dengan kekuatan bathin dan menurut keterangan orang-orang tua cukup banyak mencatat korban dipihak Belanda; senjata tersebut biasa disebut pacunang.²⁰) Pacunang Unru yang terkenal ialah bubit mupir.²¹)

Kota Taliwang sengaja dikosongkan oleh Unru. Semua kekuatan dipusatkan di Sapugara. Dari desa-desa sekitarnya Unru banyak mendapat dukungan. Rarak, Lamuntit, Deasa, Beru, Salit, Seminar, Tepas, Lalar adalah nama-nama desa yang turut mengambil bagian dalam persiapan perang dan perang itu sendiri. Masing-masing desa itu mengirimkan jagoannya yang dianggap paling berani, paling sakti (kebal) dan lain-lain keistimewaannya yang tidak dimiliki semua orang. Dari desa-desa tersebut diwakili oleh deretan nama pejuang yang hingga sekarang tetap dikenang rakyat ialah:

- Dari desa Beru : Dea Baso Busing, Muhammad Saat alias Dea Panyang Gemma, Dola na Lasap, Cau.
- Dari Tepas : Punggawa Iring, Punggawa Bies, Musa.
- Dari Lamuntit : Sangaria Uba, Talip.
- Dari Taliwang : Lasap, Mansur.
- Dari Mataiang : Ne Mataiang.
- Dari Lalar : Ne Balliu.²²)

Dea Baso Busing adalah wakil Desa Beru yang namanya tetap akan dikenang dalam Perang Sapugara. Persiapan-persiapan yang dilakukan Unru sudah tentu sampai ke telinga

sultan di Sumbawa. Kemarahan Belanda semakin menjadi-jadi tetapi untuk menaklukkan Unru bukanlah soal mudah. Tidak cukup cuma dengan perintah atau ancaman-ancaman. Di samping itu di antara oknum-oknum kelompok pemegang keputusan (menteri telu, mamanca lima, lalurah pitu hingga perangkat desa lainnya) terjadi pro dan kontra terhadap kehadiran Belanda di Tanah Samawa. Dalam hal ini tercatat nama Dea Longan Panyang yang termasuk dalam kelompok yang kontra terhadap kedatangan Belanda.²³) Hal ini tentunya mengurangi kekuatan/keseragaman tindakan dalam usaha memukul Unru. Dan yang paling penting La Unru Sinrang masih dicintai oleh masyarakat Taliwang. Karismanya bahkan semakin besar. Unru begitu disegani baik oleh kawan maupun lawan dapat dibuktikan dalam kejadian di bawa ini.

Pada suatu hari ada seorang yang dikejar akan dirampok/dibunuh. Orang tersebut lari menuju ke rumah kediaman Unru yang berpagar kuat. Hampir saja dia dapat dibunuh kalau tidak dengan segera dia buka sapu (ikat kepala)-nya dan langsung dilemparkan ke dalam halaman rumah Unru. Lawannya tidak dapat berkutik lagi dia tidak berani mengejar terus sebab saat itu telah diakui oleh semua pihak bahwa barang siapa yang telah menginjakkan kakinya di halaman Unru berarti dia sepenuhnya di bawah perlindungan Unru. Ini berarti kematian bagi siapa saja yang mengganggu orang tersebut. Setelah istana mencoba menaklukkan Unru dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh pembesar-pembesar yang masih setia terhadap kerajaan dibantu oleh Ngampo, Kroya, atau para Sangaria, tetapi tidak juga berhasil maka sultan terpaksa memilih meminta bantuan Belanda. Tetapi saat itu ketbetulan Belanda sedang menghadapi perlawanan dan menunggu hasil perang di Bima.²⁴)

Pada tanggal 17 Maret 1908 setelah urusan di Bima dianggap selesai Gubernur Swart dengan kapal api Reaal berangkat ke Sumbawa. Keesokan harinya tanggal 18 Maret 1908 se-

kitar pukul 6.00 mereka membuang sauh di Labuhan Balat, di situ telah berlabuh kapal Siboga. Pasukan Belanda terdiri dari 5 brigade marsose, satu grup infantri, marinir dan sejumlah serdadu zeni yang membawa bahan peledak. Sebuah kanon 3,7 cm yang dipergunakan di dalam pertempuran di Dena Bima turut dibawa serta.²⁵) Tentara Belanda mulai bergerak ke Taliwang yang jaraknya sekitar 2 jam perjalanan. Tidak ada perlawanan di Taliwang. Kekuatan Unru yang berjumlah ± 600 orang dipusatkan di Desa Sapugara.²⁶) Tentara Belanda menduduki Karang Mandar di tepi Brang Jarujit (sekarang Kampung Sampir) dan membuat bivak serta menempati rumah-rumah penduduk. Sementara tentara Belanda mempersiapkan diri untuk menyerang Sapugara dan bergerak ke pedalaman, Unru dan pengikut-pengikutnya tidak tinggal diam. Benteng Paruak Brang Poto menjadi tumpuan harapan Unru untuk membendung Belanda.²⁷) Pukul satu Belanda bergerak menuju Sapugara melalui Lamber ke Brang Poto.²⁸) Medan yang dilalui sulit. Mereka menyusuri sungai dan menyeberangi Sungai Taliwang yang deras. Tak jarang harus melalui bukit dan sawah-sawah yang masih basah. Pertempuran pertama pecah ketika Belanda menghujani benteng pertahanan Paruak Brang Poto. Laskar Unru masih menahan diri menghadapi serbuan gencar Belanda tersebut. Mereka bersembunyi di dalam perlindungan-perlindungan yang terdiri dari batu-batu padas yang besar serta pohon-pohon yang memang sudah ditumpukkan untuk blokade. Belanda terus maju. Dengan bersenjata lengkap Belanda mendaki Paruak Brang Poto. Tembakan balasan dari bedil-bedil locok tidak terdengar lagi. Belanda berpikir bahwa perlawanan sudah tidak ada. Mereka bergerak terus. Pada saat itu tanpa diduga-duga berguguranlah dalam jumlah yang besar dan suara menggelegar batu-batu besar.²⁹) Dengan kecepatan tinggi batu-batu itu meluncur menimpa dan melumatkan apa saja yang dilaluinya. Kepanikan, terjadi di pihak Belanda. Banyak tentara Belanda yang mati tertimpa akibat batu-batu tersebut. Mereka

yang lolos terus bergerak. Di celah-celah jalan setapak di atas bukit Brang Poto terjadilah duel dahsyat antara Belanda yang mempergunakan bayonet, dengan laskar Unru yang mempergunakan tombak, parang dan keris. Mayat berserakan di mana-mana. Garis pertahanan ini rupanya sukar ditembus oleh Belanda. Korban di pihak Belanda terus berjatuhan.³⁰⁾

Belanda yang memang mempunyai begitu banyak kepentingan dalam menjajah negeri ini tentu saja tidak kehilangan akal. Belanda memiliki ahli-ahli strategi yang lihai. Mereka mempunyai senjata-senjata modern. Dan tak kalah pentingnya ialah bahwa jauh sebelumnya pertempuran ini berkecambah, Belanda sudah mempersiapkan/menyebarkan mata-mata dari kalangan inlander sendiri yang merupakan musuh dalam selimut bagi rakyat Taliwang.³¹⁾ Dalam penyerbuan seterusnya Belanda mempergunakan dua jalan. Pertama sebagian tentara dikerahkan menembus pertahanan Brang Poto melalui Lamber. Kedua sebagian lagi menuju arah Seloto menyeberangi Brang Jarujit di tepi Kampung Mandar. Kemudian membelok lagi dan berputar ke daerah Lang Ai Pisak melalui Lang Tanyong dan sungai serta sebuah dataran rendah. Dari sini Belanda terus bergerak menyeberangi sungai dan menusuk tembus lewat Bage Acung.³²⁾ Pada tanggal 19 Maret 1908 terjadi pertempuran berat sebelah di sekitar Ponjok dan Bre yang rupanya kurang mendapat pengawasan.³³⁾ Unru terlalu memusatkan perhatiannya pada benteng Paruak Brang Poto. Ketika laskar Unru sedang menghadang Belanda di Brang Poto tanpa diduga mereka kebobolan lewat Bage Acung. Amin Ne Mursali, salah seorang panglima Unru yang cukup tangguh tewas dalam pertempuran ini. Begitu juga pejuang-pejuang lain yang cuma mengandalkan semangat yang tinggi tapi peralatan yang sangat kurang. Sementara di Paruak Brang Poto terjadi pertempuran dengan tentara Belanda yang menyusup lewat Bage Acung yang bergerak dengan cepat mendekati jantung pertahanan Sapugara dan membumihanguskan desa tersebut sekitar pukul 11.30³⁴⁾ Lumbang-lumbang padi dirata-

kan dengan tanah. Makanan persediaan untuk perang telah habis dimakan api. Baso Busing salah seorang kepercayaan Unru yang berasal dari Desa Beru berusaha mempertahankan Sapugara dengan sekuat tenaga. Tetapi persenjataan yang tidak berimbang menyebabkan dia tidak dapat bertahan dan tewas dalam pertempuran tersebut. Panglima yang lain berusaha mengungsikan keluarga Unru. Belanda terus mengejar sisa-sisa laskar Unru. Pertempuran terjadi lagi. Kembali batu-batu besar digunakan sebagai senjata. Pada sebuah pendakian sempit laskar Unru menghadang Belanda. Korban ke dua belah pihak sangat banyak. Pendakian di mana pertempuran itu terjadi hingga sekarang disebut Paruak Marsose sebagai peringatan bahwa banyak marsose yang mati di Paruak (pendakian) tersebut.^{3 5})

Sesudah Sapugara jatuh pasukan Belanda yang tidak ikut dalam pengejaran kembali hari itu juga ke Taliwang. Mereka yang luka-luka dibawa dengan kapal *Siboga* ke Makassar. Unru yang terkejut menyaksikan asap hitam menghanguskan Sapugara sudah terlambat untuk bertindak. Ketika dia dan pengikutnya tiba di Sapugara didapatinya desa itu tinggal puing-puing belaka. Dia dan pengikutnya kemudian meloloskan dirinya meninggalkan Sapugara. Mereka berlindung dan bersembunyi di Desa Moteng.^{3 6}) Dari Moteng Unru dan pengikutnya menuju Desa Rarak dan bersembunyi dalam sebuah Goa di Olat Rungis. Belanda terus mengadakan pengejaran secara intensif. Mata-mata disebar di kalangan penduduk. Pada tanggal 3 April 1908 istri Unru dan tiga orang anaknya ditangkap di sebuah persembunyian di Brang Kalonggang anak Sungai Brang Rea.^{3 7}) Unru lolos tetapi semakin terjepit. Setelah Pere orang suruhan Unru tertangkap dalam usahanya mencari makanan untuk Unru maka nasib Unru sudah hampir sepenuhnya berada di tangan Belanda. Demikianlah setelah melalui pengejaran dan persembunyian yang tak kenal lelah pejuang Sapugara yang berusia muda La Unru Sinrang Dea Mas Manurung ditangkap Belanda pada tanggal 9 April 1908 di

tempat persembunyiannya di dekat Bangkat Munte (di Petung Mampis).³⁸⁾ Dengan tandu beng dia dibawa ke Taliwang bukan karena tidak kuat berjalan. Dia tidak mau berjalan. Dia masih menyebut dirinya enti desa. Temperamennya yang keras masih diperlihatkannya sepanjang jalan menuju Taliwang. Di atas tandu dia duduk sambil mengisap rokok kegemarannya.³⁹⁾ Karena di Sumbawa dia masih dianggap berbahaya Unru pun dibawa ke Makassar untuk diadili. Akhirnya tanggal 14 September 1908 Unru disidangkan dan dibuang ke Cirebon (berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal JB Van Hautsz⁴⁰⁾ La Unru Sinrang alias Dea Mas Manurung meninggal di Cirebon beberapa tahun kemudian.

Akibat Perlawanan

Pembangkangan rakyat terhadap Belanda yang dihidupkan oleh karisma Unru sedikit banyak mempunyai akibat sampingan terhadap kewibawaan sultan. Walaupun secara ideologis tidak kelihatan jelas motif perlawanan Unru tetapi akibat keberaniannya rakyat mulai tumbuh harga diri dan keberaniannya melawan apa yang oleh mereka disebut kesewenangan atau pun kafir. Dinamika telah tumbuh. Sultan terjepit di antara kepentingan rakyat dan Belanda. Tata pemerintahan yang telah dipengaruhi oleh Belanda mempengaruhi tata kehidupan masyarakat tradisional yang telah lama berkembang.

CATATAN :

- 1) Helius Syamsuddin, *Perang Ngali dan Perang Sapugara Di Pulau Sumbawa tahun 1908*, Proyek IDSN Jakarta, 1981, halaman 4.
- 2) Ibid hal. 11.
- 3) Tim Penyusun Monografi Kabupaten Sumbawa, Monografi Kabupaten Sumbawa, 1975, hal. 12 - 13.
- 4) Hasil wawancara dengan H.L. Manjawakang, Dea Kalibelah, tanggal 8 Desember 1982.
- 5) Wawancara dengan H.L. Manjawakang, Dea Kalibelah, tanggal 8 Desember 1982.
- 6) Tim Penyusun Monografi Kabupaten Sumbawa, op cit halaman 131.
- 7) Ibid, halaman 18.
- 8) Wawancara dengan Iskandar, tanggal 19 Oktober 1982.
- 9) Sda.
- 10) Helius Syamsuddin, op cit hal. 11.
- 11) Ibid, hal. 12.
- 12) Loc cit, hal. 12.
- 13) Loc cit, hal. 12.
- 14) Wawancara dengan Iskandar, tanggal 19 Oktober 1982.
- 15) Ratsu, *Perang Sapugara*, Balai Pustaka, 1980, hal. 1980.
- 16) Ibid, hal. 21.
- 17) Wawancara dengan Bukil, tanggal 19 Oktober 1982.
- 18) Wawancara dengan Lalu Jame Ula, 19 Oktober 1982.
- 19) Wawancara dengan Iskandar, tanggal 19 Oktober 1982.
- 20) Sda.
- 21) Sda.
- 22) Sda.
- 23) Wawancara dengan Bukil, tanggal 19 Oktober 1982.
- 24) Helius Syamsuddin, op cit, hal. 13.
- 25) Ibid, hal. 14.
- 26) Ibid, hal. 14.
- 27) Ratsu, op cit, hal. 31.
- 28) Wawancara dengan Bukil, tanggal 19 Oktober 1982.

- 29) Ratsu, op cit, hal. 32.
- 30) Ibid, hal. 32.
- 31) Wawancara dengan Iskandar, tanggal 19 Oktober 1982.
- 32) Sda.
- 33) Heliussyamsuddin, loc cit, hal. 14.
- 34) Wawancara dengan Iskandar, tanggal 19 Oktober 1982.
- 35) Ratsu, op cit, hal. 37.
- 36) Heliussyamsuddin, loc cit, hal. 14.
- 37) Ibid, hal. 14.
- 38) Ibid, hal. 15.
- 39) Wawancara dengan Iskandar, tanggal 19 Oktober 1982.
- 40) Heliussyamsuddin, ibid, hal. 15.

BAB III PERLAWANAN DI BIMA

A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN

Bila ditinjau dari segi geografis Daerah Tingkat II Kabupaten Bima merupakan wilayah yang paling timur dari Propinsi Nusa Tenggara Barat. Secara kultural-historis menjadi satu dengan Daerah Tingkat II Dompu, namun secara administratif terpisah. Berbicara mengenai perlawanan di daerah Kabupaten Bima, berarti membicarakan pula perlawanan di daerah Kabupaten Dompu (Resminya terpisah secara administratif dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958). Kabupaten Bima dengan luas wilayah 4.870 km² terdiri dari 10 kecamatan, 143 desa dan 301 kampung berpenduduk 359.540 orang. Daerah ini terletak antara 117° dan 119° Bujur Timur dan 7° dan 9° Lintang Selatan yang berarti termasuk daerah G. Ramu (1.128 m).¹⁾ Melihat letak dan keadaan tanahnya yang sebagian besar berpadang rumput maka tidak mengherankan kalau penduduk selain bercocok tanam, beternak sapi, kerbau, kuda, kambing merupakan mata pencaharian yang terpenting di daerah ini.

Nama asli daerah Bima adalah Mbojo yang berasal dari kata "*Babuju*" yaitu setumpuk tanah yang tinggi merupakan "busut jantan" yang agak besar (dana ma babuju), tempat lokasi ketika raja-raja dilantik dan disumpah, yang letaknya di Dra (kini dekat Komplek Makam Pahlawan di Bima)²⁾

Di Sekitar tempat ini banyak diketemukan pecahan-pecahan keramik. Di sebelah timurnya (di atas bukit) merupakan komplek makam Raja-raja Bima yang kini telah dimasukkan sebagai salah satu dari 28 buah situs purbakala di Nusa Tenggara Barat. Setelah datangnya seorang pahlawan yang berasal dari Jawa pada tahun 1375 yang bergelar "Sang Bima" dan ber-

usaha mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di daerah ini, maka daerah ini keseluruhannya menjadi Kerajaan Bima.³⁾

Sekarang ini terdapat dua pengertian. Memang jika dilihat dari susunan/silsilah keturunan Raja-raja Bima, maka keturunan yang ke-10 terdapat nama "Sang Bima" yang kawin dengan Puteri Naga di Satonda, Kecamatan Sanggar bergelar "Sangaji". Suku Bugis Bima termasuk rumpun bangsa Melayu-Polinesia, sama dengan suku-suku Sumbawa dan Sasak. Suku Bugis ini adalah hasil pembauran antara penduduk asli dengan suku pendatang di antaranya dari Bugis, Makassar, Melayu dan lain-lain.

Beberapa naskah atau catatan menyatakan bahwa penduduk asli daerah Bima ialah: dou Donggo atau orang Donggo di lereng Gunung Soromandi (Donggo Ipa) dan lereng Gunung Lambibu (Donggo Ele) yang sekarang hanya tinggal beberapa keluarga, ada yang menganut Agama Islam dan ada pula yang menganut Agama Kristen. Mereka ini dikepalai oleh kepala suku yang disebut *ncuhi*. Ncuhi adalah seorang pemuka dan pemimpin agama yang bertindak pula sebagai dukun. Setelah pengaruh Gowa masuk ke Bima, *ncuhi* diganti dengan titel gelarang. Hubungan dengan Makassar terjadi sesudah masuknya Agama Islam di Bima. Perubahan nama *ncuhi* itu hanyalah perubahan nama semata dan sama sekali tidak berhubungan dengan kekuasaan lain-lain.⁴⁾

Di daerah Kabupaten Bima sebelum wilayah ini terbentuk menjadi sebuah kerajaan sepanjang diketahui terdapat lima *ncuhi*:

1. *Ncuhi Dara* yang mempunyai wilayah kekuasaan di bagian Bima Tengah;
2. *Ncuhi Banggupupa* yang mempunyai wilayah kekuasaan di bagian Bima Utara;
3. *Ncuhi Parewa* yang mempunyai wilayah kekuasaan di bagian Bima Selatan;

4. *Ncuhi Doro Wuni* yang mempunyai wilayah kekuasaan di bagian Bima Timur; dan
5. *Ncuhi Bolo* yang mempunyai wilayah kekuasaan di bagian Bima Barat.

Kelima *ncuhi* ini hidup berdampingan secara damai dan bila ada hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama mereka selalu mengadakan musyawarah.

Kerajaan Bima terbentuk tanggal 15 Rabiulawal 1050 H (5 Juli 1640 M).⁵⁾ Masyarakat terbagi menjadi 3 golongan:

1. Raja
2. *Bangsawan*
3. Rakyat biasa, yang dibagi lagi:
 - a. Rakyat biasa
 - b. *Dou*.
 - c. *Ada*

Golongan raja oleh masyarakat Bima dikenal dengan sebutan *ruma*, sedangkan pucuk pimpinan pemerintahan di kerajaan yaitu raja disebut *ruma sangaji*.⁶⁾

Golongan *bangsawan* setingkat lebih rendah dari *ruma sangaji*, namun demikian merupakan pembantu-pembantunya yang dapat dipercaya untuk memegang fungsi serta jabatan tertentu dan tertinggi dalam pemerintahan kerajaan. Hal ini terlihat setelah masuknya bangsa Belanda ke Pulau Sumbawa. Golongan ini diangkat menjadi *jeneli* (camat).

Dou dan *ada* mempunyai tugas dan kewajiban untuk berbakti kepada *ruma sangaji* maupun kepada golongan *bangsawan* terutama tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan istana baik ke dalam maupun ke luar. Mereka ini biasanya bersifat turun-temurun. Daerah Kabupaten Bima penduduknya 99% beragama Islam, selebihnya beragama Kristen dan Hindu Dharma. Itulah sebabnya adat istiadat masyarakat daerah ini boleh dikatakan selalu dipengaruhi dan dilandasi oleh ajaran-ajaran Agama Islam.

Seperti telah diutarakan bahwa yang menjadi raja pertama di daerah ini adalah Sang Bima dengan gelar Sang Aji yang kemudian diganti oleh puteranya bernama Indra Zamrud, sedangkan pemerintahannya didasarkan kepada adat. Sejak raja pertama sampai raja yang ke-26 bernama Ruma Tama Bata Wadu keadaan pemerintahan kerajaan lancar damai dan tenteram, rakyat hidup dalam suasana sejahtera, sedangkan agama yang dianutnya adalah Ciwa. Peninggalan berupa Candi Tempel di Wadu Paa Asa Kota mulut Teluk Bima menunjukkan bahwa pengaruh Hindu/Majapahit tidak ketinggalan di daerah ini. Keadaan pemerintahan yang aman dan tenteram itu berubah ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pamannya sendiri sehingga raja terpaksa melarikan diri ke Sulawesi dan akhirnya meminta perlindungan dari Raja Goa.

B. HUBUNGAN BIMA DENGAN MAKĀSAR

1. Masa keemasan Sebelum Islam

Pada abad ke-15 menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Bima mulai tumbuh menjadi satu kekuatan politik dan ekonomi sehingga boleh dikatakan sejajar dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia misalnya Kerajaan Aceh, Riau, Banten, Demak, Mataram, Banjar, Bone, Goa, Ternate, dan Tidore. Keberhasilan semacam ini berkat ketekunan masyarakatnya yang menjadikan daerah ini sebagai penghasil beras dan didukung oleh angkatan lautnya yang tangguh pada masa itu yang dikenal dengan nama "*pabise*". Kondisi seperti ini memberi dorongan bagi rakyat untuk melakukan kegiatan perdagangan sehingga tidak mengherankan armada dagang Bima mengarungi Nusantara yaitu pelabuhan-pelabuhan di pesisir Pulau Jawa (ke Barat): Tuban, Gresik, Sedayu dan Banten. Sedangkan ke timur sampai Maluku dan ke Utara adalah Kerajaan Goa. Barang-barang yang diperdagangkan yaitu beras, kain tenun di samping hasil hutan. Yang menjadi pusat perhatian pedagang-pedagang internasional pada masa pemerintahan Sultan Yusuf (1570).

Memang jika ditinjau dari segi geografis dan keadaan alamnya maka Pelabuhan Bima merupakan pelabuhan yang memungkinkan bagi armada dagang Nusantara singgah untuk mengisi bahan bakar baik pelayaran menuju ke barat, ke timur maupun ke utara dengan menyesuaikan musimnya. Dalam catatan Kesultanan Bima yang disebut "bo", yaitu catatan/tulisan peristiwa-peristiwa penting yang dialami kesultanan oleh pegawainya, disebutkan bahwa pada akhir abad ke-16 Kerajaan Bima mengalami masa keemasannya, rakyat hidup dalam keadaan aman, makmur dan pemerintahannya adil dan teratur. Pada masa itu pemerintahan di bawah kekuasaan "Sangaji" *Mantau Asi Sawo*". Pada saat itulah Bima mengadakan perjanjian persahabatan dengan Makasar yang berisi antara lain bahwa Bima tidak boleh berdagang dengan Kompeni Belanda dan bersedia memeluk Agama Islam. Sayang isi perjanjian setelah meninggalnya Sangaji Mantau Asi Sawo dilanggar dan dikianati oleh penggantinya yaitu Sangaji *Mantau Asi Peka* (paman putera mahkota).

Setelah Sangaji Mantau Asi Sawo meninggal terjadi kekosongan pemerintahan karena putera mahkota masih kecil dan belum cukup umur untuk memegang tampuk pimpinan kerajaan. Sebenarnya menurut adat yang berlaku di Bima bila putera mahkota masih kecil maka sebagai pimpinan yaitu Ruma Bicara. Tetapi beberapa bulan sebelum Sangaji Mantau Asi Sawo meninggal Ruma Bicara telah meninggal lebih dahulu. Oleh karena itu guna mengisi kekosongan tersebut maka sebagai pejabat Sangaji diangkat Mantau Asi Peka (Salisi) oleh Hadat menanti raja muda (jenateke) cukup syarat untuk dinobatkan sebagai sangaji. Namun Salisi setelah memegang tampuk pimpinan pemerintahan berusaha untuk memperkuat kedudukannya dengan jalan menyingkirkan penghalang-penghalangnya terutama jenateke. Menurut sumber yang dapat dipercaya jenateke diajak berburu di Mpori, Kecamatan Wera, kemudian dinyatakan hilang, padahal sebenarnya telah dibakar hidup-hidup. Usaha Salisi tidak sampai di situ. Adik putera mahkota yang bernama La Kai pun disingkirkan ke Kalodu.

2. Masa Islam

Sebagai telah diutarakan, Sangaji Mantau Asi Sawo berjanji pada Gowa untuk memeluk Agama Islam dan tidak mengadakan perdagangan dengan Kompeni. Rupanya perjanjian ini tidak dilaksanakan dan sengaja dilanggar oleh Sangaji Salisi. Sebaliknya raja ini mengadakan hubungan perdagangan dengan Belanda dan tidak mau memeluk Agama Islam. Suasana semacam ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa Belanda untuk berhubungan dengan Sangaji Salisi dan Belanda mulai mencoba mengganggu ketentraman dan ketertiban Kerajaan Gowa. Adanya hubungan baik antara Belanda dengan Salisi mengakibatkan sebagian dari keluarga Sangaji di Bima tidak memberi dukungan, malah mereka berusaha menentang Salisi. Calon raja yang baru (La Kai) yang telah mengungsi di Teke kemudian dipindahkan ke Kalodu untuk menghindari maksud Salisi yang hendak membunuh La Kai. Oleh pendukung-pendukungnya dilindungi dan dipersiapkan untuk menjadi raja.

Pada situasi dan kondisi pertentangan kedua belah pihak datanglah mubaliq dari Gowa Luwu, Tallo dan Bone sebagai pedagang dan tiba di Pelabuhan Sape pada tahun 1608 (11 Jumadil Awal 1028 H.)⁸⁾ Mereka menghadap Ruma Bumi Jara sebagai penguasa setempat dan menyampaikan sepucuk surat dari saudaranya bernama Daeng Malaba yang sudah lama tinggal di Bone dan telah memeluk Agama Islam. Pada dasarnya isi surat itu mengajak Ruma Bumi Jara beserta pengikut-pengikutnya untuk memeluk dan menganut Agama Islam seperti halnya masyarakat Bugis. Mendengar kedatangan orang Bugis itu La Kai calon raja baru yang sudah cukup dewasa turun dari Kalodu menuju Sape bersama La Mbila (Ruma Manuru Suntu) dan Ruma Bata Dompou untuk menemui Ruma Bumi Jara guna merundingkan pengangkatannya sebagai sangaji dan untuk merealisasi perjanjian persahabatan yang dilakukan oleh ayahnya dengan Raja Gowa. Dalam perundingan itu setelah dihubungkan dengan sikap Sangaji Salisi maka diputuskan sebagai berikut:

1. Bumi Jara, La Kai, La Mbila dan Manuru Bata akan memeluk Agama Islam terlebih dahulu kemudian mendirikan Kerajaan Bima yang beragama Islam
2. Mengusahakan bantuan Gowa untuk mewujudkan cita-cita itu
3. Sangaji Salisi harus digulingkan⁹⁾

Akhirnya mereka resmi memeluk Agama Islam dan mengucapkan kalimat Syahadat di Raba Parapi Sape pada tahun 1620 (10 Rabiul Awal 1030 H) dan sekaligus meresmikan namanya menurut nama-nama Islam yaitu:

1. La Kai mengubah nama menjadi Abdul Kahir Ruma Mabata Wadu;
2. La Mbila mengubah nama menjadi Jalaluddin. Keduanya dikuburkan di Diri Nteli;
3. Bumi Jara mengubah nama menjadi Awaluddin dikuburkan di Tonggorisa; dan
4. Manuru Bata Dompu mengubah nama menjadi Murtada(?), pembawa Agama Islam di Dompu dan Raja Dompu¹⁰⁾

Setelah calon raja (Jenateke Abdul Kahir) menerima Agama Islam sebagai pegangan hidupnya untuk dunia dan akhirat maka dengan sendirinya pengikut-pengikutpun memeluk dan menerima agama ini. Terkenallah "Bai'at Raba Parapi"

Setelah calon raja (Jenateke Abdul Kahir) menerima di mana seluruh pengikut Jenateke menyatakan diri masuk atau ajakan orang lain selain Jenateke Abd. Kahir Mabata Wadu sebagai pewaris dan pemilik tahta Kerajaan Bima yang syah. Dan bai'at tersebut berlaku sampai anak-cucu dan keturunannya mereka kelak.

Sekembali mereka dari Sape menuju Desa Kalodu bersama-sama misi Islam dari Gowa tersebut masyarakat Desa Kalodu diislamkan secara massal dan desa ini merupakan desa yang pertama menerima Agama Islam. Di desa ini didirikanlah sebuah masjid berbentuk segi empat bertiang delapan dan tidak

bermikrab sebagai monumen untuk memperingati jasa-jasa keempat penyebar Islam tersebut. Sejak saat itu hubungan terjalin dengan baik melalui para mubaliq tersebut. Dan untuk merealisasi permintaan bantuan Jenateke dalam melawan Sangaji Salisi, maka pada tahun 1616 ekspedisi pertama tentara Makasar tiba di Bima. Namun ekspedisi itu tidak berhasil sehingga dikirim lagi ekspedisi yang kedua tahun 1618. Sama halnya dengan ekspedisi pertama, penyerangan kedua ini pun mengalami kegagalan sehingga menyebabkan Abd. Kahir cs terpaksa meninggalkan Bima bersama sisa-sisa pasukan menuju Gowa melalui Sape di Mangakanda. Berkat bantuan orang Sape dan lebih-lebih orang Wera (La Seli) yang menyediakan fasilitas dan perbekalan Abd. Kahir cs. dapat diseberangkan ke Pulau Sangiang kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gowa. Sesampai di Gowa keempat keluarga Sangaji Bima itu diterima resmi oleh Raja Gowa dan kemudian mereka memperdalam ilmu pengetahuan Agama Islam terutama ilmu tasawuf pada Datuk Ri Banda dan Datuk Ri Trio.

Pada tahun 1626 (Muharam 1050 H) ekspedisi ke tiga dikirim kembali ke Bima di bawah pimpinan La Mbila dan Manuru Bata Dompou yang dibantu oleh panglima Gowa yang berpengalaman dengan persenjataan, perbekalan dan kekuatan yang cukup. Dalam pertempuran kali ini pasukan Sangaji Salisi (Raja Asi Peka) menderita kekalahan dan akhirnya raja beserta sisa-sisa pengikutnya ini dipimpin langsung oleh Manuru Bata Dompou yang kemudian dikenal sebagai pembawa dan penyiar Agama Islam di daerah ini. Berita kemenangan ekspedisi La Mbila tersebut segera disampaikan kepada Abd. Kahir dan Awaluddin yang masih berada di Gowa. Akhirnya pada bulan Rabiul Awal 1050 H. mereka meninggalkan Gowa menuju Bima bersama-sama ke dua gurunya Datuk Ri Banda dan Datuk Ri Tiro. Kedua guru agama yang tersohor ini berasal dari Minangkabau dan maksud kedatangannya selain untuk menyebarkan ajaran Agama Islam juga tidak lain hanyalah ingin menyaksikan muridnya (La Kai) yang akan memegang tampuk pimpinan kerajaan di Bima.

Setelah segala sesuatunya dipersiapkan maka pada tanggal 15 Rabiul Awal 1050 H. dilantiklah Jenateke Abd. Kahir sebagai Raja Bima yang ke-27 dengan gelar sultan. Pelaksanaan pelantikan ini disaksikan oleh para pejabat hadat bersama rakyat umum (di lapangan) di sebelah barat Istana Bima sekarang yang dikenal dengan nama "amba nae". Selain itu sebagai saksi utama ialah kedua gurunya Abd. Makmun gelar Datuk Ribanda dan Sulaiman Khatib Bungsu bergelar Datuk Ri Tiro. Abd. Kahir Mabata Wadu adalah raja yang pertama memeluk Agama Islam dan memakai gelar sultan seperti halnya di negara-negara Islam. Sejak saat itu raja bersama rakyat berusaha melaksanakan ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga Kesultanan Bima pada masa-masa berikutnya dikenal sebagai kerajaan/kesultanan yang menjalankan hukum-hukum/ajaran-ajaran Islam. Dan salah satu faktor yang menyebabkan ajaran Agama Islam dapat dijalankan di daerah ini tidak lain karena patuh dan taatnya masyarakat terhadap diri sultan yang mempunyai wibawa tinggi dan biasanya apa yang diperintahkan sultan selalu ditaati. Dan yang kedua ajaran agama ini dianut dan dihayati oleh masyarakat dengan penuh kesadaran bahwa satu-satunya agama yang dapat menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Sedangkan faktor berikutnya yaitu semua pejabat-pejabat teras kerajaan terlebih dahulu diajar dan di tempat dengan agama ini oleh kedua ulama Minangkabau tersebut yang kemudian disusul oleh rakyat jelata. Sedangkan semenjak tahun 1050 H. hubungan antara Bima dengan Makasar makin bertambah eratnya baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, lebih-lebih dalam bidang keagamaan. Dan pada masa pemerintahan sultan-sultan berikutnya hubungan ini tetap dipertahankan dan dalam bidang pemerintahan mulai disempurnakan dengan memasukkan unsur Islam dalam majelis hadat kerajaan sehingga dalam lambang dan bendera Kerajaan Bima tercermin hukum adat dan syara' (Islam) pada kedua sayap garuda. Sultan menetapkan pula hari-hari besar kerajaan yang disebut dengan "rawi ma tolu

samba'a. Biaya penyelenggaraan hari besar itu ditanggung oleh kas kerajaan. Hari besar resmi itu adalah:

1. Maulid Nabi Besar Muhammad SAW; perayaan ini sekaligus untuk memperingati: Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan pelantikan raja Islam pertama, dan peringatan kemenangan Islam dan Bima.
2. Hari Raya Idul Fitri
3. Hari Raya Qurban

Sultan telah menempatkan pula kedudukan para Da'i Islam sama sebagai hadat kerajaan. Fasilitas disediakan, jaminan hidup kekeluargaan ada kepastian sehingga semangat juang mereka tinggi. Maka tidak heran apabila seruan Sultan Abd. Kahir mengundang para da'i datang ke Bima didengar dengan antusias dan sungguh-sungguh sehingga para da'i berdatangan ke Bima. Pada masa pemerintahannya Syekh Umar Al Bantani berkunjung ke Bima.¹¹⁾

3. Masa Sesudah Penyebaran Islam

Telah dikemukakan bahwa hubungan kerajaan tersebut di samping terjalin melalui kerjasama ideologi, politik, sosial budaya dan agama. Maka untuk menjamin kelangsungannya, jauh sebelum itu ketika masih berada di Gowa Sangaji La Kai dikawinkan dengan puterinya. Hal semacam ini pun terjadi ketika puteranya, Abdul Kahir Sirajudin yang dikenal dengan Rumata Mantau Uma Jati, melangsungkan perkawinan dengan saudara Sultan Hasanuddin. Peristiwa perkawinan itu dilukiskan dalam "Lantara Bilang" Kerajaan Gowa dan Tallo yang diterjemahkan oleh Ligsvoet sebagai berikut. Pada tahun 1646 mulailah sebuah rangkaian perkawinan antara keluarga Sultan Bima dengan keluarga bangsawan-bangsawan Sulawesi Selatan yang berakibat mengikat Kerajaan Bima kepada kerajaan di Sulawesi Selatan itu.¹²⁾ Dengan demikian berarti apa yang dialami oleh Kerajaan Gowa seharusnya terjadi dialami pula oleh Kerajaan Bima. Itulah sebabnya Sultan Abd. Kahir Sirajudin memimpin sendiri bala bantuan tentara Bima ketika Gowa ber-

perang melawan Bugis yang dibantu oleh Belanda. Menurut catatan DV Van Bream Morries (1886): "..... dengan memberitahukan bahwa kedua kerajaan pertama ialah kedua tunggangan dari Raja Bima Ambela Abd. Kahir Sirajudin, setelah wafat disebut Uma Jati. Raja ini menikah dengan puteri Raja Gowa M. Said. Maka pada waktu Gowa berperang melawan Bone dalam tahun 1646 Bima memberikan bantuan pada Gowa dan pada peristiwa itu orang-orang Bima mengirim bantuan yang dipimpin olehnya. Dengan mengendarai kuda coklat yang dinamakan Kapitang, kuda mana yang berasal dari daerah berbatu dari Gunung Api Sangiang telah melakukan keberanian-keberanian yang menakjubkan, dan karena itulah dijelaskan oleh orang-orang Gowa tidak dikalahkan oleh orang-orang Bone".¹³⁾

Dalam sejarah Gowa yang dituliskan oleh Abd. Rajak Daeng Patundru dituliskan: "Oleh karena kemurkaan Sultan Hasanuddin yang sangat memuncak terhadap Sultan Buton yang sejak lama memihak Belanda dan juga memberi perlindungan terhadap Arung Palaka di Buton. Beberapa tahun lamanya maka lewat pertengahan tahun 1666 Baginda Sultan Hasanuddin mengirimkan sebuah armada besar yang terdiri dari 700 buah kapal perang dan 20.000 orang tentara di bawah pimpinan laksamana bernama Karaeng Bonto Maranau bersama Datuk Luwu yang bernama Settia Raja Sultan Alimuddin dan Sultan Bima yang keduanya selaku laksamana muda ke Buton untuk menyerang negeri itu."

Jika dilihat adanya hubungan kerjasama semacam ini bahu-membahu bersama rakyat antara Sultan Bima dengan Sultan Hasanuddin berarti secara politis Bima berada di bawah kekuasaan Raja Gowa, artinya Gowa justru mengharapkan Bima dapat mensuplai beras ke Makasar dan tidak boleh berdagang dan bersahabat dengan Belanda. Penguasaan seperti ini berarti penguasaan secara tidak langsung, hanya bersifat administratif sebab Kerajaan Bima berkesempatan untuk

mengembangkan dirinya sesuai dengan adat-istiadat dan ketentuan yang berlaku di daerahnya.

Perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan monopoli Belanda untuk menguasai perdagangan di Indonesia bagian timur yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin juga adalah perlawanan rakyat Bima terhadap kekuasaan yang sama. Tatkala Sultan Hasanuddin dengan terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667 sebagai tanda menyerah kepada C. Speelman, Sultan Bima Abd. Kahir Sirajudin tidak mau mengakhiri dan menandatangani perjanjian itu. Dia terus melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, bahkan mengadakan perjanjian dengan Raja Balanipa yang menyatakan bahwa Belanda musuh bersama; bila satu diserang berarti serangan terhadap keduanya. Sikap yang tegas dari sultan ini menyebabkan dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1669, Belanda terpaksa membuat perjanjian tersendiri dengan Kesultanan Bima di Batavia. Isinya antara lain: Bahwa Kesultanan Bima mengakui hal dipertuan Belanda di Batavia.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya tahun 1667 dan tahun 1669 oleh Sultan Hasanuddin dan Sultan Bima maka sejak itu Bima resmi menjadi wilayah kekuasaan Kompeni Belanda. Meskipun demikian tidak berarti bahwa perlawanan rakyat di kedua kesultanan tersebut terhadap Kompeni berakhir, malah mereka melanjutkan perjuangannya di mana saja mereka bertemu dengan armada dagang Belanda.

4. Bima Di Masa Penjajahan Belanda

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 oleh Sultan Hasanuddin Belanda menganggap bahwa lalu-lintas perdagangan di Indonesia bagian timur dapat dikuasai, lebih-lebih pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kenyataannya tidak demikian; malah orang-orang Makasar yang berada di Maluku tidak mau berdagang dengan Kompeni Belanda. Karenanya mereka tetap mengadakan perlawanan terutama di laut. Hal yang serupa terjadi pula di Bima

di mana sebelum datangnya bangsa Belanda penduduk bebas berdagang dengan daerah sekitarnya maupun bangsa asing lainnya tetapi sekarang dilarang oleh Belanda. Tindakan Belanda yang ingin menguasai dengan monopoli segala perdagangan dan perekonomian Kesultanan Bima. Keadaan seperti ini memancing ketidakpuasan masyarakat Bima lebih-lebih setelah adanya peraturan Belanda yang membebaskan kapal-kapal Belanda berlabuh dan mencari muatan di Bima tidak dikenakan pajak. Itulah sebabnya salah satu kapal layar Belanda "Dorados" disita oleh pedagang yang ada di wilayah Kesultanan Bima berikut semua senjata dan meriam.¹⁴⁾

Dengan kejadian itu Residen Belanda di Makasar memanggil Sultan Bima dan Dompu yang diwakili oleh Tureli Nggampo. Pada tanggal 12 Juni 1674 diadakanlah perjanjian antara Kesultanan Bima dan Dompu dengan pihak Belanda. Pada hakikatnya perjanjian ini isinya sama dengan tahun 1669 yaitu:

1. Atas nama pribadi dan pemerintah, Sultan Bima minta maaf atas adanya permusuhan dahulu khususnya permusuhan yang terjadi pada waktu Belanda berperang dengan Makasar di mana Bima membantu Makasar
2. Mulai sekarang Sultan Bima dan Dompu akan patuh kepada Belanda
3. Hubungan surat-menyurat antara Kesultanan Bima dan Makasar dilarang
4. Para sultan tidak akan memungut bea cukai atas kapal-kapal Belanda
5. Sultan Bima harus membayar ganti rugi atas perampokan kapal layar "Dorofus" oleh rakyat yang ada di bawah daulatnya
6. Kesultanan Bima mengakui hak yang dipertuan Belanda di Batavia.¹⁶⁾

Tindakan Belanda tidak saja sampai di situ. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak, dalam

tahap-tahap berikutnya Belanda melaksanakan suatu politik yang dikenal dengan "*gun boat policy*" yaitu suatu siasat diplomatik licik dengan menggunakan kekuatan secara halus untuk menunjang serta memberikan tekanan di meja perundingan. Di lain pihak penguasa setempat seolah-olah diakui berdaulat namun sudah jelas maksudnya agar penguasa setempat memberikan konsesi-konsesi yang menguntungkan. Dalam kondisi dan posisi yang demikian itu para raja diajak ke meja perundingan.

Pada permulaan abad ke-19 (antara tahun 1811–1851) pada masa pemerintahan Sultan Ismail, dengan siasat *gun boat policy* itu Belanda memaksakan sultan untuk menandatangani suatu perjanjian baru. Di meja perundingan itu Belanda menyodorkan rancangan dari isi perjanjian yang diinginkan Belanda antara lain:

1. Kerajaan Bima tidak mengganggu kapal-kapal Belanda yang berlabuh maupun yang berlayar di perairannya
2. Kerajaan Bima wajib membantu Belanda untuk memerangi bajak laut
3. Kerajaan Bima memberikan tanah dekat pelabuhannya tempat untuk mendirikan benteng Pelabuhan *Lawa Due* Bima. Dalam daerah pelabuhan itu Belanda mempunyai hak Extra Territorial
4. Kerajaan Bima harus memberikan bahan-bahan perdagangan berupa beras, ternak, kulit ternak, kulit ular, kulit buaya sebagai upeti. Bahan-bahan itu selama enam bulan dikumpulkan dan diserahkan lebih dahulu di lapangan Sera Suba, kemudian diangkut oleh kapal-kapal Belanda. diangkut oleh kapal-kapal Belanda.
5. Pengangkatan Raja/Sultan Bima terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur Belanda di Makasar

Kemudian dituntut pula sangsi bahwa Sultan Ismail harus memilih satu di antara dua alternatif yaitu:

1. Bila rancangan isi perjanjian itu tidak dapat diterima maka Kerajaan Bima akan ditundukkan dengan kekuatan militer seperti halnya Kerajaan Gowa dan Bone; atau
2. Bila diterima Belanda bersedia mengakui kedaulatan atas rakyat dan tanah Kerajaan Bima.

Demikianlah rancangan perjanjian yang dipaksakan pada Sultan Ismail di atas meja perundingan. Belanda hanya tinggal menunggu jawaban sultan ya atau tidak; jawaban mana sudah pula ada sangsi-sangsinya.

Kelicikan cara berpolitik dan berdiplomasi Belanda itu menyudutkan posisi sultan. Berdasarkan rancangan perjanjian itu maka kedaulatan dan kebebasan Kerajaan Bima dirampas secara halus. Kedua sangsi itu hendaknya sama saja karena kedua sangsi itu menempatkan Kerajaan Bima di bawah Kerajaan Belanda. Terutama pada sangsi kedua kelihatannya lemah, tetapi sultan dipaksakan seolah-olah sultan mengakui kedaulatan Belanda atas kemauan sendiri. Hal itu bertentangan sekali dengan semangat rakyat Bima yang sejak Sultan Abdul Kahir Sirajudin melawan Belanda dengan gigih dan keberanian yang luar biasa.

5. Bima Menjadi Jajahan Belanda

Tuntutan Belanda yang berisi 5 ketentuan dengan terpaksa diterima oleh Sultan Ismail. Mulai saat itu resmilah Belanda menguasai Bima. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan hadat yang telah berjalan sejak terbentuknya Kerajaan Bima maka sultan masih leluasa memerintah rakyat dan memang kepatuhan rakyat terhadap sultan merupakan ciri khas di daerah ini. Sesuai dengan perjanjian tersebut Belanda hanya mengawasi pelabuhan dengan menempatkan bentengnya di Pelabuhan Lawa Due. Akan tetapi rupanya isi perjanjian itu dalam prakteknya sulit dijalankan oleh sultan. Antara lain disebabkan:

1. Pengumpulan bahan-bahan upeti mengakibatkan kegelisahan rakyat karena bahan-bahan tersebut diserahkan dengan cuma-cuma dan tidak diperkenankan untuk diperdagangkan secara bebas.
2. Barang-barang tersebut harus berkualitas baik sehingga laris di pasaran dengan harga yang tinggi.
3. Kewajiban Kerajaan Bima untuk membantu Belanda dalam memerangi bajak laut padahal sebenarnya bajak laut tersebut adalah saudara dan kerabat sendiri dari Makasar.

Kesulitan-kesulitan tersebut makin bertambah sepeninggal Sultan Ismail yang diganti oleh Sultan Abdullah dan dilanjutkan oleh Sultan Abdul Azis. Dalam pada itu Sultan Abd. Azis meninggal pula, sedangkan putra mahkota masih kecil. Untuk kedua kalinya Kerajaan Bima mengalami *vacuum of power*. Sesuai dengan ketentuan hadat yang berlaku dalam keadaan seperti itu diangkatlah Raja M. Yacub gelar Kapenta Wadu sebagai pemegang kerajaan yang digambarkan sebagai seorang yang berkemauan keras dan taat terhadap ajaran agama. Kemauan keras pemangku kerajaan ini terbukti dalam tindakan-tindakannya menghadapi Belanda yaitu:

1. Membubarkan armada Kerajaan Bima agar tidak dapat dipergunakan oleh Belanda untuk memerangi pejuang Makasar (Gowa dan Bone) yang terus melakukan perlawanan dengan Belanda sebagai bajak laut
2. Para pejuang Makasar itu dilindungi dan diizinkan bermukim di Flores Barat dan berperan sebagai mubalig untuk menyebarkan Agama Islam di sana
3. Upeti dikurangi sedikit demi sedikit
4. Gerak-gerak penguasa Belanda di Bima dibatasi¹⁷⁾

Tindakan drastis yang dilakukan oleh pemangku kerajaan itu berlawanan dengan isi perjanjian yang telah disetujui oleh Sultan Ismail. Tindakan yang demikian berarti pertanda bahwa perjanjian yang telah disetujui bersama tidak diterima oleh

rakyat Bima. Hal ini dapat dimengerti oleh Belanda sehingga pada tahun 1874 Belanda membebaskan Kerajaan Bima dari upeti berupa penyerahan hasil hutan.

Sementara itu Jenateke Ibrahim pada tahun 1811 dinobatkan menjadi Sultan Bima. Pada saat itu beliau berhasil menghapuskan keharusan memerangi bajak laut. Meskipun demikian posisi kerajaan mulai lemah dengan ditandatanganinya kontrak baru pada tanggal 29 Desember 1905 yang menggantikan kontrak-kontrak sebelumnya. Isinya antara lain bahwa Kerajaan Bima dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda sesuai dengan keinginan Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu agar seluruh Indonesia di bawah satu kekuasaan setelah selesainya Perang Aceh. Setelah Perang Aceh selesai (1904) datang lagi utusan Belanda dari Batavia yang meminta kepada Sultan Bima agar mau memperbaharui perjanjian persahabatan yang telah ada. Pada saat itu di Bima diperintah oleh sultan yang ke-38 bernama "Ibrahim Ma-waataho Parange" yang artinya Sultan Ibrahim yang mempunyai perasaan halus, berperangai baik dan berbudi pekerti baik, memutuskan perkara dengan adil, mempunyai kasih sayang terhadap rakyat dan sangat mentaati ajaran-ajaran Agama Islam. Itulah sebabnya warna dan corak pemerintahan yang dijalankannya dipengaruhi oleh pribadi dan perangai yang demikian. Utusan Belanda menyodorkan perjanjian yang berisi 16 pasal tanpa memikirkan lebih lanjut akibatnya. Sultan terpaksa menandatanganinya. Isi perjanjian tersebut antara lain:

1. Bahwa Sultan Bima mengakui bahwa Kesultanan Bima merupakan bagian dari Hindia Belanda. Baik di darat maupun di laut memakai bendera Belanda.
2. Sultan Bima berjanji senantiasa tidak melakukan kerjasama dengan bangsa kulit putih lain.
3. Apabila Gubernur Jenderal Hindia Belanda menghadapi perang maka Sultan Bima akan mengirimkan bala bantuan.

4. Sultan Bima berjanji tidak akan menyerahkan wilayah Kesultanan Bima kepada bangsa kulit putih lain kecuali Belanda

Perjanjian tersebut disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia pada tanggal 6 Februari 1908 yang dikenal dengan *Contract Met Biema*.

Niat Belanda untuk mengadakan pembaharuan perjanjian persahabatan itu bagi Sultan Ibrahim tidak menaruh kecurigaan apa-apa lebih-lebih pada pasal 11 ditekankan adat-istiadat yang berlaku dalam Istana Kesultanan Bima misalnya perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha dan peringatan Maulid Nabi Saw. tetap dihormati dan Pemerintah Belanda tidak melanggarnya. Namun demikian perjanjian ini sebenarnya merupakan batu loncatan bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk memperkuat kedudukan dan kekuasaannya dalam menindas dan menjajah bangsa kita. Setelah perjanjian disyahkan maka Pemerintah Hindia Belanda menempatkan seorang kontrolir sampai pada saat-saat perang kemerdekaan yang berarti kekuasaan Belanda atas Kesultanan Bima bersifat *indirect rule* (kekuasaan tidak langsung).¹⁹)

Dengan demikian meskipun secara *indirect rule* resmiah Kerajaan Bima di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

C. UJUD PERLAWANAN

Seperti telah dikemukakan, perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (sultan dengan pemerintah Hindia Belanda), pada umumnya mengakibatkan timbulnya reaksi dari rakyat karena menyangkut hidup dan penghidupan mereka. Ujud atau bentuk perlawanan di daerah Kabupaten Bima dan Dompu sangat erat hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi, sosial budaya, agama, adat istiadat dan situasi politik pada masa itu. Keadaan-keadaan tersebut ada yang merupakan masalah yang bersifat lokal dan ada pula yang mempunyai hubungan dengan situasi nasional bahkan

dengan situasi internasional. Situasi dan kondisi di luar negeri, di Eropa pada umumnya jelas mempunyai akibat dan pengaruh di Indonesia sampai ke daerah-daerah.

Memang jika keadaan tersebut dihubungkan dengan kebijaksanaan dan program yang diterapkannya di Indonesia maka selalu terdapat penyimpangan-penyimpangan serta kepincangan-kepincangan yang tidak sesuai seperti telah disetujui bersama sehingga tidak mengherankan timbulnya aksi dan perlawanan dari pihak penguasa di daerah (pribumi), lebih-lebih dari rakyat. Apabila pihak kolonial menjalankan program yang merugikan kepentingan perekonomian rakyat dengan sendirinya rakyat yang merasa dirugikan itu akan mengadakan reaksi dan perlawanan. Demikian pula bila pihak kolonial ingin memaksakan agar kebudayaan barat diterapkan di Indonesia, pasti akan ditentang dan menimbulkan reaksi menerima atau menolak. Apalagi Indonesia sejak dahulu kala telah memiliki kebudayaan yang tinggi sejajar dengan kebudayaan-kebudayaan lain di dunia. Itulah sebabnya kadang-kadang perlawanan dan reaksi dari rakyat itu terjadi antara sesama pribumi disebabkan pihak kolonial membantu dan memihak kepada salah satu golongan pribumi tersebut (raja dengan raja atau raja dengan golongan lainnya). Lebih-lebih dalam masalah perebutan tahta kerajaan atau batas wilayah di mana antara keduanya sengaja diadu dan dibesar-besarkan persoalannya. Dan yang sangat menyinggung perasaan bangsa Indonesia apabila pihak kolonial selalu mencampuri masalah-masalah yang berhubungan dengan kepercayaan agama yang dianut oleh rakyat.

Jika ditinjau secara umum, maka perlawanan-perlawanan tersebut, dilatarbelakangi oleh masalah-masalah: sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial-politik. Empat perlawanan yang dikemukakan di sini menyangkut masalah sosial ekonomi, sosial budaya dan masalah politik. Ujud perlawanan yang dilatarbelakangi sosial ekonomi, budaya dan politik adalah Perang

Ngali, Perang Dena dan Perang Soritu. Perang tersebut merupakan perang melawan kolonial Belanda. Tegangan sosial, ekonomi, politik dan kultural yang dipaksakan oleh Belanda menggoncangkan susunan masyarakat dan nilai-nilai tradisional serta agama yang berlaku di masyarakat. Pajak yang dikenakan kepada rakyat oleh pemerintah kolonial terlalu tinggi (pengganti upeti yang sebelumnya disetujui oleh sultan) rakyat menganggap bahwa membayar pajak kepada Pemerintah Belanda yang tidak beragama Islam adalah "haram" meskipun sebenarnya pelaksanaan pembayaran ini melalui sultan. Memang kenyataannya yang berkuasa secara formal adalah sultan namun untuk melaksanakan kekuasaan tersebut pejabat-pejabat Belanda memegang peranan penting. Artinya apa yang menjadi keinginan Belanda harus dijalankan dan dipenuhi oleh sultan sehingga di sini letaknya politik adu-domba mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda.

Dalam situasi yang demikian itu muncullah perlawanan dari rakyat Ngali, Kala, Dena dan sebagainya yang tidak lain semata-mata untuk mempertahankan agama, adat-istiadat, keaulata dan kemerdekaan yang dimilikinya selama ini. Di beberapa tempat rakyat tidak sabar lagi mengikuti dan menuruti peraturan-peraturan Pemerintah Belanda yang dikeluarkan atas nama sultan. Belanda selalu siap membantu sultan bila terjadi perlawanan secara fisik dan selalu beralasan bantuan tersebut diberikan untuk menegakkan wibawa sultan. Keadaan semacam ini dialami oleh Sultan Ibrahim dan para pejabat Istana yang mengatakan bahwa perlawanan rakyat itu semata-mata untuk meruntuhkan dan menghancurkan pemerintahannya. Siasat dan kelicikan Pemerintah Hindia Belanda itu berhasil baik sehingga bila terjadi perlawanan maka yang berhadapan adalah rakyat dengan sultan, sedangkan pihak Belanda hanya dalam batas membantu guna mengembalikan wibawa sultan. Demikianlah yang akan dapat kita saksikan pada uraian-uraian berikut ini sekalipun sebenarnya sultan selalu ber-

pihak kepada rakyat dengan cara dan wibawanya sendiri. Yang menonjol dari perlawanan-perlawanan tersebut ialah Perang Ngali di mana para pelopornya terdiri dari ulama dan pemimpin agama. Yang unik dalam perlawanan ini ialah tempat berkumpul dan bermusyawarah massa rakyat selalu di Mesjid Raya Ngali yang menandakan bahwa peperangan ini selain berlatar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik, juga berlatar belakang agama. Semboyan dan seruannya selalu bernafaskan Islam serta setiap saat mengumandangkan takbir dan tahlil sebagai suatu pertanda bahwa peperangan ini adalah Perang Sabilillah.

1. Perang Ngali, 1908

Kekerasan pihak Belanda untuk melaksanakan kehendaknya dengan memperalat Sultan Bima supaya rakyat membayar pajak yang dikehendaknya menimbulkan kegusaran di kalangan rakyat. Kehendak Sultan Ibrahim yang selama ini selalu mereka turuti terpaksa dibantahnya. Utusan sultan yang datang ke Ngali menyampaikan pesan sultan diusir dan dikejar-kejar oleh rakyat. Suatu peristiwa yang sangat menyinggung perasaan sultan. Hal yang demikian dianggapnya sebagai awal pemberontakan.

Sementara itu rakyat Ngali di bawah pimpinan Haji Abdulkarim yang berasal dari Pulau Kei dan dua orang buangan asal Aceh dan Raja Amin, paman sultan sendiri, mengorganisasi diri bersiap-siap berperang melawan Belanda. Pagar desa diperkuat dan dijaga ketat. Mereka jadikan Mesjid Ngali sebagai markas besarnya. Seluruh rakyat laki-laki dan wanita dewasa dibangkitkan rasa harga dirinya dengan menggunakan gema perang fisabilillah sebagai motif perjuangan. Mereka bertekad untuk mati syahid di jalan Allah dari pada tunduk kepada kehendak Belanda yang dianggap mereka tidak adil. Mereka tidak rela membayar pajak lima prosen dari penghasilannya. Mereka juga tidak rela didaftar karena menurut desas-desus yang berkembang pendaftar bertujuan untuk menjadikan

mereka kuli dan budak di daerah lain. Untuk mengobarkan semangat perang dan perasaan anti terhadap kolonial Belanda setiap hari mereka berpawai keliling desa sambil membaca sholawat, tahlil dan takbir dan lagu-lagu agama. Usaha mereka memang berhasil. Sebab tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga anak-anak dan wanita semakin bersemangat dan ikhlas menyerahkan jiwa dan raga suami mereka bagi kehormatan warga masyarakat dan agama yang mereka sukikan.

Berita penolakan utusan sultan mengenai persiapan mereka untuk berperang telah membangkitkan kemarahan di pihak Belanda. Gubernur Sulawesi, Swart, memutuskan datang sendiri ke Bima untuk memerangi rakyat yang berontak. Untuk memadamkan perlawanan di Bima itu Swart mempersiapkan tiga brigade marsose dari Makasar dan dua brigade lagi dari Kendari. Pada tanggal 16 Pebruari 1908 dengan menumpang kapal KPM "*Both*", Swart bersama ketiga brigade marsose bertolak dari Makasar menuju Bima. Mereka sampai di Bima pada keesokan harinya dan ketiga brigade tentara diasramakan dalam sebuah sekolah di Kampung Benteng. Kemudian datang pula kedua brigade yang bertolak dari Kendari dengan menumpang kapal "*Dog*". Kelima brigade itu ditempatkan di bawah pimpinan Lettu J.H.C. Vastenou dan Peltu M. Schouten. Kekuatan lima brigade itu ditambah lagi dengan tentara marinir yang diangkut dengan kapal "*Siboga*" yang dipimpin oleh Letnan Laut Kelas Satu Pieren.¹⁾ Sejak tiba di Bima tanggal 17 Pebruari 1908 Gubernur Swart aktif mengadakan perundingan dan konsultasi dengan Sultan Ibrahim. Dari perundingan dan konsultasi yang berjalan dua hari lamanya Ngali harus diserbu.

Demikianlah pada tanggal 19 Pebruari 1908 dengan disertai kelima brigade tentara, Swart menyerbu Ngali dari dua jurusan utara dan selatan. Swart bermaksud menjepit Ngali dengan taktik kakatua. Kebetulan juga Ngali diperkuat dengan

pagar kayu dan duri terbuka dari empat jurusan timur, barat, utara dan selatan. Tiap-tiap pintu kampung dijaga oleh pasukan yang berpakaian serba putih dengan bersenjatakan tombak, keris, pedang dan parang. Beberapa orang di antaranya bersenjatakan senapan dan pistol yang diperoleh dalam hubungan dagang dengan Singapura. Bagi rakyat Ngali pakaian putih berarti siap sedia mati syahid di jalan Allah. Kedatangan tentara Belanda disambut dengan tempik-sorak yang diselangsing oleh sholawat dan kalimat "Allahu Akbar" berulang-ulang. Tak sedikit pun mereka gentar menghadapi tentara Belanda yang bersenjata lengkap dan yang telah berpengalaman itu.

Memahami situasi yang jelek itu tentara Belanda pun tidak langsung menyerbu. Mereka berusaha menghujani Desa Ngali dengan tembakan-tembakan senapan dan mortir dari jarak tembak. Dengan berbekal keberanian dan keyakinan akan jalan yang ditempuhnya, rakyat Ngali maju menyongsong musuh yang tiada putus-putusnya. Dengan taktik maju dan tiarap sambil berlindung di balik pematang sawah yang becek mereka berhasil mendekati musuh. Tetapi betapapun keberanian mereka tentara Belanda yang sudah terlatih dan bersenjata lengkap bukanlah tandingan mereka. Setiap mereka yang mendekat dengan mudah disapu oleh tentara Belanda. Rakyat semakin terdesak disusul dengan kobaran api yang melahap rumah-rumah yang terbuat dari bambu dan kayu dengan atap rumbia dan santek bambu. Suara tempik-sorak rakyat Ngali yang maju menyerbu menyongsong musuh yang menerjang memasuki kampung yang sedang terbakar bergalau dengan suara pekik dan tangis wanita dan anak-anak yang berhamburan ke luar rumah yang sedang terbakar. Letusan usuk bambu yang terbakar dengan suara letusan senapan membahana menambah seramnya keadaan. Para komandan pasukan Belanda juga akhirnya tidak dapat menguasai keadaan. Perang bersusah satu lawan satu dengan mempergunakan senjata tajam dengan rakyat Ngali tidak dapat dihindari lagi. Rakyat Ngali di bawah pimpinan mereka yang fanatik

seperti Haji Se, Haji Abdulkarim maju dengan penuh semangat dan keberanian ke tengah-tengah pasukan Belanda yang hilang keseimbangannya karena kebingungan.

Dalam situasi yang demikian senjata api kurang berfungsi lagi. Namun karena pasukan Belanda terdiri dari tentara yang profesional dan berpengalaman, dengan cepat mereka dapat menguasai keadaan. Pertempuran yang dimulai kira-kira sekitar pukul 12.00 dapat diselesaikan dengan tuntas kira-kira sekitar pukul 15.45. Pada pukul 15.45, Kampung Ngali dapat dikuasai sepenuhnya. Dari kedua belah pihak menderita beberapa orang korban. Di antaranya dari pihak rakyat Ngali gugur sebagai kusuma bangsa pemimpin-pemimpin mereka Haji Se, Haji Abdulkarim dan kedua orang Aceh. Mereka dimakamkan di muka mimbar mesjid Ngali. Sedangkan di pihak Belanda beberapa orang prajurit gugur bersama komandannya, Lettu J.H.C. Vastenou. Prajurit yang gugur langsung dikuburkan di Kampung Ngali. Sedangkan jenazah Vastenou dibawa ke Bima pada hari itu juga dan selanjutnya dikirim ke Makasar untuk dimakamkan di sana. Kampung Ngali ditinggalkan tentara Belanda dalam keadaan kosong dengan sisa kebakaran yang di sana-sini masih mengepulkan asap. Sisa rakyat Ngali yang tewas dan mengungsi yang laki-laki ditangkap dan ditawan dibawa ke Bima. Setelah diperiksa sebagian dilepas dan selebihnya diadili dan dihukum. Di antaranya ada yang dibuang ke luar daerah (Sulawesi).

2. Perang Dena, 1908

Beberapa hari kemudian setelah Perang Ngali dipadamkan kira-kira pada akhir bulan Pebruari 1908 timbul pula Pemberontakan Dena di Kejenelian Belo, Kesultanan Bima. Pemberontakan Dena mempunyai sebab dan motif yang sama dengan Perang Ngali. Pada umumnya mereka segan membayar pajak yang dirasakan mereka terlalu tinggi, menolak registrasi penduduk dan tidak mau tunduk di bawah pemerintahan Belanda.

Di bawah pimpinan Haji Abrurrahim Abu Sara, Haji Usman Ruma La Beda dan Haji Abdul Azis Abu La Sarah, rakyat

Dena menolak segala perintah Belanda yang disampaikan melalui kekuasaan Sultan Bima sambil mengadakan persiapan untuk berperang. Tindakan mereka dianggap oleh sultan dan Belanda sebagai suatu pemberontakan yang merongrong kewibawaan sultan. Setelah dirundingkan Pemerintah Belanda dan Sultan Ibrahim sepakat untuk menyerang Dena. Mereka menyadari Belanda pun takkan segan-segan menghukum Dena seperti Ngali. Karena itu persiapan mereka lebih tangguh dengan membina kesetiakawanan yang kukuh yang didasarkan agama. Fanatisme agama dibangkitkan dengan berserah diri sepenuhnya kepada takdir yang akan ditimpakan Allah kepada mereka. Menang atau kalah bukan menjadi masalah, sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Allah semata. Yang penting bagi mereka adalah membela kebenaran dan menuntut keadilan. Karena tuntutan mereka tidak dapat dicapai secara damai maka melalui peperangan pun mereka siap sedia dengan menyerukan perang fisabilillah. Menurut keyakinan mereka mati berperang dengan orang kafir merupakan suatu jaminan untuk masuk surga. Akibat keyakinan mereka itu tak seorang pun yang gentar, bahkan perang yang akan terjadi selalu diharapkan. Ketika Belanda memutuskan hendak menyerang mereka pada umumnya mereka sudah siap untuk menerimanya.

Pada tanggal 25 Februari 1908 Swart mengirim lima brigade marsose dan marinir dengan kapal "*Siboga*" ke Rasanggaro. Hari itu juga Ranggara dapat dipatahkan. Kemudian keesokan harinya perlawanan di Dena dapat dipatahkan pula. Rakyat Dena memberi perlawanan dengan gagah berani. Belanda menyerang dari arah tenggara melalui Gunung Lebo. Sebelum tentara Belanda tiba rakyat Dena yang bergabung dalam barisan Sabilillah sudah siap menanti. Tetapi tempat penantian agak jauh ke selatan kurang lebih 1 km dari jalan datangnya orang Belanda. Tembakan pertama oleh Lede Ama Ibu yang langsung meminta seorang korban dari pihak Belanda. Tentara Belanda yang terus maju mendesak mundur orang-orang Dena. Pertempuran beralih ke tengah-tengah Sungai Campa. Rakyat Dena mencoba memberi perlawanan sambil

berlindung pada tebing-tebing dan batu yang ada di sungai. Di dalam sungai ini Lode Oma Ibu tertembak. Sementara perang sedang berlangsung tiba-tiba datang air bah. Salah seorang rakyat Dena, Duru Anak Hamu tewas dihanyutkan banjir. Kedua pasukan yang berlawanan berusaha menghindarkan diri dari banjir dan Belanda mengalihkan penyerangan ke Karia Huu. Tetapi ketika sampai di sana ternyata rakyat Dena di bawah pimpinan Haji Usman Ruma La Beda telah mundur ke Tolo Sera. Belanda terus mengejar mereka dan pertempuran terjadi lagi. Dari kedua belah pihak beberapa orang luka-luka. Tak lama kemudian tentara dapat menguasai keadaan. Rakyat Dena terdesak terus sampai tentara Belanda berhasil memasuki kampung. Rumah-rumah dibakarnya. Haji Usman dan kawan-kawannya beserta berpuluh-puluh pengikutnya tertawan. Rakyat yang dapat meloloskan diri mengungsi ke Oi Wulu kurang lebih 5 (lima) km di sebelah barat Desa Dena.

Dalam gerakan pembersihan yang dituntut oleh Haji Hamu asal Sila, Belanda mendatangi rumah Haji Abdurrahim yang dijadikan rakyat sebagai pusat pertahanan. Di situ Belanda menembak mati Haji Abdurrahim beserta 28 orang laki-laki dan perempuan yang sedang berlindung di situ. Dari situ pasukan Belanda bergerak ke markas pasukan Sabilillah yang kedua. Markas kedua itu terletak di sebelah utara mesjid. Rumah yang dijadikan markas itu adalah milik Ompu Anco. Markas itu dijaga dan dikawal oleh Ompu Anco sendiri. Dia terkenal seorang yang kebal dan berani. Di dalamnya bersembunyi 15 orang laki-laki perempuan. Walaupun Belanda menembaknya tetapi karena kekebalannya Ompu Anco tidak terluka peluru. Namun demikian dia juga tidak melawan bahkan minta ampun. Maksudnya agar pasukan Belanda tidak menembak orang-orang yang bersembunyi di dalam rumahnya itu. Tetapi karena penasaran pasukan Belanda menembaki rumah itu yang menyebabkan seluruh orang yang ada di dalamnya tewas. Demikian pula seluruh rumah yang ada di kampung Dena dibakar. Tiga orang di antara pemimpin rakyat Dena

yang masih hidup dan tidak melarikan diri ditangkap dan ditawan. Ketiga mereka itu adalah H. Usman Ruma La Beda, H. Mustafa Abu La Hawa dan H. Abdullah Azis Abu La Shaleh. Ketiganya ditawan di Sori Dena di sebuah tempat yang disebut Wadu Bura. Hari itu juga Perang Dena dinyatakan selesai. Setelah diadili mereka masing-masing dihukum membayar kerugian perang sebanyak seratus ringgit dan pernyataan taat untuk menerima registrasi penduduk.

3. Perang Kala, 1909

Walaupun Perang Ngali dan Perang Dena telah berakhir tetapi tokoh-tokoh masyarakat Donggo tetap mempertahankan pendapat mereka untuk tidak menerima pemerintahan Belanda. Bagi mereka menerima pemerintahan Belanda berarti membayar pajak dan kerja rodi. Juga oleh karena mereka tetap setia memegang janji pada permusyawaratan di Pali Pena antara Gelarang Ngali, Gelarang Dena dan Gelarang Kala. Dalam permusyawaratan itu mereka telah sama-sama berjanji untuk menolak Pemerintah Belanda. Sehingga setelah Desa Ngali dan Dena telah dihancurkan, Desa Kala siap pula untuk berperang melawan Belanda. Beberapa kali utusan Sultan Ibrahim datang membujuk mereka untuk tunduk kepada pemerintah sultan ditolak. Mereka menganggap sekutu Belanda dan karena itu segala perintahnya pun ditolak pula. Mereka telah bertekad untuk tidak dijajah oleh Belanda dan tidak membayar pajak yang ditetapkan oleh Belanda. Juga mereka bertekad untuk tidak tunduk kepada Pemerintah Sultan Bima karena beliau telah diperalat oleh Belanda.

Perlawanan rakyat Donggo dipimpin oleh Ntehi Ama Ntihan dan Ncohu Samiu. Yang terakhir ini seorang wanita yang terkenal berwatak keras dan pemberani. Keduanya berasal dari Desa Kala, Kejenelian Donggo, Kesultanan Bima. Markas perlawanan dipusatkan di Mpirilua. Untuk menghadapi serangan Belanda para pemimpin perlawanan memerintahkan rakyat membuat serambi (bahasa Bima: sancari) di atas Bukit Daro KaboE, Mpirindaru. Di atas serambi itu disusun batu-batu besar.

Demikianlah ketika Belanda menyerang mereka pada tahun 1909 mereka memancing tentara agar mengejar ke atas Bukit Doro KaboE. Mula-mula mereka menghadapi tentara Belanda dan tentara sultan di Dataran Oo dan Kala. Siasat mereka menyerang dan lari sehingga perlawanan mereka tidak dapat dipadamkan dengan segera. Mereka adalah orang-orang gunung yang biasa berburu. Bagi mereka hutan dan gunung adalah biasa. Geraknya cepat dan sulit diikuti. Apalagi seluk-beluk hutan dan bukit-bukit mereka kuasai. Lain halnya dengan tentara Belanda yang serba asing terhadap medan. Tidak jarang prajurit-prajurit Belanda yang tersesat kena jerat dan jaring yang dipasang oleh orang-orang Donggo. Taktik orang-orang Donggo sangat menggusarkan tentara Belanda. Lebih-lebih ketika mereka berusaha mengejar musuh ke atas bukit KaboE mereka sangat terperanjat oleh gelindingan batu-batu besar yang melanda prajurit. Berpuluh-puluh prajurit Belanda tewas tertimpa batu yang tumpah dari serambi-serambi yang telah dipersiapkan lebih dahulu. Pemimpin pasukan Belanda tidak pernah menduga adanya taktik semacam itu. tekniknya sangat sederhana tetapi akibatnya sangat mengerikan. Orang-orang Donggo membuat para-para dari kayu yang sebelah sisinya tergantung pada tali-tali yang kukuh. Walaupun para-para itu diberati oleh beratus-ratus kilogram batu tidak apa-apa. Letaknya sedemikian rupa sehingga kalau tali penggantung itu diputuskan maka batu yang termuat dalam serambi itu akan tumpah bergelinding mengikuti lorong jalan pendakian seperti tanah longsor. Tentara Belanda yang sedang mendaki menghadapi curahan batu yang meluncur dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengelak lagi.

Menghadapi situasi yang sulit demikian itu Belanda meminta bantuan Sultan Ibrahim. Bala bantuan pun segera diberikan dan dipimpin oleh Sultan Ibrahim sendiri. Situasi pun segera berubah. Dua di antara pemimpin rakyat Donggo masing-masing Mangge dan Hoti tewas ditembak oleh sultan sendiri. Rakyat yang dapat menyelamatkan diri di bawah pimpinan Ntehi Ama Ntihi dan Ncau mengungsi ke Mpirilua. Di

sana mereka membuat benteng pertahanan yang kukuh. Dengan bersenjatakan serambi tentara Belanda yang mengejar selalu dapat dihalaunya. Namun demikian korban di pihak rakyat banyak yang berguguran. Di antaranya termasuk pemimpin-pemimpin mereka yang gagah berani tewas dalam usaha mempertahankan benteng dari serangan Belanda ialah SamoE, Ngkati, dan Ndiri Ama Mundu. Dengan tewasnya pemimpin-pemimpin tersebut Belanda mengharapkan rakyat Donggo akan segera menyerah. Tetapi ketika ternyata rakyat semakin fanatik mempertahankan kedudukannya Belanda mencoba menyodorkan suatu perdamaian. Perdamaian ini ditawarkan Belanda dengan perantaraan sultan.

Pancingan Belanda segera mengena. Ajakan sultan untuk berunding diterima oleh rakyat Donggo tanpa suatu prasangka. Rakyat Donggo diwakili oleh pemimpin mereka Ntehi Ama Ntihi yang didampingi oleh dua puluh sembilan orang pengiringnya. Sebagai tempat perundingan ditunjuk kota Bima. Sesampai di Bima mereka dijamu dan diperlakukan sebagai seorang utusan yang dihormati. Sehari kemudian mereka diajak naik ke kapal perang yang diberitahukan oleh juru bahasa sebagai tempat perundingan. Barulah kemudian mereka sadari bahwa mereka telah ditipu. Perundingan yang dijanjikan tidak pernah ada. Di atas kapal mereka diperlakukan sebagai orang hukuman. Dari Bima mereka dibawa ke Goa yang kemudian hilang tanpa berita. Tak seorang pun rakyat Bima yang mengetahui kemana Ncehi Am Ntihi dibawa oleh Belanda. Dengan demikian selesailah perlawanan rakyat Donggo. Peraturan dan ketetapan Belanda mereka terima sekalipun dengan perasaan yang berat.

Telah dikemukakan bahwa di daerah Bima timbul beberapa perlawanan. Empat di antaranya diinventarisasi dalam tulisan ini. Keempat perlawanan itu seluruhnya menemui kegagalan. Kegagalannya itu terutama disebabkan oleh:

1. Perlawanan tersebut masih bersifat lokal
2. Persenjataan yang dimiliki oleh rakyat jika dibandingkan tidak seimbang dengan yang dimiliki Belanda

3. Perlawanan-perlawanan itu tidak direstui sultan karena beliau terikat oleh perjanjian yang telah terjalin sebelumnya
4. Perlawanan tersebut timbul secara sporadis sehingga Belanda mudah mematahkannya.

Setelah perang selesai kekuasaan Belanda semakin kuat cekamannya. Sultan yang sebelum perang selalu ditaati dan dihormati oleh seluruh masyarakat, setelah perang kewibawaannya sedikit demi sedikit dikurangi dengan seorang kontrolir sebagai pelaksana Pemerintah Belanda yang sejajar dengan sultan. Setiap kebijaksanaan pemerintahan sultan harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan kontrolir. Struktur organisasi pemerintahan kesultanan dirombak secara drastis. Seluruh Kesultanan Bima dibagi menjadi lima kedistrikan, yaitu:

1. Kedistrikan RasanaE; wilayahnya meliputi seluruh kampung di sebelah utara Gunung Belo sampai pantai di timur laut, diperintah oleh Jeneli RasanaE, yaitu sultan sendiri.
2. Kedistrikan Donggo; wilayahnya meliputi seluruh kampung mulai dari Kampung Bajo ke utara sampai pantai yang berbatasan dengan daerah Dompnu, diperintah oleh Jeneli Donggo, yaitu Sultan Muda.
3. Kedistrikan Sape; wilayahnya meliputi sekalian kampung mulai dari tepi gunung berbatasan dengan RasanaE sampai Wawarada beserta seluruh kampung wilayah Wawo, diperintah oleh Jeneli Sape yaitu Raja Bicara.
4. Kedistrikan Belo; wilayahnya meliputi seluruh kampung dari Belo sampai Parado, diperintah oleh Jeneli Belo, yaitu Raja Sekuru.
5. Kedistrikan Bolo; wilayahnya meliputi seluruh kampung dari Kampung Bajo sampai gunung di perbatasan Dompnu, diperintah oleh Jeneli Bolo, yaitu Rato Parado.

Karena perubahan ini menteri-menterinya juga dikurangi jumlahnya, sehingga hanya tinggal empat saja, yaitu Sultan Muda, Raja Bicara, Raja Sekuru dan Rato Parado. Keempat menteri ini adalah juga Hadat Tanah Bima. Menteri-menteri yang lain diberhentikan oleh Belanda tanpa persetujuan sultan. Mereka yang telah diberhentikan dilarang sama sekali mendapat gelarang atau kepala kampung (Bahasa Jawa: lurah).

Kecuali pangkat hadat di atas, dua pangkat hadat lainnya masing-masing Bumi Luma RasanaE dan Bumi Luma Bolo masih terus diperkenankan. Tugasnya di bidang yudikatif berwenang memeriksa perkara pendakwaan, perhutangan dan tindak pidana. Perkara-perkara yang sudah diperiksa oleh kedua bumi itu dibawa kepada sultan dan hadat-hadat untuk diputuskan. Mahkamah Syar'iah ditiadakan. Urusan nikah, talak dan rujuk menjadi urusan lebe atau penghulu. Keduanya tidak termasuk ke dalam sstruktur organisasi pemerintahan seperti sebelumnya.

Dalam memutuskan perkara sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan sultan bersama hadat-hadat harus bersidang yang dihadiri juga seorang *ambtenaar*, biasanya *kontroleur*. Selain memutuskan sekalian perkara dalam sidang itu juga dimusyawarahkan hal ikhwal pemerintahan. Pada kesempatan itulah Belanda melalui ambtenarnya menetapkan kebijaksanaan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh sultan bersama pembantu-pembantunya. Sekalian perkara diputuskan oleh hadat tetapi harus sesuai dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda.

Untuk mencegah timbulnya pemberontakan-pemberontakan maka sejak perang selesai anak raja dan keluarga raja dilarang keras tinggal di luar istana. Mereka harus tinggal di istana atau di sekitar istana. Mereka yang sudah terlanjur di luar sejak sebelum perang diperintah segera kembali ke istana. Mereka itu adalah Daeng Manssa beserta anaknya bernama La Soodan La Ibu, Raja Amin dan anaknya bernama Ompu Dara, bekas Jeneli Monta beserta anaknya bernama Ompu Janga,

Ompu Bana dan tiga adiknya. Anaknya Daeng Manjariki bernama La Amat dan sekalian anak raja yang berpangkat maupun yang tidak. Bagi mereka yang melanggar atau membangkang diancam dengan hukuman buangan ke luar Bima atau hukuman denda.

Sumber penghasilan kesultanan juga dibatasi. Kesultanan hanya boleh memungut penghasilan dari:

1. a. Mengumpulkan sarang burung.
b. Mengumpulkan kayu kuning; orang yang memotong kayu kuning untuk sultan mendapat pembayaran f 1,50 sepikul.
2. a. Sekalian "dari" yaitu tukang-tukang yang mendapat sawah yang dikerjakan oleh anaknya.
b. Orang yang bukan tukang diwajibkan kerja rodi memperbaiki jalan dan mengerjakan sawah sultan.
3. Woha dana, yaitu 10% dari hasil padi ladang untuk biaya kepala desa (delarang).

Penghasilan pelabuhan menjadi hak gubernemen.

4. Perang Soriutu

Semangat kebangsaan sebagai akibat adanya pergerakan nasional, telah membawa suasana kehangatan politik di daerah Bima. Semangat ini meledak di awal tahun 1942, ketika tersiar kabar bahwa Pemerintah Hindia Belanda di Jawa telah menyerah kalah pada Pemerintah Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Timbul kesadaran di hati rakyat bahwa penjajah Belanda yang berkulit putih itu dapat dikalahkan oleh rakyat yang berkulit warna. Rakyat pun telah lama merasakan tekanan dan campur tangan Pemerintah Belanda dalam kehidupan mereka yang semakin lama semakin berat. Penghisapan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda beserta pegawai-pegawainya menimbulkan kesengsaraan umum. Teristimewa pajak jalan, pajak tanah dan pajak hasil bumi dan lainnya sering dipungut dengan cara sewenang-wenang sehingga dirasa-

kan sangat menekan penghidupan perekonomian dan pertumbuhan kemakmuran rakyat. Perasaan kecewa semacam ini terdapat pada semua lapisan masyarakat. Benih dendam yang ditanamkan pada rakyat oleh Belanda pada Perang Ngali, Dena dan Kala semakin tumbuh dan meningkat. Campur tangan Pemerintah Belanda dalam kehidupan rakyat sehari-hari sangat mengecewakan Sri Sultan Bima sendiri. Dalam suasana demikian suatu insiden kecil cukup untuk mencetuskan api pemberontakan. Dan insiden itu pun terjadi pada 30 April 1942.

Pada saat itu tiba di Pelabuhan Bima dua orang penerbang Belanda dari Kendari (Sulawesi). Untuk dapat melanjutkan perjalanan mereka ke Australia dipaksalah sebuah perahu Madura yang sedang berlabuh di Pelabuhan Bima. Karena nakhoda perahu menolak permintaan secara paksa maka perahu itu pun ditembak sampai berlubang. Tindakan yang sewenang-wenang itu menimbulkan amarah di kalangan pemimpin-pemimpin rakyat yang beberapa hari sebelumnya telah bergabung dalam suatu komite aksi yang bermaksud merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Belanda. Amarah mereka semakin meluap ketika ternyata Pemerintah Belanda yang sedang berkuasa tidak mengambil tindakan apa-apa.

Perlu dicatat bahwa komite yang dikatakan di atas dibentuk atas inisiatif pemuda-pemuda, termasuk kepanduan Hisbul Wathan Muhammadiyah (HW), Pemuda Anshor dan Serdadu KNIL yang berpihak kepada mereka. Serdadu KNIL ini dipimpin oleh Aritonang dengan jumlah anggotanya sekitar 14 orang, antara lain: Sutawijaya, Sinolon, Simatupang, D. Saria dan Amir. Sedangkan pimpinan non militer berada di tangan Muhammad Wasmir dengan kawani-kawannya: Muhammad Yahya, Hakim Mantabi, Nuhung, Amin, Daeng, Emo, Burhanuddin, Pieter Siun, H. Talib, Yusuf Salam, Sudarmono, Suwondo, Sudirman, Adhuni, Iskandar, Supardi, M. Sidik H, Rati, Capir, Rato, Sambe, Yusuf Sulaiman, Nur Sulaiman, Said Hasny, Muhammad Yakub Monggo dan M. Yasin Dena.

Lebih kongkrit mereka menetapkan bahwa perebutan kekuasaan akan dilakukan dengan cara menangkap semua pejabat Belanda yang ada di daerah Bima, dengan berusaha menghindari pertumpahan darah sejauh mungkin. Hari H dan D yaitu hari Minggu tanggal 5 Mei 1942 pukul 07.00 dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Pasukan inti yang akan mengepung asrama polisi di Raba dan menahan semua orang Belanda dipimpin oleh Aritonang dengan dibantu oleh Sutawijaya, Pieter Siun, Adhuri, Iskandar, dan Muhammad.
2. Mahmud Qasmir, Nuhung, Sinolon dan Amir disertai memimpin pengamanan alat-alat komunikasi yang vital terutama sentral telepon Raba dan radio di Kamar Bola.
3. Pos-pos penjagaan untuk menghadang orang Belanda agar tidak dapat meloloskan diri ke luar kota ditetapkan di Kumbé di bawah pimpinan Suwondo, di Dorodula oleh M. Yahya, di Padolo oleh Hakim Hantabi, di Jambatan Ranggo oleh Burhanuddin.

Pada saatnya usaha perebutan kekuasaan berjalan lancar, tanpa pertumpahan darah. Banyak orang Belanda yang berhasil ditangkap, antara lain: Mr. Machman (Controleur), Karseboom (Agent KPM), Bavelaar (Agent BPM), Kemper (Inspektur Politie), Vander Capelle (Hoofd Opziechter), Muller (Hoofd Opier), Daniel Adu (Mantri Polisi), Akan tetapi perundingan-perundingan tentang adanya rencana itu rupanya telah tercium lebih dahulu oleh sebagian pejabat Pemerintah Belanda, karena ternyata ada di antara mereka yang berhasil meloloskan diri, di antaranya ialah: H.E. Haak (Assisten Residen), Pons Direktur AVB (*Algemeene Volks Crecit Bank*), J.W. Ros *Bosch Architect* (Kepala Kehutanan). Mereka membawa semua uang kas bank. Berhasilnya usaha perebutan kekuasaan tersebut maka bebaslah daerah Kesultanan Bima dari belenggu penjajahan Belanda. Sri Sultan Bima, M. Salahuddin, yang pada saat itu sedang bermukim di Desa Dodu, diminta oleh

komite untuk memegang kembali tampuk pimpinan secara penuh dengan berkedudukan di Istana Sri Sultan di kota Bima. Sementara itu diperoleh laporan dari dua orang kurir yakni Hakim Hantabi dan Suwondo yang sengaja dikirim ke Sumbawa bahwa asisten residen telah berhasil melakukan tipu muslihat di Sumbawa. Di Sumbawa asisten residen meyakinkan para pejabat di sana bahwa pemuda-pemuda Bima sedang dalam perjalanan menuju Sumbawa dengan maksud untuk menyerang Kesultanan Sumbawa secara besar-besaran. Kepada Sri Sultan Sumbawa dikatakannya bahwa Sultan Bima (Mertua Sultan Sumbawa) telah ditangkap oleh rakyatnya dan telah dijebloskan dalam penjara.

Para pejabat Sumbawa rupanya termakan oleh muslihat licik asisten residen tersebut. Dengan bala bantuan yang di-datangkan dari Lombok orang-orang Belanda yang berada di Sumbawa segera berangkat menuju Bima dengan kedok untuk mempertahankan Sri Sultan Bima dari Penjara Raba. Payung Kerajaan Sumbawa dibawa serta untuk mengelabui mata rakyat. Pasukan yang dipimpin oleh dua orang penerbang tempur Belanda itu berangkat tanggal 10 Mei 1942 pukul 4.00. Pada saat yang sama bergerak pula pasukan-pasukan tempur dari Bima yang terdiri dari putera-putera Indonesia, anggota KNIL di bawah pimpinan Aritonang. Anggota KNIL ini memperoleh restu dari Sultan Bima, M. Salahudin. Sikap Sri Sultan Bima yang demikian itu telah membakar semangat rakyat di mana-mana sehingga makin banyak orang menggabungkan diri. Barisan yang ke Sumbawa banyak, sampai-sampai tidak termuat lagi oleh 3 buah truk yang disediakan. Mereka pun berjaga-jaga sepanjang jalan menuju Sumbawa. Sekitar pukul 22.00 kedua pasukan bertemu di Jembatan Sori Utu di mana berkobar pertempuran yang terkenal dengan nama "Pertempuran Sori Utu".

Dalam pertempuran ini dua orang penerbang Belanda tadi tewas, sedangkan di pihak pejuang Bima seorang gugur yaitu

Idris Hakim dan seorang lagi luka berat yaitu Amin Daeng Emo. Pertempuran berakhir setelah polisi yang bertempur di pihak Belanda dapat dihubungi dan dijelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun sisa-sisa pejabat Belanda yang belum tertangkap dapat meloloskan diri ke Lombok. Para pejuang kembali ke Bima dengan membawa kemenangan. Mereka membawa pula dua mayat penerbang Belanda yang diangkut dengan sebuah truk. Patriot-patriot ini langsung menghadap Sri Sultan Bima untuk melaporkan hasil perjuangan mereka.

Sepanjang jalan rakyat menyambut dan mengelu-elukan mereka dan diterima kembali dengan hangat oleh rakyat yang berkumpul di sekitar Istana Sri Sultan. Peristiwa ini telah membangkitkan kembali semangat dan martabat bangsa serta kepercayaan pada diri sendiri. Akan tetapi setelah hasil-hasil ini dicapai rupa-rupanya merasa diri belum mampu untuk mempertahankan keadaan itu lebih lanjut.

Setelah mengadakan penilaian terhadap kemampuan fisik yang ada dan kedcrasan arus bala tentara Jepang menguasai Indonesia keadaan ini sukar dipertahankan. Pada waktu itu Jepang telah menguasai Makasar dan hanya tinggal selangkah lagi sampai di Bima. Apalagi kedatangan Jepang itu disertai dengan semboyan untuk memerdekakan bangsa-bangsa Asia dari penindasan bangsa-bangsa kulit putih dan untuk membentuk daerah Persemakmuran Asia Timur Raya. Ajakan mereka untuk bekerjasama di mana-mana disambut dengan gembira.

Berdasarkan kenyataan itu Pemerintah Kesultanan Bima mengambil keputusan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang berjalan sebagaimana terjadi pada daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya. Pemerintah kesultanan memutuskan hendak mengirim utusan untuk menemui pimpinan tentara Jepang ke Jawa, Makasar dan Waingapu. Ke Jawa diutus A.D. Talu, Nazaruddin, Sudirman, H. Yasin (penghulu) Hakim Hantabi dan Pieter Siun. Ke Pulau Kelapa di Selat Sape: M. Yahya, M. Ali Matoa dan Abdurrahim, Ke Makassar:

Yusuf, Sulaiman dan M. Saleh Nto bu, A. Wahid Ince Wahe, yang diutus ke Waingapu M. Sidik, H. Rati dan Burhanuddin. Utusan yang ke Jawa berhasil pulang kembali bersama tentara Jepang. Mereka mendarat di Bima pada tanggal 17 Juli 1942 di bawah Komandan Pasukan Payung Kolonel Saito. Kedatangan mereka disambut hangat oleh rakyat Bima. Rakyat membanjiri halaman depan Istana Sri Sultan untuk mengikuti dengan penuh perhatian pidato Kolonel Saito yang diterjemahkan oleh juru bicara Ikuyama.

BAB IV PERLAWANAN TERHADAP JEPANG

A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN

Berita kemenangan Jepang atas Belanda diterima dengan hati lega oleh masyarakat. Terpengaruh oleh propaganda yang muluk-muluk mereka mengharapkan di bawah kekuasaan Jepang keadaan ekonomi akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jepang mendarat di Lombok pada tanggal 8 Mei 1942. Di Sumbawa Barat pada bulan Juli 1942 dan di Bima pada tanggal 17 Juli 1942. Kedatangan mereka dielu-elukan oleh rakyat sepanjang jalan yang dilaluinya.

Usaha yang mula-mula diadakan oleh Jepang ialah menyusun organisasi pemerintahan. Lombok dan Sumbawa masuk dalam lingkungan wilayah Sunda Kecil Syu (Kresidenan Sunda Kecil). Masing-masing merupakan *ken* yang diperintah oleh *ken kanrikan* yang dijabat oleh orang Jepang. Tiap-tiap ken dibagi atas *bun ken*. Bun ken dibagi atas *gun* dan tiap-tiap gun dibagi atas *son*. Jabatan *gunco* dan *sonco* diserahkan kepada orang Indonesia. Dalam urusan pertahanan di Sumbawa ditempatkan seorang Panglima yang dijabat Mayjen Tanaka.

Di balik keramah-tamahan Jepang tersembunyi maksud untuk menguasai Indonesia secara penuh, politis maupun idiologis. Dengan berbagai macam slogan seperti: Kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, Jepang Indonesia sama-sama, saudara tua dan sebagainya, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia. Pengaruhnya disebarkan melalui Badan Propaganda yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat. Sesudah itu secara sistematis kekuasaannya dicekamnya ke dalam seluruh sektor kehidupan yang menjadikan rakyat tidak lebih daripada kuda beban dan sapi perahan. Kebijakanaksanaan Jepang di bidang ekonomi merupakan kebijaksanaan pe-

rampokan. Seluruh sektor ekonomi yang sangat vital diawasi dengan keras. Dengan dalih untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang mengumpulkan dan menimbun bahan makanan. Setiap kepala keluarga yang memiliki sawah diharuskan menyerahkan 10% dari hasil panennya dengan uang imbalan yang sangat rendah dari pada mestinya. Bagi mereka yang tidak menurut kehendak Jepang dipukul dan padinya dirampas dengan kekerasan. Kaki tangannya tersebar ke setiap kampung turun naik lumbung memeriksa padi yang dimiliki rakyat. Petugas yang tidak terampil dan tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dipukul dan dipecat. Ternak yang besar dan gemuk juga harus diserahkan kepada pemerintah. Uang ganti rugi di samping sangat kecil juga sering tidak disampaikan kepada pemilik oleh kaki tangan Jepang. Jepang juga mengadakan monopoli atas kapas. Rakyat dijadikan buruh. Mereka tidak boleh mengerjakan kapas atas namanya sendiri. Kebijakan ini sangat menyusahakan rakyat. Tidak sedikit rakyat yang kekurangan makanan dan pakaian.

Di samping itu dengan dalih untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya Jepang mengerahkan tenaga kerja untuk membuat pertahanan, jalan baru dan gua-gua perlindungan. Pengerahannya dilaksanakan melalui kepala desa (*soncu*) dan kepala distrik (*gunco*). Kebijakan ini sangat meresahkan rakyat. Mereka tertekan oleh perasaan ketakutan. Kebanyakan mereka takut mendengar suara mesin kendaraan dan lari menghindar dari petugas. Kepala desa yang tidak dapat menyediakan tenaga sesuai jatah dipukul. Namun demikian tidak sedikit kepala desa yang tidak dapat memenuhi jatah yang ditugaskan kepadanya. Karena itu tanpa melalui kepala desa dan kepala distrik, Jepang berkeliling dengan truk menaikkan setiap laki-laki yang dijumpainya di pasar atau di jalan kemudian diangkut ke proyek-proyek dalam kondisi kerja yang tidak teratur. Akibatnya banyak rakyat takut bepergian dan berjalan di jalan raya sehingga sangat menghambat usaha rakyat untuk mencari nafkahnya. Ketakutan mereka memang beralasan.

Tidak sedikit rakyat yang kerja rodi di proyek-proyek Jepang seperti Lembar, Bangkobangko, Lunyuk dan beberapa tempat di daerah Bima yang menderita penyakit seperti malaria dan lain-lain. Selama bekerja makanan dan kesehatan mereka tidak terurus. Karena kekurangan gizi dan kerja berat mereka mudah dihindangi suatu penyakit. Lagi pula para pemimpin kerja pada umumnya orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan. Baik orang Jepang atau orang Indonesia. Ada pula di antara mereka yang meninggal karena kepayahan atau dipukul oleh Jepang atau kaki tangan Jepang.

Penderitaan itu telah membangkitkan kesadaran pada tiap-tiap kalbu rakyat Nusa Tenggara Barat betapa buruknya nasib yang menimpa mereka di bawah kekuasaan Jepang yang kurang sekali mengindahkan adat-istiadat rakyat. Mereka tidak mengindahkan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Semua faktor di atas telah mendatangkan amarah dan dendam hampir pada semua hati rakyat. Hanya mereka masih sabar menunggu kesempatan yang baik untuk melancarkan perlawanan. Namun demikian pada masa jaya juga ada perlawanan tetapi karena tidak ada pelopor yang mengorganisasi dan mengkoordinasinya maka sering timbul perlawanan perseorangan yang tidak ada hubungan satu dengan lainnya. Seperti antara lain peristiwa pembunuhan Jepang di Sesait, pembunuhan Jepang di Raba, Bima, pemukulan Jepang oleh serang kusir cikir di Jenbatan Kembar, Gerung.

B. BENTUK PERLAWANAN

Kesabaran rakyat ada batasnya. Penderitaan dan penghinaan tidak tertahankan lagi. Kelemahan fisik dan persenjataan tidak lagi menjadi perhitungan, yang penting martabat dan harga diri. Bagi mereka mati lebih terhormat dari pada selalu menanggung penderitaan batin sehingga timbulah berbagai bentuk perlawanan dalam bentuk perlawanan bersenjata, perlawanan secara diam-diam dan pemboikotan, serta perebutan senjata Jepang.

1. Perlawanan Bersenjata

Kesabaran rakyat yang telah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Jepang akhirnya ada batasnya. Tidak semua mereka dapat menerima perlakuan buruk dan sewenang-wenang dari Jepang. Hal ini diawali dengan Pemberontakan Sesait pada tahun 1943. Seorang petani bernama Amaq Baris membunuh Taniguci, seorang pemimpin Nanko yang mengusahakan kebun kapas di Desa Sesait, Lombok Barat. Taniguci dibunuh karena kekejamannya. Pada hari itu ia memukul Amaq Baris hanya karena kesalahan terlambat memasang bajak.

Peristiwa tersebut sempat menggemparkan seluruh Kecamatan Bayan. Raden Sigeti, gunco bayan segera turun tangan tetapi dilawan oleh rakyat Desa Sesait. Sebagian besar rakyat Sesait memihak Amaq Baris. Di bawah pimpinan Amaq Jaliah dan Penghulu Sesait rakyat menyongsong kedatangan balatentara Jepang dan pertempuran terjadi di Bageq Kembar, di luar Desa Sesait. Mereka menahan penyerbuan Jepang hanya dengan bersenjatakan keris, tombak dan pedang. Menghadapi perlawanan yang sengit semacam itu Jepang merasa terkejut, apalagi kenyataan rakyat Sesait yang bertempur tidak memperlihatkan kegentaran dan tidak terkena peluru. Mereka maju mendekati tentara Jepang sekalipun tembakan gencar menghujannya. Akhirnya karena seruan dari gunco mereka pun menyerah tanpa syarat. Dalam hati mereka tidak terbayang bahwa akan terjadi peristiwa buruk yang akan menimpa mereka.

Karena peristiwa terbunuhnya Taniguci semua orang Sesait laki-laki dewasa ditangkap dan diangkut ke Mataram. Setelah disiksa dan diinterogasi mereka dilepas kembali kecuali sembilan belas orang masing-masing Amaq Rumpat, Amaq Baris, Amaq Indah, Amaq Gantut, Amaq Era, Amaq Kina, Amaq Cangkir, Amaq Aliap, Amaq Aip (kepala kampung), Amaq Arif, Amaq Jaliah (PENGHULU), Amaq Asim (mangkub-

mi), Amaq Bendang, Kecu, Amaq Kenip, Amaq Akon, Sahdin, Sedin, Jebab dan Kelepuuk. Keluarga mereka dilarang menjenguk atau mengirim makanan ke dalam tahanan. Sampai Perang Dunia Kedua selesai mereka hilang tanpa berita. Kemungkinan mereka semua dibunuh oleh Jepang tak seorang pun yang mengetahuinya.

Peristiwa lain pada tahun 1944 terjadi pula pembunuhan seorang tentara Jepang oleh adik Sultan Bima. Tentara itu dibunuh ketika hendak memasuki rumah seorang wanita pada malam hari. Ketika perbuatannya dicegah tentara itu marah dan hendak memukul, tetapi sebelum pukulannya sampai adik sultan telah menusuknya lebih dahulu hingga tentara itu menemui ajalnya. Untuk menyelamatkan diri adik sultan berlindung di istana. Segera setelah peristiwa itu dilaporkan kepada pimpinan tentara Jepang istana pun dikepung. Pasukan pengepung baru mengundurkan diri setelah Sultan Bima menjelaskan kepada pucuk pimpinan tentara Jepang mengenai duduk persoalannya.

Demikian pula pada awal tahun 1945 di Gerung Lombok Barat. Seorang kusir cikar memukul seorang tentara Jepang sampai pingsan. Setelah melaporkan diri kepada gunco kusir itu menghilang. Tentara Jepang lainnya yang datang mencari kusir tersebut tidak dapat menjumpainya karena tidak ada rakyat yang mau membantunya secara sungguh-sungguh. Pada saat itu hampir seluruh rakyat di Nusa Tenggara Barat membenci Jepang dan mengharapkan kekalahannya oleh Sekutu.

Meskipun Jepang telah menyerah tetapi dia mendapatkan kekuasaan kembali berdasarkan Maklumat Jeneral Sir Thomas Albert Blamey. Tugasnya untuk menjaga keamanan, keselamatan rakyat dan tawanan perang, seluruh perusahaan, hak milik umum maupun hak milik pribadi. Kepercayaan Sekutu ini mengakibatkan Jepang bangkit kembali memperlihatkan kekuasaannya. Tentara Jepang yang sudah dikonsignasi disebarkan kembali. Hal ini menggelisahkan rakyat.

Kebencian rakyat terhadap mereka timbul kembali. Apalagi rakyat sangat memerlukan senjata dan makanan. Rakyat yang tergabung dalam organisasi perjuangan bersenjata seperti BKR, BASMI dan API mulai merencanakan perebutan senjata dari tangan Jepang. Rencana mereka juga diresdai oleh para pemimpin pemerintahan yang terdiri dari orang-orang Indonesia. Sasaran utama ialah pos-pos Jepang dan gudang-gudang penyimpanan bahan makanan. Tiap-tiap kelompok pejuang yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Nusa Tenggara Barat masing-masing dengan rencananya sendiri-sendiri menyerang dan merampas senjata Jepang. Kegiatan rakyat dalam usaha mencari senjata yang demikian itu dimulai dari Lombok Barat.

a. Pertempuran Sesela.

Pertempuran ini berawal dari kebencian rakyat Sesela kepada Jepang yang selalu menimbulkan kesusahan dan kemangkalan baik di waktu jayanya maupun di waktu lumpuhnya. Rakyat Sesela menganggap orang-orang Jepang sangat angkuh dan suka merendahkan bangsa Indonesia. Sedangkan di Sesela sejak proklamasi kemerdekaan diumumkan di Mataram rakyat telah membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) dengan susunan pengurus:

Ketua	:	H.A. Saruji	
Wakil Ketua	:	Hamdan	
Anggota	:	1. Abdul Hadi,	pengerah tenaga rakyat di Kebon Lauq
		2. H. Azhar ,	pengerah tenaga di Sesela Lendang
		3. Amaq Sebah,	pengerah tenaga di Desa Sesela

Di bawah koordinasi BKR ini rakyat sepakat hendak menghajar Jepang yang bermarkas di Ampenan. Rencana penyerangan ini dipersiapkan sebaik-baiknya dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin perjuangan yang ada

di Mataram. Di antaranya R. Sumantri, Encik Nangcik, Encik Batuni, Encik Alwi dan lain-lain. Pada prinsipnya para pemimpin perjuangan tersebut menyetujui rencana BKR Sesela dan untuk mematangkan persiapannya sebelum pelaksanaannya diadakan lagi rapat bersama antara BKR Sesela dengan pimpinan BKR bertempat di Kampung Kamasa Mataram. Rapat dipimpin oleh R. Sumantri. Dalam rapat itu ditetapkan hari dan tanggal penyerangan serta cara yang sebaik-baiknya supaya berhasil. Sasaran penyerangan ialah Tangsi Militer Jepang serta merampas senjatanya. Dan bila tidak berhasil maka serangan kedua harus melalui rapat lagi. Kepada penyerang diberikan instruksi agar berhati-hati dan supaya memutuskan kawat telepon lebih dahulu karena semangat yang berkobar-kobar para pemuda yang ditugaskan menyerang gagal dalam melaksanakan tugasnya. Sakit hati tidak dapat merampas senjata, sebuah jip yang mereka jumpai di tangsi mereka dorong beramai-ramai kemudian dibuangnya di Pemakaman Sesela.

Jepang yang mengetahui perbuatan ini tidak bertindak apa-apa. Menjelang waktu Subuh barulah tentara Jepang menyerbu Desa Sesela. Kedatangan mereka diterima oleh rakyat Sesela dengan keris, tombak, pedang dan bambu runcing. Melihat itu Jepang tidak berani mendekat dan dari jauh mereka menembak rakyat yang juga bertiarap di parit-parit dan balik-balik pohon di sekitar Midang, di sebelah timur Desa Sesela. Karena kehabisan peluru Jepang mundur dan kembali ke Ampenan. Setelah itu rakyat membuat rintangan jalan dengan merebahkan bambu yang terdapat di kiri kanan jalan ke tengah jalan.

Kira-kira pukul 07.00 kembali Jepang menyerang. Tetapi karena jalan-jalan sudah dirintangi bambu mereka terhalang. Rakyat Sesela menyusul Jepang keluar desa dan pertempuran terjadi di Rembiga. Tidak kurang dari tiga ratus rakyat Sesela di bawah pimpinan H.A. Saruji, TGH. Abdul Halil, H. Azhar, H. Mahmud, H. Kamarudin, TGH. A. Yasin, H. Jafar yang datang menyerang. Rakyat Desa Rembiga juga ikut membantu

Sesela sehingga pertempuran semakin ramai. Pertempuran berakhir setelah dileraikan oleh Lalu Darwisah, Kepala Pemerintah Lombok Barat. Dari pihak Sesela jatuh beberapa orang korban meninggal dunia masing-masing H. Mahdali, Amaq Duniah dan Amaq Enap. Korban di pihak Jepang tidak dapat diketahui dengan pasti karena mereka rahasiakan. Walaupun dalam pertempuran itu Jepang masih dapat mengatasi kekuatan rakyat tetapi mereka menjadi sadar bahwa kekuatan rakyat sangat berbahaya sehingga untuk selanjutnya Jepang selalu bertindak hati-hati. Sedapat mungkin mereka hindari hal-hal yang dapat membangkitkan kemarahan rakyat.

b. Pertempuran Brangpanas

Pada zaman perjuangan kemerdekaan Lombok Timur yang tampil sebagai pelopor menampilkan berbagai pertempuran. Dalam usaha mencari senjata yang menjadi sasaran ialah tangsi-tangsi militer Jepang yang dibentuk kembali dalam usaha mengemban tugas tentara Sekutu. Tangsi Militer Jepang diserbu rakyat yang tergabung dalam badan perjuangan BASMI. BASMI merupakan organisasi kelasykaran rakyat yang meliputi Desa Pringgasela, Aikmel, Lenek, Kalijaga, Mamben dan lain-lain. Pimpinan tertinggi pasukan BASMI dijabat oleh Sayid Saleh. Pimpinan di tingkat desa masing-masing: Lalu Jaya, Abdurrahim, Rawisah dan Bapak Isna.

Dalam usaha penyerangan tangsi-tangsi militer Jepang yang memiliki senjata lengkap selalu dengan taktik gerilya dan di waktu malam hari. Kalau berhadapan dengan musuh selalu mengusahakan perang bersusah sehingga dengan demikian setiap penyerangan selalu menimbulkan korban di pihak musuh. Dari berbagai pertempuran yang dilakukan oleh BASMI yang terhebat adalah Pertempuran Brangpanas. Dengan kekuatan delapan puluh lima orang BASMI di bawah pimpinan Sayid Shaleh menyerang tangsi militer Jepang di Brangpanas. Serangan dilakukan pada Senin malam tanggal 11 Desember 1945. Kedua belah pihak menderita korban gugur dan luka-

luka. Dari pihak BASMI tercatat lima orang gugur dan seorang luka parah; yang gugur masing-masing Bapak Hawa, Bapak Minah, Bapak Muhamad, Bapak Salamah dan Alam, dan yang luka berat ialah Amaq Alisah. Mereka yang gugur dimakamkan dengan upacara yang sederhana. Kepergiannya dianggap sebagai pengorbanan yang tinggi dan mulia. Mereka berperang demi kemerdekaan tanah air dan bangsanya, tiada pamrih yang terkandung dalam hati mereka kecuali kerelaan untuk berkorban karena Allah. Tauladan yang telah mereka tinggalkan menjadi landasan perjuangan bagi pasukan yang masih hidup.

c. Pertempuran Wanasaba

Berita penyerbuan Brangpanas cepat menjalar ke berbagai desa dan memberi semangat untuk melakukannya sendiri. Rakyat Desa Mamben yang juga anggota BASMI sudah lama tak senang dengan adanya pos tentara Jepang di Desa Wanasaba. Pos Jepang yang hanya berkekuatan satu peleton itu dirasakan sangat mengganggu aktivitas para pejuang yang terdapat di Desa Mamben dan Wanasaba. Rakyat Mamben sendiri telah berkali-kali mengganggu pos itu tetapi karena tidak berhasil maka mereka ingin menyerbu pos itu secara terbuka tetapi terhalang oleh rakyat Wanasaba yang tidak menghendaki terjadinya pertempuran di dalam Desa Wanasaba. Rakyat Wanasaba sendiri memang beralasan karena khawatir peluru nysar yang dapat mengenai anak-anak dan wanita yang tidak berdosa. Sedangkan kalau akan menghadapi Jepang yang bersenjata lengkap secara terbuka pasti akan menimbulkan korban di pihak pejuang terlalu besar. Tetapi dipanasi oleh berita Pertempuran Brangpanas rakyat Mamben akhirnya memutuskan akan menantang Jepang di medan yang terbuka.

Pada hari Senin 17 Desember 1945 sekitar pukul 15.00 beratus-ratus rakyat Mamben di bawah pimpinan pemuka-pemuka mereka yang fanatik berduyun-duyun menyerbu tentara Jepang yang telah siap dengan senjatanya. Mereka menunggu di jalan raya pertengahan antara Desa Mamben de-

ngan Wanasaba. Dengan hanya bersenjatakan pedang, tombak dan keris yang didasarkan pada keyakinan untuk mati syahid di jalan Allah. Secara tidak teratur mereka berlomba-lomba mendekati tentara Jepang. Ketika mereka telah dekat tentara Jepang memuntahkan mitraliyurnya menerpa rakyat yang datang menyerbu. Mereka segera bertiarap di balik-balik pematang, batang-batang kayu dan di dalam parit sambil mengundurkan diri. Beberapa orang termasuk pemimpin rakyat yang fanatik maju terus hendak mencapai musuh sampai titik darah yang terakhir. Dalam pertempuran itu gugur Haji Tahir, Haji Samsudin, Amaq Zainur, A. Jahrah, A. Sapinah, A. Masdah dan seorang luka parah yaitu Haji Sirajudin.

Kedua belah pihak mengundurkan diri ke pos masing-masing. Walaupun dari segi korban yang tewas pertempuran itu telah dimenangkan oleh Jepang, tetapi karena pertempuran itu Jepang merasa kedudukannya sangat terancam. Mereka selalu gelisah dan bertindak lebih hati-hati dalam menghadapi masyarakat sekitarnya. Bagi rakyat Mamben kekalahan yang dideritanya telah mendorong mereka untuk lebih aktif berlatih dan menanamkan semangat pada setiap dada pemudanya. Semangat kebencian terhadap Jepang semakin diperhebat. Karena merasa terancam terpaksa tentara Jepang mengosongkan pos mereka yang di Wanasaba.

d. Pertempuran Labuhan Haji

Meskipun dalam berbagai pertempuran melawan Jepang dari pihak pejuang selalu jatuh korban jiwa tewas dan luka-luka dengan hasil perampasan senjata yang kadang-kadang kosong, namun semuanya itu tidak pernah mengendorkan semangat juang mereka. Bahkan semakin berkobar-kobar yang meningkatkan kwantitas dan daya tempur mereka. Secara kecil-kecilan dan sporadis hampir semua pos tentara Jepang mendapat gangguan setiap malam. Terutama tangsi militer Jepang yang di Selong, ibukota Bun Ken Lombok Timur hampir setiap malam mendapat gangguan dari para pemuda. Tetapi

karena selalu dijaga ketat dan jelinya mata-mata setiap kali rencana penyerangan tangsi itu selalu gagal. Maka itu sasaran penyerangan untuk memperoleh senjata dipindahkan ke pos tentara Jepang yang terdapat di Labuhan Haji. Seluruh kekuatan dari semua komponen perjuangan yang ada di Lombok Timur dihimpun dalam satu barisan di bawah koordinasi Putra-jab dengan pimpinan umum Sayid Shaleh.

Pada hari Selasa malam, bulan Januari 1946, terhimpunlah kesatuan rakyat dari Desa Labuhan Haji, Tanjung Teros, Kelayu, Selong, Pancor, Panyaong, Rempung, Pringgasela, Lenek, Suralaga. Seluruhnya berjumlah seribu orang yang terbagi dalam kelompok dipimpin oleh pimpinan kesatuan masing-masing menyerbu tentara Jepang yang bertangsi di Pabrik Labuhan Haji. Dalam serangan itu berhasil merampas tiga pucuk karaben, 5 pucuk pistol dan 17 peti peluru, sedangkan dari kedua belah pihak tidak menderita korban jiwa.

e. Perlawanan Rakyat Bima

Kebangkitan kembali kekuasaan Jepang karena mendapat kepercayaan dari Sekutu untuk memelihara keamanan telah menimbulkan kegelisahan di kalangan pemuda. Lebih-lebih setelah secara nyata pada tanggal 29 Nopember 1945 Jepang di Bima mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Republik secara sepihak. Sejak itu semua badan perjuangan giat berlatih. Mereka bertekad hendak menyerang pos-pos tentara Jepang yang masih tersebar di beberapa kecamatan. Motif perjuangan adalah perebutan senjata dan bahan makanan. Tujuannya ialah untuk melemahkan kekuatan dan menjatuhkan moral tentara Jepang yang dinilai oleh rakyat sangat angkuh, juga sebagai jawaban atas perintah Jepang kepada Sultan Bima agar mengumpulkan senjata api, keris, tombak dan bambu runcing yang dimiliki rakyat.

Sasaran penyerangan untuk pertama kali ialah pada tanggal 25 Desember 1945 Pos Tentara Jepang yang terletak di Nggembe, Kecamatan Bolo. Pos tersebut salah satu tempat

penyimpanan senjata dan bahan makanan sisa persediaan perang yang baru saja berakhir. Kedua belah pihak bertarung sama-sama berani. Pertempuran berakhir dengan meninggalkan korban dari kedua belah pihak. Dari pihak pemuda menderita dua orang korban tewas. Demikian pula Jepang menderita beberapa orang korban tewas dan luka-luka.

Peristiwa itu sangat mengejutkan dan mengecewakan Jepang. Pada tanggal 26 Desember 1945 Mayor jenderal Tanaka mengulangi perintahnya kepada Sultan Bima agar mengumpulkan semua jenis senjata yang dimiliki oleh rakyat. Bahkan dengan nada mengancam Tanaka memperingatkan sultan akan akibatnya bila surat perintah itu tidak dilaksanakan. Namun demikian sultan tidak memperdulikan perintah itu sehingga sekali lagi Jepang mengulangi perintahnya kepada sultan agar melaksanakan perintah. Bila tidak maka Jepang akan bertindak sesuai dengan kekuasaan yang diberikan Sekutu kepadanya.

Keempat surat tersebut dianggap sepi oleh sultan dan KNI Bima. Bahkan sebagai jawabannya pada tanggal 29 Desember 1945 pos Jepang yang terletak di Sape diserbu rakyat. Serangan umum itu dipimpin oleh Mustamin Abdurrahman yang dibantu oleh Abdul Majid Yusri, Muhammad dan M. Saleh Sarimin. Penyerangan dibagi atas dua sasaran. Ada yang menyerang pos Jepang yang terletak di Oy Maci dan Pelabuhan Sape. Serangan itu dilakukan secara terbuka dan berlangsung dari pukul 02.00 sampai pukul 10.30 keesokan harinya. Kedua Pos Tentara Jepang dikepung rakyat oleh kaum penyerang yang terdiri dari anggota TKR dan API yang diperkuat oleh rakyat umum.

Pada pukul 10.30 pengepungan itu dihentikan sebelum berhasil melucuti senjata Jepang karena perintah dari Sultan Bima. Pihak penyerang mengundurkan diri dan bubar karena kepayahan. Mereka tidak menduga sama sekali pusat kekuasaan Jepang di Bima memanfaatkan kesempatan ini untuk

melancarkan penangkapan terhadap rakyat yang terlibat dalam penyerangan semalam. Pada pukul 15.30 enam buah truk tentara Jepang datang di Sape melakukan pengegedahan dan penangkapan. Para pejuang yang istirahat di rumah masing-masing ditangkap sebelum sempat mengkonsolidasi diri. Mustamin Abdurrahman dan Abdulmajid Yusri sempat melarikan diri sebelum sempat ditangkap. Tetapi dalam perjalanan menuju ke kota Bima mereka tertangkap Jepang dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian mereka mengetahui bahwa mereka ditangkap dan dipenjarakan atas perintah sultan. Lebih bingung lagi karena mereka yang mengepung pos Jepang di Sape dianggap sebagai pengacau.

Jepang telah berhasil memisahkan kaum pejuang dengan sultan. Walaupun terasa pedih semangat para pejuang semakin berkobar-kobar. Atas perintah pimpinan API yang bermarkas di Raba pada tanggal 1 Januari 1946 API menyerang markas balatentara Jepang di Raba. Dalam peristiwa itu dua orang pemuda dan 1 orang Jepang gugur. Keesokan harinya tentara Jepang balas menyerang markas API yang mengancam meluasnya permusuhan. Maka berkat ketangkasan pemimpin kedua belah pihak pertempuran dapat dihindari.

Sementara permusuhan kedua belah pihak dapat mereda. Tetapi karena usaha Jepang yang selalu merampas senjata dari rumah ke rumah menimbulkan kerusuhan lagi. Pada tanggal 5 Januari 1945 di Tente terjadi lagi bentrokan senjata antara para pemuda dengan tentara Jepang. Para pelajar dan pemuda di Bima secara serentak bergerak membuat senjata di pos-pos Jepang yang terdapat di Lumbo, Rabadompu, Lawatta dan Pelabuhan Bima. Akibatnya semakin giat menyita senjata yang dimiliki rakyat. Penangkapan demi penangkapan yang dilakukan oleh Jepang terus berlangsung. Terakhir pada tanggal 10 Januari 1946 Pemimpin API M. Tayib Abdullah dan Ishaka Abdullah dan lain-lain ditangkap Jepang. Dengan demikian seluruh perlawanan rakyat dapat dilumpuhkan yang melicinkan jalan bagi pendaratan NICA di daerah Bima.

Perlawanan Secara Diam-diam Dan Pembokiotan

Semula rakyat yang sangat tertarik dan mengagumi Jepang karena keperkasaannya dan karena propaganda Jepang yang muluk-muluk berbalik menjadi kebencian dan ketakutan. Semboyan Jepang seperti Kemakmuran Bersama, Asia untuk Bangsa Asia, Jepang – Indonesia Sama-sama atau Jepang adalah saudara tua kemudian bagi rakyat hanya penipuan dan kebohongan belaka. Pengerahan tenaga kerja secara paksa dan di luar perikemanusiaan, kekejamannya dan ketamakan serta keberaniannya meminta gadis untuk penghibur di warung kopi bagi rakyat suatu hal yang di luar batas kesopanan umum. Karena itu rakyat pada umumnya bertekad untuk membendunginya sesuai kemampuan. Perlawanan dengan senjata tentulah tidak mungkin maka satu-satunya jalan ialah menghalangi segala usaha Jepang secara tersamar dan berhati-hati tetapi kalau perlu secara terbuka dalam batas kesopanan.

Orang tua yang tidak senang anak lelakinya dijadikan seinden dan heiho segera menikahkan anaknya sehingga tidak memenuhi syarat lagi. Padi-padi disembunyikan. Ada pula yang menitipkannya kepada anggota kerabat, sahabat dan kenalannya. Akibatnya padi merata hampir pada semua rakyat dengan jumlah pemilikan sedikit dan lumbung-lumbung kelihatan kosong. Dalam hal yang demikian kaki tangan Jepang tidak dapat berbuat apa-apa kecuali harus mempercayai bahwa padi yang dimiliki rakyat memang kurang.

Monopoli atas kapas diboikot dengan berbagai cara. Pemanenan dan penjualan kapas di sawah pada malam hari seolah-olah ada pencuri. Sebagian hasilnya sisa terjual secara gelap disembunyikan dan dijual kepada rakyat yang membutuhkannya. Rakyat juga mengambil pekerjaan menenun belah pinang pada Jepang, tetapi pekerjaannya itu dijadikan tirai bagi pekerjaan pribadi. Dibalik kegiatan kerja paruhan, rakyat giat bekerja untuk dirinya sendiri. Yang demikian itu menyulitkan petu gas untuk mengetahuinya karena kalau diperiksa mereka mem-

perlihatkan surat bukti kerja paruhan. Untuk menghindari diri dari pengerahan tenaga kerja rakyat berusaha tidak di rumah sepanjang hari atau menjauh setiap ada petugas yang datang.

Permintaan Jepang akan gadis-gadis ditolak oleh rakyat Bima melalui saluran pemerintahan. Rakyat membentuk suatu komite yang terdiri dari M. Tayib Abdullah, Yahya, Teta Ani, Abubakar Abbas, Dollah Ahmad dan Ahmad Daeng Ame. Komite tersebut menghadap Sultan Bima dan mohon izin untuk menemui Mayor Jenderal Tanaka di Raba. Sultan Bima juga mengutus Jeneli RasanaE, A.D. Talu yang didampingi para gelarang dan para kepala kampung di wilayahnya untuk menyatakan penolakan atas permintaan Jepang. Beberapa tokoh yang lain seperti M. Shaleh Bakri, Dr. Sajirin, Yahya dan Muhammad A.Wahab langsung menemui pimpinan tentara Jepang dan menasihati mereka supaya tidak meminta gadis karena dapat menyinggung perasaan rakyat. Karena mendapat protes dari berbagai pihak demikian itu Jepang pun mengurungkan niatnya untuk mengumpulkan gadis-gadis. Namun demikian karena kekhawatiran dan kegelisahan yang selalu menghantui mereka, anak-anak gadis mereka kawinkan dengan laki-laki yang disukai anak gadis mereka secara serentak. Perkawinan yang demikian lebih terkenal dengan sebutan "kawin berontak." Nusa Tenggara Barat lebih mengutamakan harga diri dari pada yang lain. Maka itu apabila harga dirinya akan terancam pasti akan bangkit, kalau tidak dengan senjata sekurang-kurangnya dengan sikap seperti terurai di atas.

PENUTUP.

Letak geografis Nusa Tenggara Barat yang semula dianggap bangsa barat kurang strategis dan hasil buminya yang kurang menarik pada awal kedatangan bangsa barat di Indonesia sementara telah menyelamatkan daerah ini dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme asing. Barulah daerah ini menjadi titik perhatian bangsa barat, terutama Belanda setelah Pemerintah Inggris mulai menanamkan pengaruhnya di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok pada awal abad ke-19 dan di Pulau Sumbawa pada abad ke-18. Di Pulau Sumbawa Inggris membantu Kerajaan Sumbawa menghancurkan perompak laut di Teluk Saleh dan di Pulau Lombok. Inggris memegang peranan di dalam perdagangan. Hampir tidak ada kapal asing yang dapat berlabuh di Pelabuhan Ampenan tanpa izin dari Kepala Perwakilan Dagang Inggris yang ada di Mataram. Keadaan ini sangat menghawatirkan Pemerintah Belanda kalau sampai daerah ini jatuh ke tangan Inggris. Maka dengan berbagai usaha Belanda mencoba menanamkan kekuasaannya secara formal di Lombok dan baru berhasil pada tahun 1843. Di Pulau Sumbawa usahanya berhasil melalui kekuasaan raja-raja sejak akhir abad ke-17. Tetapi setelah Perang Aceh selesai Belanda ingin menanamkan kekuasaannya secara rial. Ternyata pelaksanaannya tidak semudah yang direncanakannya. Belanda harus membayarnya dengan pengorbanan jiwa dan harta benda mulai dengan Perang Lombok 1894. Kemudian setelah masuk Belanda mengalami berbagai perlawanan walaupun kecil tetapi cukup menggelisahkan mulai dari Pemberontakan Mame-laq, Pemberontakan Gandor, Pemberontakan Pringgabaya, Perlawanan Unru dan sejumlah perlawanan rakyat di daerah Bima seperti Perang Ngali, Perang Dena, Perang Kala dan terakhir Perang Soriutu. Begitu pula pada zaman Jepang sekalipun terkenal keras dan kejam sebagian rakyat Nusa Tenggara Barat juga tidak takut mengadakan perlawanan. Sebab pada dasarnya rakyat Nusa Tenggara Barat lebih mengutamakan harga diri dari pada yang lain. Maka itu apabila harga dirinya akan terancam pasti akan bangkit kalau tidak dengan senjata sekurang-kurangnya dengan sikap seperti terurai di atas.

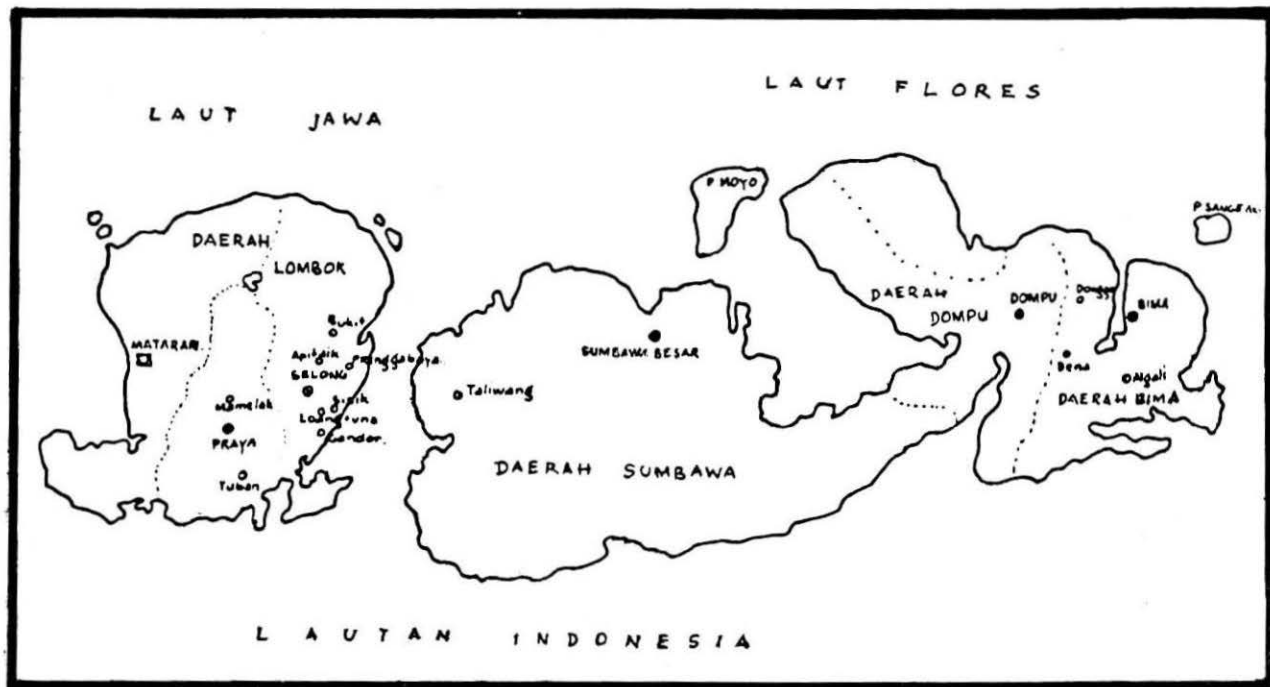
DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdullah Tajib, H. BA,
1981, "Sejarah Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Bima" (makalah), Jakarta, Proyek IDSN.
2. "Babad Lombok."
3. "Babad Praya.
4. "Babad Selaparang."
5. Cool W.
1896, *Lombok Expeditie*, Batavia, G. Kolff & Co.
6. Hilgers, Th. J.A,
1897, *Onze Helden van Lombok*, Semarang, G.C.T. van Dorp & Co.
7. Helius Syamsuddin.
1981, "Perang Ngali dan Perang Sapugara Di Pulau Sumbawa Tahun 1908", Jakarta, Proyek IDSN Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Dikbud.
8. Indische Genootschap"
1902.
9. Lekkerker, C,
1923, "Het voorspel der vestiging van de Nederlandsche macht op Bali en Lombok, *BKI*. 79, hal. 198-322.
10. Naskah Perjanjian antara Kerajaan Mataram dengan Gubernemen pada tanggal 7 Juni 1843.
11. Ratsu.
1980, *Perang Sapugara*, Jakarta, Balai Pustaka.
12. Tim Penyusun Monografi Kabupaten Sumbawa.
1975, "Monografi Kabupaten Sumbawa".
13. Utrecht, Dr. E, S.H.
1962, *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, Badung, Sumur Bandung.
14. Wacana, Lalu.
1978, *Sejarah Nusa Tenggara Barat*, Mataram, Proyek IDKD Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR INFORMAN

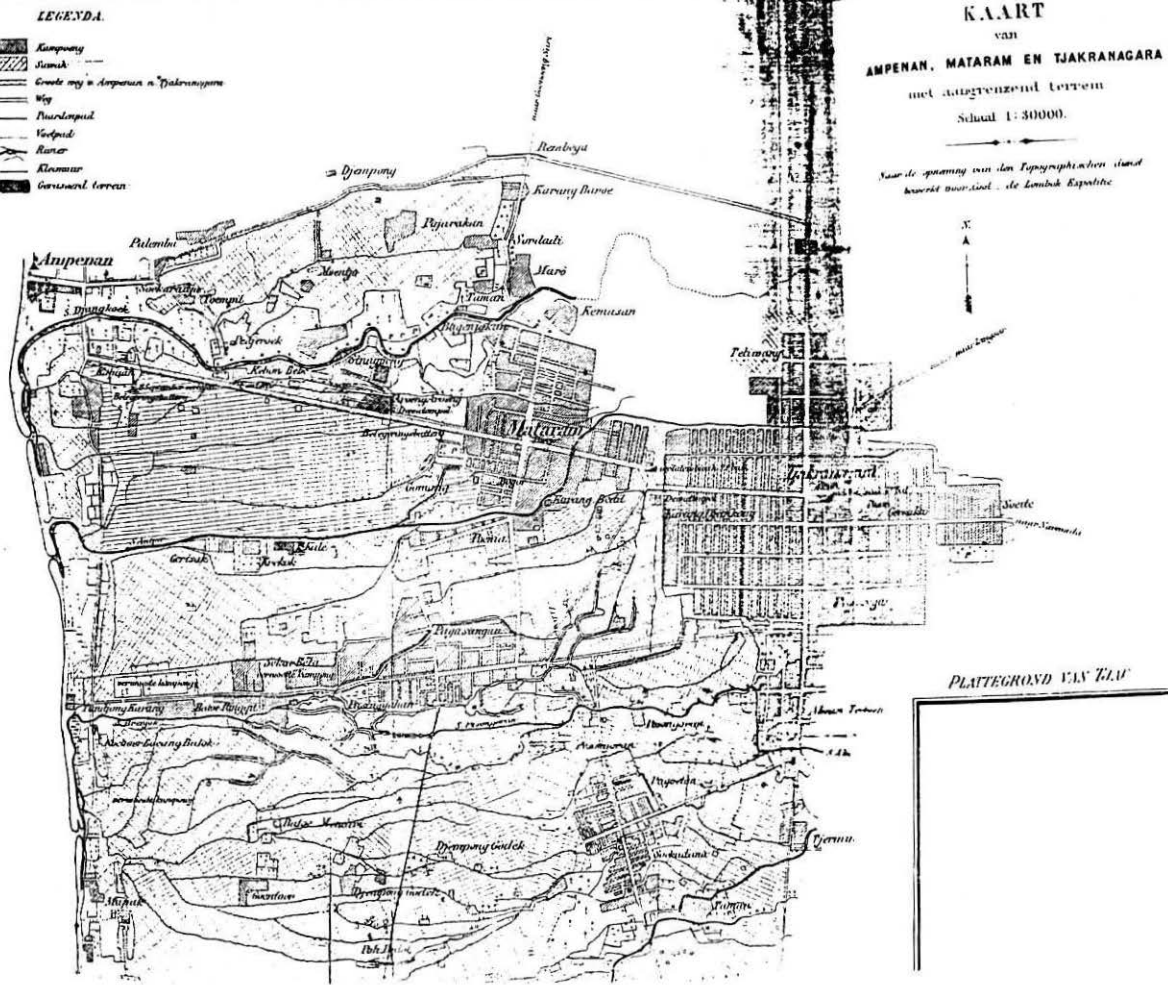
1. Ambawa, Lalu, Kepala SD, Penujaq, Lombok Tengah.
2. Anwar, Lalu, Pegawai Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi NTB, Mataram.
3. Ardan, Lalu, Tani, Anakanyan, Lombok Tengah.
4. Bukil, Tani, Taliwang.
5. Hasan, Pensiunan Pegawai Negeri, Selong.
6. Idris M. Ja'far, Haji, Pensiunan Bupati, Bima.
7. Iskandar, – Taliwang.
8. Jame Ula, Lalu, – Sumbawabesar.
9. Jaya, Lalu, Pensiunan Pegawai Negeri, Mataram.
10. Mandia, G.B, Penilik Kebudayaan, Narmada.
11. Manjawakang, H.M, – Sumbawabesar.
12. Miji, Pensiunan Pegawai Negeri, Praya.
13. Sedek, H.M, Pensiunan Pegawai Negeri, Mataram.
14. Thayeb Abdullah, H.M, Pensiunan Pegawai Negeri, Bima.
15. Rahil, Bp., Pemuka masyarakat, Lenek.
16. Ratmani, Amaq, – Pringgabaya.

PETA PERLAWANAN TERHADAP BELANDA



LEGENDA.

- Komplex
- Straat
- Grote weg in Ampenan en Tjakranagara
- Weg
- Fluwlengtel
- Vloedpad
- Riezel
- Kanaal
- Gemeentel. terrein



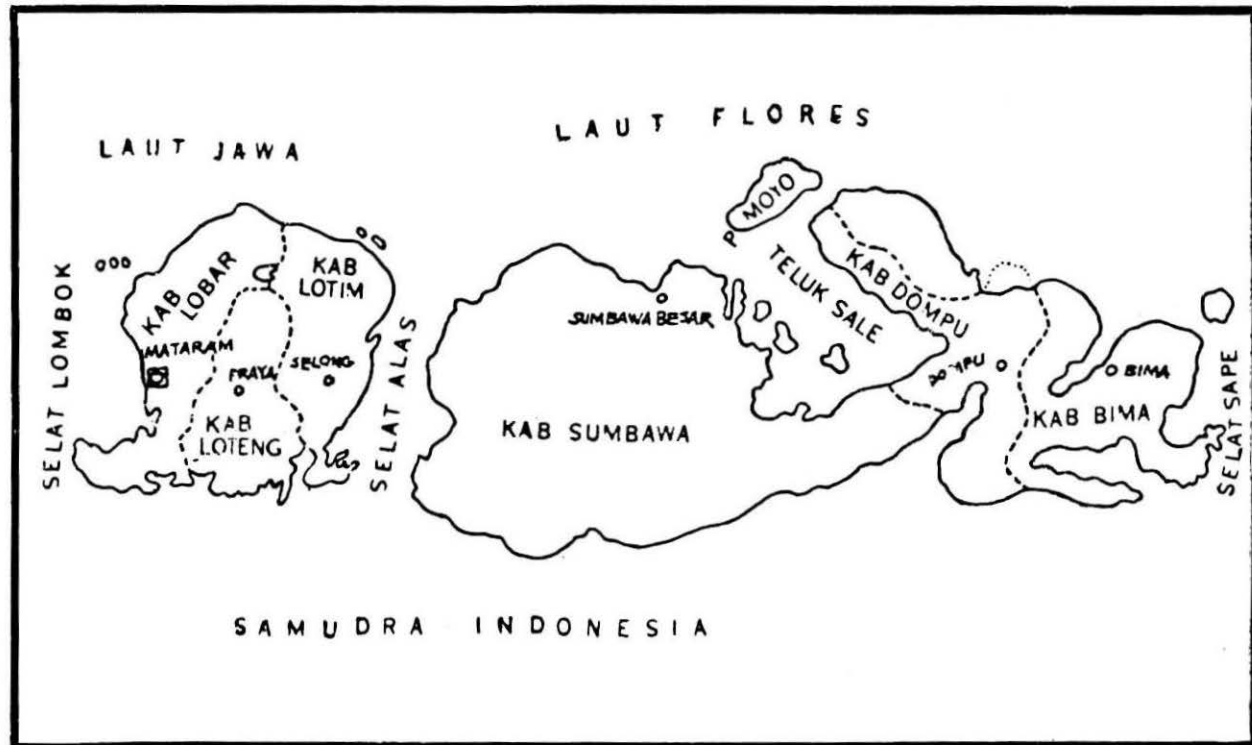
KAART
van
AMPENAN, MATARAM EN TJAKRANAGARA
met aangrenzend terrein
Schaal 1:30000.

Naar de opname van den Topographischen stand
bevecht door: st. de Lombok Expeditie.

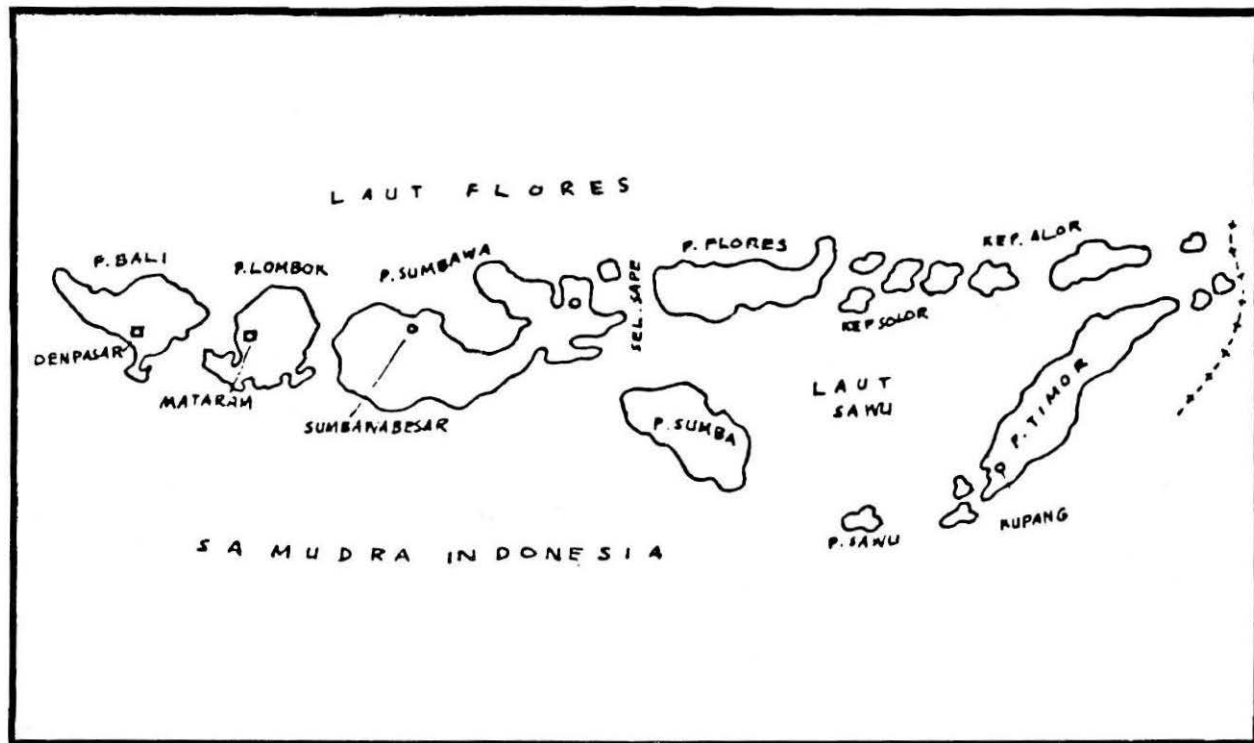
PLATEGROND VAN ZIAU

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

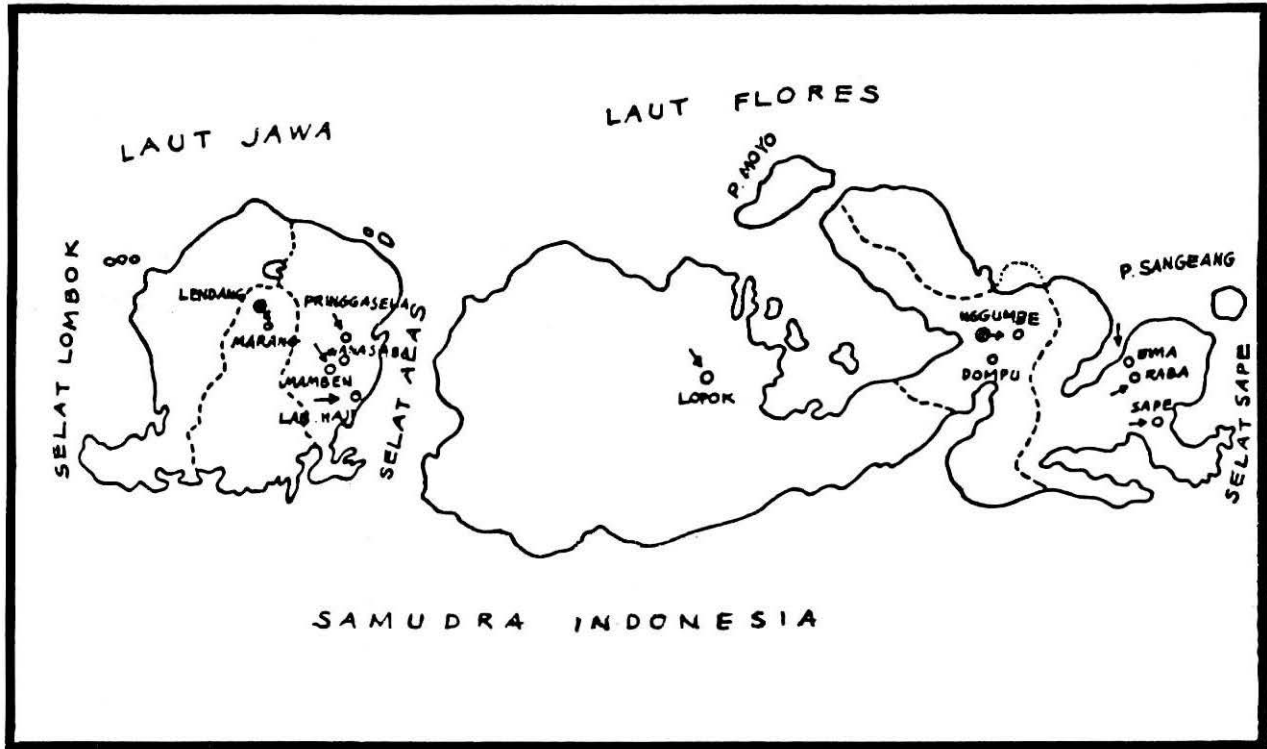
1958 --- SEKARANG



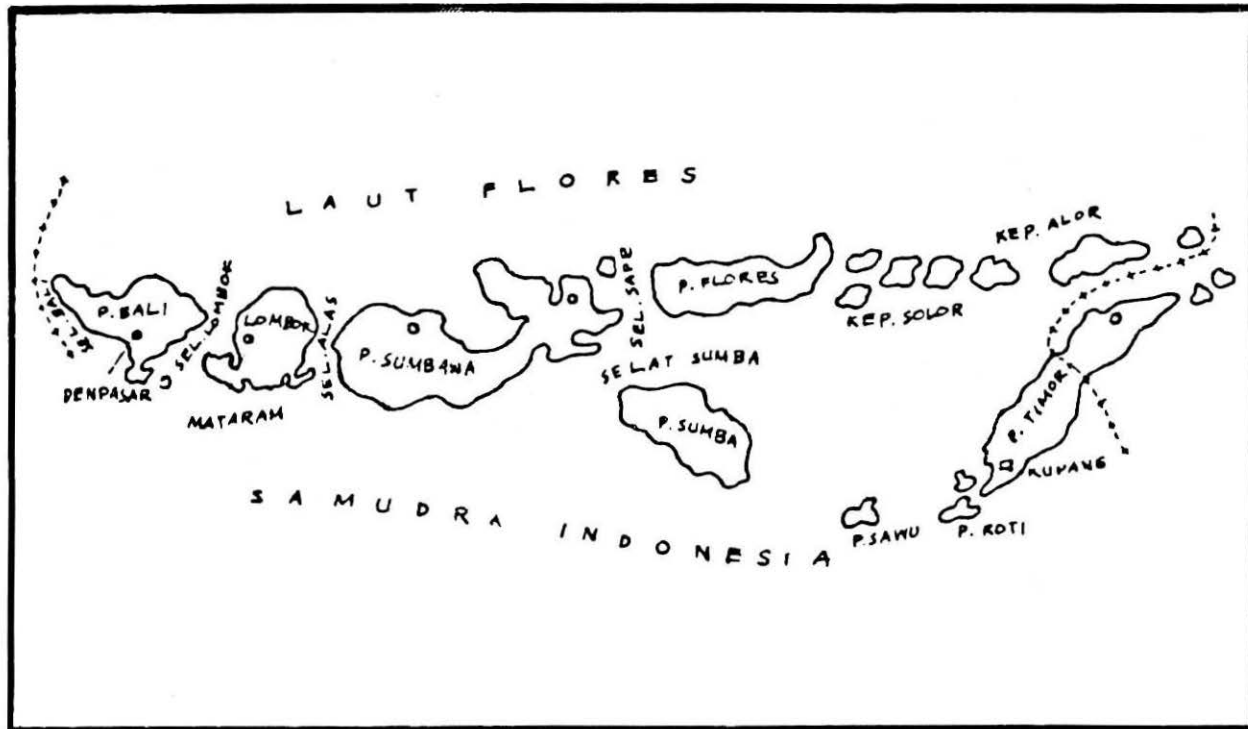
SUNDA KECIL SYU ZAMAN JEPANG (1942-1945)



Perebutan senjata Jepang pusat konsignering BT. Jepang

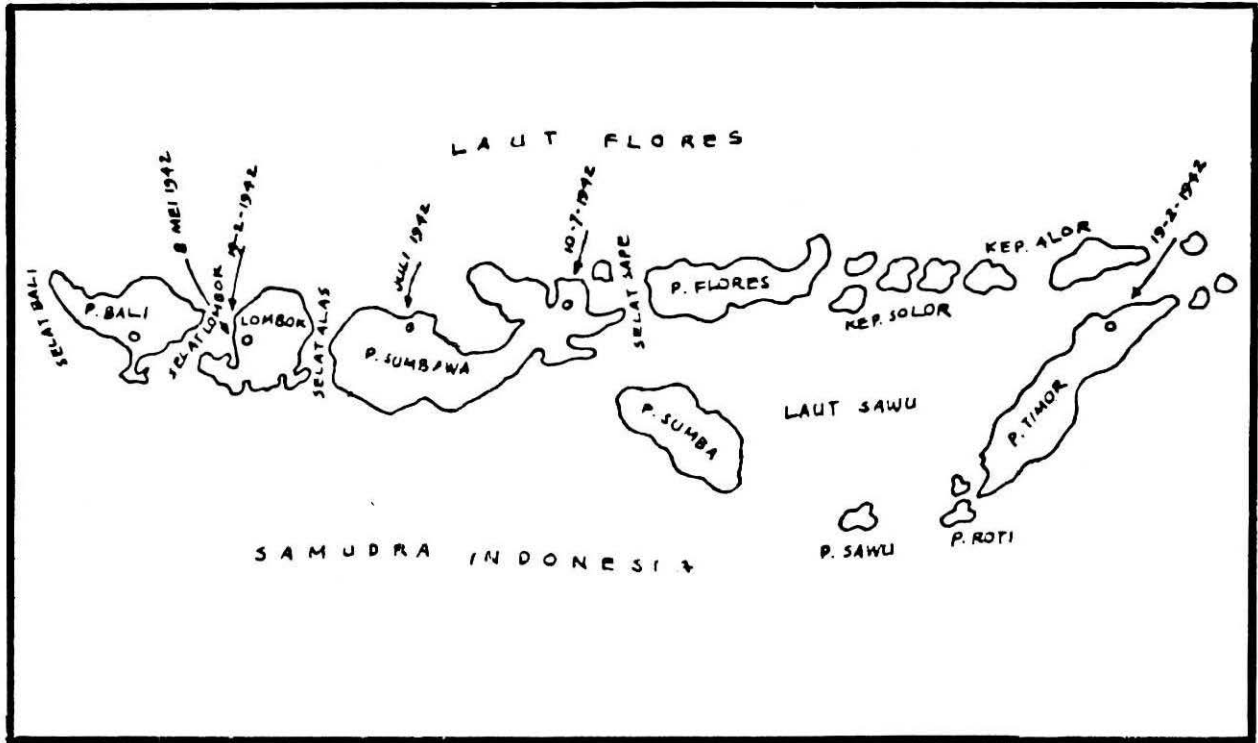


PROPINSI SUNDA KECIL (1945-1946)



ZAMAN JEPANG

PENDARATAN BALA TENTARA JEPANG DI SUNDA KECIL (1942-1945)



Perpustakaan
Jendera

9